



Inventaris Arsip
Komisi Pemberantasan Korupsi
Seri Perkara Tindak Pidana Korupsi
2000-2012



Direktorat Pengolahan
Deputi Bidang Konservasi Arsip
Arsip Nasional Republik Indonesia
2023

**INVENTARIS ARSIP
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
SERI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
2000 - 2012**



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT PENGOLAHAN
DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, 2023**

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, mengamanatkan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk melaksanakan pengelolaan arsip statis berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Pengelolaan arsip statis bertujuan menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Arsip statis yang dikelola ANRI merupakan memori kolektif, identitas bangsa, bahan pengembangan ilmu pengetahuan, dan sumber informasi publik. Untuk meningkatkan mutu pengelolaan arsip statis, khazanah arsip statis yang tersimpan di ANRI harus diolah dengan benar berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan sehingga arsip statis dapat ditemukan dengan cepat, tepat dan lengkap.

Pada Tahun Anggaran 2023, salah satu program kerja Kelompok Substansi Pengolahan Arsip Lembaga Negara yang berada di bawah Direktorat Pengolahan adalah menyusun Inventaris Arsip Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Seri Perkara Tindak Pidana Korupsi kurun waktu 2000 - 2012. Inventaris arsip ini merupakan sarana bantu penemuan kembali arsip statis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tersimpan di ANRI dalam rangka pelayanan arsip statis kepada pengguna arsip.

Kami menyadari bahwa inventaris ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kami senantiasa mengharapkan saran dan kritik membangun demi perbaikan ke depannya. Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan ANRI, anggota tim, Komisi Pemberantasan Korupsi dan semua pihak yang telah membantu penyusunan inventaris arsip ini hingga selesai. Semoga Allah SWT membalas amal baik yang telah Bapak/Ibu/Saudara berikan. Amin.

Jakarta, Desember 2023
Direktur Pengolahan,


Wiwi Diana Sari, S.Si, M.A.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1. Sejarah Organisasi	1
2. Sejarah Arsip.....	3
3. Pertanggungjawaban Penyusunan Inventaris Arsip.....	4
3.1 Pengolahan Arsip.....	4
3.2 Petunjuk Akses Arsip	8
3.2.1 Penggunaan Inventaris Arsip	7
3.2.2 Penggunaan Arsip sebagai Sumber Data	9
DAFTAR PUSTAKA	11
II. URAIAN DESKRIPSI ARSIP	12
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Helikopter Mi-2 merek PLC Rostov Mil Milik Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	12
H. Abdullah Puteh, Msi	12
Bram H. D. Manoopo, M.B.A	15
Teuku Syaifuddin, S.H	17
Ramadhan Rizal, S.H. dan Mochammad Soleh, S.H., M.H.....	18
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pelabuhan Umum di Dusun Uf, Desa Dandar, Kecamatan Pulau Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2001-2003.....	20
Drs. Moch. Harun Let Let dan Capt. Tarcisius Walla.....	20

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kotak Suara pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.....	21
Dr. Ir. Susongko Suhardjo, Msc	21
Drs. Mulyana Wira Kusumah.....	22
Drs. Mulyana Wira Kusumah dan Drs. Richard Manusun Purba, M.M	23
Ir. Sihol P. Manullang	26
Tindak Pidana Korupsi Pemberian Suap terkait Anggaran Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.....	27
Mochammad Dentjik.....	27
Raden Soedji Darmono dan Ishak Harahap.....	29
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Asuransi Petugas Komisi Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum 2004.....	31
Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin	31
Hamdani Amin	32
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pencetakan Buku Panduan KPPS, Buku Keputusan dan Barang Cetakannya Lainnya pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004	34
Drs. R. Bambang Budiarto, M.Si dan Safder Yussac, S.Sos., M.Si	34
Faebudodo Tjahja Kelana Harefa.....	36
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tinta Sidik Jari pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004	37
Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H.....	37
Achmad Rojadi, S.Sos	38
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Segel Surat Suara Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum 2004.....	39
Drs. Daan Dimara, M.A	39
Untung Sastrawijaya	40

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pemancar, Peralatan Server, Jaringan Audio dan Teks, <i>Spare Part</i> Pemancar, dll. untuk Mendukung Siaran Hasil Pemilihan Umum pada Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia Tahun 2004	41
Drs. Suratno, M.M	41
H. Fahrani Suhaimi.....	43
Tindak Pidana Korupsi Penjualan Aset PT Industri Sandang Nusantara	45
Drs. Kuntjoro Hendrartono, M.B.A.....	45
Lim Kian Yin.....	46
Suparman, S.H.....	48
Tindak Pidana Korupsi Pemberian Suap kepada Hakim dalam Perkara Hukum Probosutedjo	49
R. A. Harini Wijoso	49
Pono Waluyo.....	51
H. Suhartoyo, S.H. dan Sudi Achmad, S.H	52
Malem Pagi Sinuhaji dan Sriyadi, S.H.....	53
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Proyek Kegiatan Tahun Investasi Indonesia (TII) atau Indonesia Investment Year (IYY)	55
Theodorus Fransisco Toemion.....	56
Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait Pungutan Tarif Kepengurusan Dokumen Keimigrasian di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang, Malaysia	57
Drs. Muhammad Khusnul Yakin Payapo	57
Erick Hikmat Setiawan	59
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bus untuk Proyek Sarana <i>Busway</i> pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.....	60
Rustam Effendy Sidabutar, S.H	60
Ir. Sylvira Ananda, M.Sc.....	62
Budhi Susanto	63

Tindak Pidana Korupsi Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang Tidak Sesuai dengan Peraturan terkait Program Pembangunan Kelapa Sawit Sejuta Hektar di Provinsi Kalimantan Timur.....	65
H. Suwarna Abdul Fatah	65
Ir. Waskito Suryodibroto, M.M	66
Ir. Uuh Aliyudin, M.M.....	70
Dr. Ir. H. Robian, M.Si.....	72
Martias	74
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Peralatan Laboratorium Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (PRPPSE-KP) pada Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan RI.....	76
Drs. Darsiwan dan Drs. Jules F Patiasiana.....	76
Ir. Andjar Suparman, M.M.....	78
Tirta Winata	79
Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu	81
H. Abubakar Ahmad, S.H	81
Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Tarif Jasa Kepengurusan Dokumen Keimigrasian di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru, Malaysia Tahun 2000 -2004	83
Prihatna Setiawan.....	83
Drs. Eda Makmur	85
Tindak Pidana Korupsi Permintaan Dana 1% - 1,5% Dari Anggaran Setiap Unit Kerja Eselon I dan Dana Dekonsentrasi di Departemen Kelautan dan Perikanan RI.....	86
Dr. Andin H. Taryoto	86
Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S	87

Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2001-2004	90
Drs. H. M. Sjachriel Darham	90
Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2003-2005	93
Hendy Boedoro, S.H., M.Si	93
Drs. Warsa Susilo, M.Pd	95
Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Tahun 2001-2005	97
Prof. Dr. H. Syaukani Hassan Rais, M.M	97
Vonnie Anneke Panambunan	101
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat <i>Automatic Fingerprint Identification System</i> (AFIS) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2004	102
Zulkarnain Yunus dan Apendi	102
Eman Rahman	104
Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait Pungutan Biaya Pengurusan Dokumen Keimigrasian di Kantor Kedutaan Besar RI untuk Malaysia di Kuala Lumpur Tahun 2004-2005	105
Drs. Rusdiharjo, S.H. dan Drs. Arikhen Tarigan	105
Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait Pungutan Biaya Pengurusan Dokumen Keimigrasian di Kantor Kedutaan Besar RI untuk Malaysia di Kuala Lumpur Tahun 2004-2005	106
Drs. Hadi A. Wayarabi Al Hadar dan Drs. Suparba W. Amiarsa	106

Tindak Pidana Korupsi Pembahasan Anggaran Biaya Tambahan terkait Pengadaan Tanah untuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Teknologi Nuklir Tahun 2004	108
Sugiyono Prasojo dan Ir. Hieronimus Abdul Salam, M.Sc.....	108
H. Noor Adenan Razak, S.E.....	111
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran <i>Ladder Truck</i> Morita model MLF 4-30 R di Pemerintah Kota Medan, Sumatra Utara	114
Drs. Abdillah, Ak. M.B.A.....	114
Dr. Drs. Ramli, M.M.....	115
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Tipe V.80 ASM di Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2003	117
H. Saleh Djasit, S.H	117
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Tipe V.80 ASM di Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan Tahun 2003-2004	119
Drs. H. Baso Amiruddin Maula, S.H., M.H., M.Si.....	119
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Tipe V.80 ASM di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2003 dan 2005	121
Ismed Rusdany, S.E., M.A.P.....	121
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Tipe V.80 ASM dan Pembebasan Bea Masuk/Pajak Mobil Pemadam Kebakaran di Beberapa Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Indonesia	124
Oentarto Sindung Mawardi	124
Hengky Samuel Daud, M.B.A	128
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran, <i>Ambulans, Stoom Walls, Dump Truck, Mobil Tangga, Backhoe Loader</i> di Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2004	133
Drs. Danny Setiawan, M.Si., Drs. Wahyu Kurnia, M.M., M.B.A., dan Drs. Ijuddin Budhyana., M.Si.....	133

Yusuf Setiawan	138
Tindak Pidana Korupsi Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman di Kabupaten Pelalawan Tahun 2001-2006	140
H. Tengku Azmun Jafar, S.H.....	140
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pekerjaan Pemeriksaan Penggunaan Tenaga Asing/Audit Investigasi pada 46 (empat puluh enam) Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2004 di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.....	141
Marudin Saur Marulitua S.H., M.M. dan Suseno Tjipto Mantoro, S.E...	141
Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut dan Dana Bantuan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2004-2007	143
H. Agus Supriadi.....	143
Tindak Pidana Korupsi Proyek Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perikanan Tangkap Pasca Gempa dan Gelombang Tsunami pada Satuan Kerja Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006.....	145
David Kurniawan Wiranata.....	145
Asep Hartiyoman, S.Pi. dan Ir. Ade Kusumana, M.M.....	148
Hari Purnomo dan Margareth Elisabeth Tutuarima	153
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Peningkatan Fasilitas Mesin dan Peralatan Pelatihan sebagai Tempat Uji Kompetensi untuk Balai Latihan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (BLK/UPT) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Dalam Negeri (Binapendagri/PPTKDN) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun Anggaran 2004.....	156
Drs. Bachrun Effendi	156
Vaylana Dharmawan.....	158
H. KGS. Taswin Zein, S.E	160
Karnawi.....	164

Ines Wulanari Setyawati	165
Mulyono Subroto	167
Erry Fuad.....	168
Bagindo Quirinno, M.Acc, CMA, CFM, CIA	171
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gedung Komisi Yudisial Republik Indonesia di Jakarta Tahun 2007	174
H. M. Irawady Joenoes, S.H	174
Freddy Santoso.....	176
Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (A PBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2002 – 2006.....	177
Drs. Abdillah, Ak., M.B.A.....	177
Dr. Drs. Ramli, M.M.....	178
Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2006.....	179
Ir. Daud Solleman Betawi.....	179
Tindak Pidana Korupsi Penyerahan Asset oleh Pemegang Saham Bank Penerima BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).....	181
Sjamsul Nursalim.....	181
Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta Tahun Anggaran 2004.....	181
Drs. H. A. Chalik Saleh, M.M.....	181
Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bank Indonesia (BI) yang Dikelola oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) Tahun 2003	183
Ir. Burhanuddin Abdullah, M.A.....	183
Aulia Tantawi Pohan, Bun Bunan E.J. Hutapea, Aslim Tadjuddin, dan Maman Husein	186
Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak	189

Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Suap Terkait Penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)	192
Hamka Yamdhu Y. R., S.E. dan Antony Zeidra Abidin	192
Artalyta Suryani	194
Urip Trigunawan, S.H	196
Tindak Pidana Korupsi Pemberian Suap terkait Rekomendasi/ Persetujuan Pelepasan Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan seluas 600 Ha untuk Pembangunan dan Sarana Dermaga Tanjung Api-Api Tahun 2006-2007	198
Syahrial Oesman.....	198
Sarjan Tahir, S.E., M.M	200
H. M. Yusuf Erwin Faishal	202
Chandra Antonio Tan	204
Tindak Pidana Korupsi Tukar Guling (<i>Ruilslag</i>) Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2004-2006204	
Drs. H. Iskandar	205
Drs. Izzat Husein, M.M	206
Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Bantuan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2006	208
Setia Budi	208
Drs. Samsuri Aspar, M.M	209
Tindak Pidana Korupsi Pungutan Tarif Jasa/Biaya Pengurusan Dokumen Keimigrasian di Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu, Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Kuching, dan Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Tawau, Malaysia Tahun 1999-2005	210
Arifin Hamzah, Radite Edyatmo, Drs. Nugraha, dan Drs. Kamso Simatupang.....	210

Tindak Pidana Korupsi Pungutan Tarif Jasa/Biaya Pengurusan Dokumen Keimigrasian di Konsulat Jenderal RI (KJRI) Kota Kinabalu, Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Kuching, dan Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Tawau, Malaysia Tahun 2000-2005.....	213
Muchamad Sukarna, Mas Tata Machron, Irsyafli Rasoel, dan Makdum Tahir	213
Tindak Pidana Korupsi Pungutan Tarif Jasa/Biaya Pengurusan Dokumen Keimigrasian di Konsulat Jenderal RI (KJRI) Kota Kinabalu, Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Kuching, dan Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Tawau, Malaysia Tahun 2004-2005	216
Kurniawan Roebadi.....	216
Tindak Pidana Korupsi Pelepasan Alih Fungsi Hutan Lindung Pulau Bintan, Kepulauan Riau Tahun 2007-2008.....	217
Drs. Azirwan	217
M. Al Amien Nur Nasution.....	219
Tindak Pidana Korupsi Perbaikan Gedung Kantor Kedutaan Besar RI di Singapura, Wisma Duta Besar, Wisma <i>Deputy Chief of Mission</i> (DCM) dan Rumah-Rumah Dinas Kedutaan Besar RI di Singapura Tahun 2003-2004	221
Mochamad Slamet Hidayat dan Erizal.....	221
Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Suap Terkait dengan Proses Impor Barang yang Masuk atau Diperiksa oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Jalur Hijau pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok Kementerian Keuangan RI.....	223
Agus Sjafiin Pane	223
Tindak Pidana Korupsi Hak Siar Penayangan Pertandingan Liga Utama Inggris (<i>Barclays Premier League</i>) Musim 2007-2010.....	226
Billy Sindoro	226
Ir. H. Mohammad Iqbal.....	229

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal Patroli Kelas III Tipe FRP pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Tahun 2007-2008	232
Djoni Anwir Algamar dan Tansean Parlindungan Malau.....	232
Bulyan Royan.....	234
Dedy Suwarsono.....	236
Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pengadaan, Penyimpanan, dan Penyaluran Gula Kristal Putih di Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI Tahun 2003.....	237
Ranendra Dangin.....	237
Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2004-2006	239
Drs. H. Armen Desky, M.M	239
Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Suap dari Rekanan-Rekanan atau Instalatur PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Wilayah II Jawa Bagian Timur tahun 2003-2006.....	240
Ir. Trijono, M.M	240
Tindak Pidana Korupsi Perkara Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2006-2007	243
Jimmy Rimba Rogi, S.Sos.....	243
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Rontgen <i>Portable</i> untuk Pelayanan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Tahun Anggaran 2007	245
dr. Madiono, M.P.H	245
Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2007	246
Ismunarso	246

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Medik untuk Daerah Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat Tahun 2003	248
dr. Achmad Sujudi, M.H.A	248
Drs. Gunawan Pranoto, Apt. dan Rinaldi Yusuf.....	251
Tindak Pidana Korupsi Pemberian Suap terkait Persetujuan Usulan Anggaran Program Stimulus Fiskal Kementerian Perhubungan RI tahun 2009.....	254
Hontjo Kurniawan	254
Darmawati Dareho, S.H., M.M.....	255
Abdul Hadi Djamal	257
Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Pasar Sentral, Terminal Induk, Rumah Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Mes Pegawai serta Kantor Cabang Bank Papua pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan Daerah dan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Supiori, Papua Tahun Anggran 2006-2008	258
Jules Fitzgerald Warikar	258
Suryadi Sentosa.....	261
Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Aset Eks Yayasan Dana Tabungan Pesangon Pekerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (YDTP-MIGAS) Tahun 2003 – 2008	264
Muzni Tambusai.....	264
Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2004.....	266
Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si. dan Drs. H. Daeng Rusnandi, M.B.A., M.Si.....	266
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan <i>Outsourcing</i> Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (<i>Customer Management System</i>) di PT PLN Distribusi Jawa Timur Tahun 2004-2007	267
Ir. Hariadi Sadono, M.M.....	267
R. Saleh Abdul Malik, Achmad Fathony Zakaria, dan	

Arthur Pelupessy.....	270
Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dan Dana Kantor Bank Jawa Barat untuk Kepentingan Pribadi atau Pihak Lain Tahun 2002-2005	272
Umar Sjarifuddin.....	272
Tindak Pidana Korupsi proyek Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Gas (PEMJADIG) tahun 2003 dan Penyusunan Terkait Permohonan Persetujuan terhadap Rencana <i>Initial Public Offering</i> yang Akan Dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara.....	274
Drs. Washington Mampe Parulian Simanjuntak	274
Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Sejumlah Uang terkait Pemenangan Miranda Swaray Goeltom pada Pelaksanaan Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Tahun 2004	276
Hamka Yamdhu Y. R.....	276
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Iklan Layanan Masyarakat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006-2007	276
71.1. Jurnal Effendi Siahaan	276

LAMPIRAN

Indeks	277
Daftar Singkatan.....	291
Daftar Istilah.....	294

I. PENDAHULUAN

1. Sejarah Organisasi

Kata 'korupsi' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Praktek korupsi di Indonesia sudah ada sejak jaman kolonial. *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) mengalami kebangkrutan dikarenakan adanya korupsi dalam organisasi tersebut. Seiring dengan berkembangnya kehidupan bernegara, wabah korupsi juga mulai memasuki birokrasi di tanah air. (Denny Indrayana, 2009)

Dalam hal memberantas praktek korupsi, Indonesia sejak jaman orde lama telah melakukan berbagai upaya dengan lahirnya hukum positif antikorupsi hingga pembentukan institusi yang diberi kewenangan khusus untuk memberantas praktek korupsi.

Pada tahun 1958 Indonesia membentuk Badan Koordinasi Penilik Harta berdasarkan Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat No. Prt/Perpu 013/1958 tanggal 16 April 1958. Badan ini diberi kewenangan untuk menyita harta dan memeriksa harta benda setiap orang dan setiap badan yang jika ada petunjuk yang kuat bahwa harta tersebut diperoleh dari korupsi. Badan Koordinasi Penilik Harta merupakan lembaga pertama di Indonesia yang memiliki cakupan upaya antikorupsi. Di tahun 1959, terbentuklah Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1959. Lembaga ini dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Bapekan berdiri selama tiga tahun. Lembaga ini dibubarkan dan digantikan dengan Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran I). Paran I dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1962 tentang Peraturan Tata Tertib Aparatur Pemerintah Negara Tingkat Tinggi dan dipimpin oleh A. H. Nasution. Sama seperti Bapekan, Paran I hanya berumur 1 tahun. Paran I digantikan dengan Paran II atau yang dikenal dengan Operasi Budi. Lembaga ini dibentuk pada tahun 1963 berdasarkan Keputusan Presiden No. 277 Tahun 1963 dan masih dipimpin oleh A. H. Nasution. Berselang satu tahun, tepatnya pada

tanggal 12 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1964 sebagai penanda berdirinya Komando Retooling Aparatur Revolusi (Kotrar) dan membubarkan Paran II/Operasi Budi.

Memasuki masa orde baru di tahun 1967, Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 tentang pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini banyak menuai kritik dikarenakan dianggap tidak mampu mengungkap kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara dan desain kelambagaan yang tidak independen. Tanpa membubarkan Tim Pemberantasan Korupsi, tahun 1970 Soeharto mendirikan Komisi 4 yang diketuai oleh Wilopo. Bekerja selama lima bulan, diakhir tugasnya Komisi 4 memberikan saran-saran kepada Presiden Soeharto dalam mempercepat pemberantasan korupsi dan dibubarkan pada akhir tahun 1970. Di tahun 1977, Presiden Soeharto meluncurkan Operasi Penertiban (Opstib) melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977. Opstib merupakan operasi antikorupsi dan bukan suatu lembaga. Perjalanan opstib cukup lama dibandingkan lembaga antikorupsi yang pernah dibentuk di tahun-tahun sebelumnya, yaitu selama 4 (empat) tahun. Tahun 1982, Presiden Soeharto membangunkan Tim Pemberantasan Korupsi yang dibentuk pada tahun 1967 dari mati surinya. Dengan dikepalai oleh J. B. Sumarlin yang juga merangkap sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Tim Pemberantasan Korupsi generasi kedua ini dibangun tanpa dasar hukum.

Runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto di tahun 1998, melahirkan era reformasi. Di era ini, tuntutan masyarakat akan pemberantasan korupsi, yang lebih dikenal dengan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) semakin gencar. Di tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di tahun ini, pemerintah membentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). KPKPN beroperasi sejak tahun 1999 sampai dengan 2001.

Namun, di tahun 2000 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 untuk membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (TGTPK) yang dipimpin oleh Marzuki Darusman. Lemahnya dasar hukum pembentukan TGTPK, membuat lembaga ini mudah diserang melalui *judicial review*. Dengan adanya keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan *judicial review* terhadap TGTPK, berbuntut pada pembubaran lembaga ini di tahun 2001.

Setahun setelah TGTPK dibubarkan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang dikenal dengan KPK hingga saat ini.

Empat tahun kemudian setelah TGTPK dibubarkan, melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TimTasTipikor). Dalam menjalankan tugasnya, TimTasTipikor bekerja sama dan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Ombudsman Nasional dan instansi pemerintah lainnya. Jadi, ketika tim ini dibentuk KPK masih ada.

KPK sekarang yang kita kenal merupakan organisasi yang terbentuk di tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Selanjutnya, di tahun 2019 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPK memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat, Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Deputi Bidang Informasi dan Data, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, serta Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

2. Sejarah Arsip

Arsip KPK terdiri dari 2 (dua) seri yaitu seri perkara tindak pidana korupsi dan seri Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Arsip KPK seri perkara tindak pidana korupsi diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia

(ANRI) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2016 dan 2017. Pada tanggal 3 Februari 2016, dengan dengan Berita Acara Nomor: BA-01/01-53/02/2016 arsip yang diserahkan sebanyak 135 nomor arsip. Sedangkan pada tanggal 26 April 2017 dengan Berita Acara Nomor: BA-18/01-53/09/2017, arsip yang diserahkan sebanyak 169 boks/33,8 ML terdiri dari 1.387 nomor arsip.

Kurun waktu arsip KPK seri perkara tindak pidana korupsi yang telah diserahkan ke ANRI berkisar pada tahun 2000-2012. Media arsip yang diserahkan ke ANRI keseluruhannya berupa arsip kertas dan terdapat 1 (satu) buah *compact disc*. Selanjutnya, isi informasi arsip yang diserahkan adalah proses perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa oleh KPK yang diawali dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan diakhiri dengan eksekusi.

Arsip KPK seri Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diserahkan ke ANRI pada tanggal 27 September 2016 dengan Berita Acara Nomor: BA-/3/01-53/09/2016 sebanyak 1574 nomor arsip dan pada tanggal 15 Desember 2017 dengan nomor Berita Acara Nomor: 47/KR.04.02/01-53/12/2017 sebanyak 187 nomor arsip.

Kurun waktu arsip KPK seri LHKPN yang telah diserahkan ke ANRI berkisar pada tahun 2000-2008. Media arsip yang diserahkan berupa arsip kertas dan arsip foto sebanyak 16 lembar. Selanjutnya, isi informasi arsip KPK seri LHKPN yaitu berupa laporan harta kekayaan para penyelenggara negara pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

3. Pertanggungjawaban Penyusunan Inventaris Arsip

3.1 Pengolahan Arsip

Pengolahan arsip KPK seri Perkara Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh tim kerja penyusun Inventaris Arsip KPK seri Perkara Tindak Pidana Korupsi. Kegiatan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Direktur Pengolahan Nomor KN.01.00/591/2023 tentang Tim Penyusun Inventaris Arsip KPK RI terdiri dari Kris Hapsari sebagai Ketua, Lola Palmita sebagai Wakil Ketua Tim, Dini Elisa Setiatri sebagai Sekretaris, dengan anggota yaitu Isya Ansori, Kartini, Shinta Agustin, Ayu Rizky Parwati, Nurul Lukmansyah, Ratna Absari, Agus Setiawan, dan Andika Satriya Perdana. Namun, pada pertengahan tahun terjadi mutasi dan

penambahan pegawai di lingkungan Direktorat Pengolahan yang menyebabkan adanya perubahan pada Tim Penyusun Inventaris KPK. Dengan Surat Perintah Direktur Pengolahan Nomor KN.01.00/3632/2023 Tim Penyusun Inventaris KPK terdiri dari Kris Hapsari sebagai Ketua, Lola Palmita sebagai Wakil Ketua Tim, Dini Elisa Setiatri sebagai Sekretaris, dengan anggota yaitu Kartini, Shinta Agustin, Ayu Rizky Parwati, Nurul Lukmansyah, Ratna Absari, Agus Setiawan, Andika Satriya Perdana, dan Muhammad Yoga Pratama.

Pengolahan dan penyusunan Inventaris Arsip KPK Seri Perkara Tindak Pidana Korupsi 2000-2012 dilaksanakan selama dua belas bulan, mulai Januari s.d. Desember 2023. Prosedur pengolahan arsip mengacu kepada Peraturan Kepala ANRI Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Direktorat Pengolahan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyusunan Inventaris Arsip Statis. Pengolahan arsip dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah pengolahan arsip statis melalui tahapan kerja sebagai berikut:

a. Identifikasi Arsip

Kegiatan identifikasi dilakukan untuk mengetahui konteks dan sistem penataan arsip yang digunakan KPK sebagai pencipta arsip. Konteks arsip dapat diketahui melalui pemahaman fungsi dan tugas KPK, hal ini berkaitan dengan prinsip asal-usul (*principle of provenance*). Terkait dengan prinsip aturan asli (*principle of original order*) dilakukan dengan mengidentifikasi unit informasi seri arsip yang masih utuh susunannya, sehingga dapat dijadikan acuan penyusunan unit informasi arsip lainnya.

b. Penyusunan Rencana Teknis

Berdasarkan hasil identifikasi, tahapan berikutnya membuat rancangan kerja atau rencana teknis dengan menguraikan perkiraan waktu, biaya dan pelaksanaan kegiatan pengolahan arsip statis.

c. Penelusuran Sumber dan Referensi

Tahapan selanjutnya dari pengolahan arsip adalah kegiatan penelusuran sumber dan referensi. Kegiatan penelitian melalui sumber cetakan/referensi di perpustakaan atau instansi terkait. Informasi ini kemudian digunakan sebagai

dasar pembuatan skema pengaturan arsip, yaitu dengan melihat struktur organisasi atau tugas dan fungsi KPK.

d. Pembuatan Skema Sementara Pengaturan Arsip

Hasil dari penelusuran sumber dan referensi akan diperoleh data yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi dari KPK sehingga dapat digunakan untuk mengelompokkan arsip berupa skema pengaturan arsip sementara.

e. Rekonstruksi Arsip

Dalam proses ini dilakukan pemilahan yaitu memisahkan antara arsip dan non arsip, yang selanjutnya dikelompokkan berdasarkan skema sementara.

f. Deskripsi Arsip

Deskripsi arsip adalah kegiatan membuat rincian informasi yang terkandung dalam arsip secara lengkap pada komputer dengan format *excel*. Deskripsi arsip KPK terdiri dari bentuk redaksi, isi informasi, kurun waktu, tingkat perkembangan dan bentuk luar.

g. Penyusunan Skema Definitif Pengaturan Arsip

Dari hasil deskripsi arsip, diperoleh gambaran kegiatan secara menyeluruh tugas dan fungsi KPK. Terdapat beberapa tambahan informasi yang berkaitan dengan pengelompokan unit informasi pada skema sementara, hal ini digunakan untuk menyempurnakan menjadi skema arsip definitif.

h. Manuver data/Penyatuan Informasi dan Fisik Arsip

Manuver data dan fisik arsip dilakukan dengan mengelompokkan hasil deskripsi dan fisik arsip sesuai dengan skema definitif dan diurutkan secara kronologis.

i. Penomoran definitif

Setelah manuver data/informasi dan fisik arsip selesai maka dilakukan penomoran definitif pada seluruh data arsip.

j. Pemberian Label Arsip

Setelah manuver dan penomoran arsip, selanjutnya dilakukan pemberian label pada bungkus arsip dan boks arsip. Label arsip terdiri atas nama pencipta dan nomor arsip dan untuk label boks terdiri atas nama lembaga pencipta arsip, kurun waktu arsip, nomor urut arsip, dan nomor urut boks.

k. Penataan Boks

Kegiatan selanjutnya adalah penataan arsip dalam boks arsip, arsip yang sudah diberi label dimasukkan ke dalam boks besar.

l. Penulisan Inventaris

Setelah semua data terkumpul maka dilakukan penulisan inventaris arsip yang terdiri atas: judul; kata pengantar; daftar isi; pendahuluan yang berisi: sejarah organisasi, riwayat arsip, dan pertanggungjawaban pengolahan arsip statis; uraian informasi arsip; dan lampiran-lampiran yang berisi: daftar indeks, daftar singkatan, dan daftar istilah. Penulisan judul inventaris arsip ini digunakan kurun waktu 2000-2012. Tahun 2000 merupakan tanggal tertua arsip yang ditemukan yaitu mengenai berkas perkara tindak pidana korupsi atas nama Ir. Abdullah Puteh, sedangkan tahun 2012 merupakan tanggal termuda arsip yaitu mengenai berkas penyitaan asset dan eksekusi atas nama Drs. Washington Mampe Parulian.

m. Penilaian dan Uji Petik

Draf inventaris arsip yang telah disusun, disampaikan kepada Direktur Pengolahan untuk mendapatkan arahan dan masukan bagi penyempurnaan draf inventaris. Untuk fisik arsip, dilakukan verifikasi oleh tim unit kerja penyimpanan arsip. Uji petik dilakukan untuk mengetahui ketepatan antara data yang tertuang dalam draf inventaris dengan fisik arsip yang sudah dimasukkan dalam boks.

n. Pengesahan

Draf inventaris yang telah disempurnakan dan diverifikasi diajukan kepada Direktur Preservasi untuk proses validasi. Setelah mendapat validasi, draf inventaris diajukan kembali kepada Direktur Pengolahan untuk pengesahannya. Inventaris yang telah mendapatkan pengesahan, kemudian didistribusikan kepada unit kerja terkait seperti Direktorat Preservasi dan Direktorat Layanan dan Pemanfaatan untuk digunakan sebagai sarana bantu penemuan kembali arsip dalam rangka akses dan layanan arsip statis.

Pengaturan unit informasi arsip KPK seri Perkara Tindak Pidana Korupsi 2000-2012 dilakukan secara bertingkat berdasarkan analisis fungsi organisasi KPK pada kurun waktu 2002-2019. Fonds yaitu KPK, subfonds yaitu Penindakan dan

Eksekusi dan seri Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan item arsip penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi.

3.2 Petunjuk Akses Arsip

3.2.1 Penggunaan Inventaris Arsip

Inventaris ini terdiri dari pendahuluan, uraian deskripsi arsip, penutup, daftar pustaka, lampiran yang memuat indeks, daftar singkatan, dan daftar istilah. Inventaris ini memuat 585 nomor arsip dan tersimpan dalam 310 boks (62 meter linear) untuk arsip kertas dan 1 (satu) *compact disc*.

Untuk efektivitas penelusuran arsip yang terdapat dalam Inventaris Arsip KPK Seri Perkara Tindak Pidana Korupsi 2000-2012, sebaiknya pengguna perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Membaca seluruh pendahuluan inventaris arsip yang memuat informasi mengenai sejarah arsip dan organisasi KPK, serta pertanggungjawaban pembuatan Inventaris Arsip KPK oleh Tim Penyusun, yang didalamnya terdapat gambaran mengenai skema pengaturan arsip KPK. Hal ini akan membantu pencarian arsip karena pengguna dapat mengetahui arsip yang dicari. Contohnya untuk mengetahui kasus korupsi dengan nama koruptor Ir. Abdullah Puteh, pengguna dapat menggunakan indek pada huruf 'P' atau dapat melihat daftar isi yang dilengkapi dengan nama kasus perkara.
- 2) Memperhatikan daftar isi inventaris arsip secara keseluruhan, karena terdapat kelengkapan inventaris secara utuh sehingga pengguna tahu bahwa inventaris ini juga disertai lampiran yang daftar istilah, daftar singkatan, dan indeks yang dapat membantu pengguna dalam mencari informasi atas nama, tempat dan singkatan yang terkandung dalam arsip.
- 3) Untuk mencari nama orang, nama lembaga, tempat, dan masalah yang terdapat dalam khazanah arsip dapat menggunakan indeks yang disusun secara alfabetis.

Contoh pencarian melalui indeks:

Kementerian Keuangan RI	: 466, 467, 468, 469, 470, 471
Tambusai, Muzni	: 558, 559, 560, 561
Garut	: 316, 317, 318, 319

Nomor pada indeks tersebut merujuk pada nomor inventaris.

- 4) Untuk mengetahui kepanjangan suatu singkatan atau makna istilah tertentu yang terdapat dalam deskripsi arsip, dapat menggunakan daftar singkatan yang disusun secara alfabetis.

Contoh:

Kepanjangan DCM pada daftar singkatan terdapat pada kelompok singkatan yang dimulai dengan huruf “D”.

DCM : *Deputy Chief of Mission*

- 5) Untuk mengakses inventaris arsip ini melalui prosedur di Ruang Layanan (Ruang Baca) ANRI, pengguna hanya menuliskan judul inventaris arsip dan nomor inventaris arsip.

Contoh:

387 Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Ir. Burhanuddin Abdullah, MA sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia/Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam perkara penyalahgunaan dana Bank Indonesia (BI) yang dikelola oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) Tahun 2003.

15-29 Oktober 2008
kopi, salinan
1 sampul

Penulisan di formulir peminjaman:

KPK Seri Perkara Tindak Pidana Korupsi 2000-2012 Nomor 387.

3.2.2 Petunjuk Penggunaan Arsip sebagai Sumber Data

Arsip sebagai rekaman kegiatan dan peristiwa merupakan sumber data primer untuk penelitian ilmiah. Penulisan kutipan penggunaan arsip KPK Seri Perkara Tindak Pidana Korupsi 2000-2012 yang terdapat dalam inventaris ini sebagai sumber data penelitian/penulisan karya ilmiah dilakukan sebagai berikut.

Arsip Nasional Republik Indonesia, *Inventaris Arsip Komisi Pemberantasan Korupsi Seri Perkara Tindak Pidana Korupsi 2000-2012*, Jakarta, 2023, Nomor Inventaris...

Atau:

ANRI, *Inventaris Arsip Komisi Pemberantasan Korupsi Seri Perkara Tindak Pidana Korupsi 2000-2012*, Jakarta, 2023, No. Inventaris ...

DAFTAR PUSTAKA

Hartanti, Evi. (2008). *Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Kasus Korupsi*. Bandung: Mandar Maju.

Indrayana, Denny. (2009). *Jangan Bunuh KPK Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Kompas.

Tempo. (2013). *KPK Tak Lekang*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

II. URAIAN DESKRIPSI

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Helikopter Mi-2 Merek PL Rostov Mil Milik Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si

1. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/01/XII/2004/KPK atas nama Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si sebagai Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam berisi lampiran barang bukti jilid I dan III dalam perkara pengadaan helikopter Mi-2 merek PLC Rostov Mil milik Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2001/2002.

15 November 2000 - 9 November 2004

kopi

2 jilid

2. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/01/XII/2004/KPK atas nama Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si sebagai Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam berisi lampiran barang bukti jilid II dalam perkara pengadaan helikopter Mi-2 merek PLC Rostov Mil milik Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2001/2002.

15 November 2000 - 9 November 2004

kopi

1 jilid

3. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/01/XI/2004/KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si sebagai Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dalam perkara pengadaan helikopter Mi-2 merek PLC Rostov Mil milik Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2001/2002.

25 Juni - 29 November 2004

asli, kopi

1 jilid

4. Berkas penuntutan atas nama Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si sebagai Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dalam perkara pengadaan helikopter Mi-2 merek PLC Rostov Mil milik Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001/2002.

19 Juli 2004 - 7 Maret 2005

kopi

1 sampul

5. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas nama Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si sebagai Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dalam perkara pengadaan helikopter Mi-2 merek PLC Rostov Mil milik Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2001/2002.

17 Maret - 13 September 2005

kopi

1 sampul

6. Berkas eksekusi atas nama Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dalam perkara pengadaan helikopter Mi-2 merek PLC Rostov Mil milik Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2001/2002.

10 Oktober - 1 Desember 2005

kopi

4 lembar

7. Surat dari Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam kepada Ketua Mahkamah Agung RI mengenai permintaan penerbitan fatwa terhadap status helikopter Mi-2 yang menjadi objek dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan helikopter Mi-2 merek PLC Rostov Mil milik Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2001/2002.

20 Januari 2009

tembusan

6 lembar

8. Berkas peninjauan kembali atas nama Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dalam perkara pengadaan helikopter Mi-2 merek PLC Rostov Mil milik Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2001/2002.

20 Februari - 29 Maret 2012

kopi

1 sampul

Bram H.D. Manopo, M.B.A

9. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/01/IV/2005/KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Berita Acara Pemeriksaan, lampiran barang bukti, dll. atas nama Bram H.D. Manopo, M.B.A sebagai Presiden Direktur PT Putra Pobiagan Mandiri dalam perkara pengadaan helikopter Mi-2 merek PLC Rostov Mil milik Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam Tahun Anggaran 2001/2002.

25 Juni 2004 - 25 April 2005
asli, kopi
2 jilid

10. Siaran pers Mahkamah Konstitusi mengenai penolakan atas permohonan uji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diajukan oleh Bram H.D. Manoppo, M.B.A.

15 Februari 2005
kopi, konsep
1 sampul

11. Berkas penuntutan atas nama Bram H.D. Manoppo, M.B.A sebagai Direktur Utama PT Putra Pobagian Mandiri dalam perkara pengadaan helikopter Mi-2 merek PLC Rostov MIL milik Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001/2002.

30 Mei - 16 Agustus 2005
kopi
1 sampul

12. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 02/PID.B/TPK/2005/PN.JKT.PST atas nama Bram H.D. Manoppo, M.B.A sebagai Direktur Utama PT Putra Pobagian Mandiri dalam perkara pengadaan helikopter Mi-2 merek PLC Rostov MIL milik Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001/2002.

20 September 2005

kopi

1 sampul

13. Surat dari Pengadilan Negeri kepada Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pemberitahuan isi petikan Putusan Grasi Presiden RI Nomor: 5/G Tahun 2007 atas nama Bram H.D. Manoppo, M.B.A sebagai Direktur Utama PT Putra Pobagian Mandiri dalam perkara pengadaan helikopter Mi-2 merek PLC Rostov MIL milik Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001/2002.

24 Januari 2008

asli, salinan

4 lembar

Teuku Syaifuddin, S.H.

14. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/06/VIII/2005/KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Teuku Syaifuddin, S.H. sebagai pengacara terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dalam perkara pemberian suap kepada Moch. Soleh, S.H. (Panitera Pengganti) dan Ramadhan Rizal, S.H. (Wakil Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) untuk membantu meringankan atau memutus bebas perkara Ir. Abdullah Puteh, M.Si terkait pengadaan helikopter Mi-2 merek PLC Rostov MIL Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001/2002.

15 Juni - 9 Agustus 2005

asli, kopi

1 jilid

15. Berkas penuntutan atas nama Teuku Syaifuddin, S.H. sebagai advokat/pengacara Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dalam perkara pemberian suap kepada Moch. Soleh, S.H., M.H. (Panitera Pengganti) dan Ramadhan Rizal, S.H. (Wakil Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) untuk membantu meringankan atau memutus bebas perkara Ir. Abdullah Puteh, M.Si terkait pengadaan helikopter Mi-2 merek PLC Rostov MIL Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001/2002.

30 Agustus - 18 November 2005

asli, kopi

1 sampul

16. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi atas nama Teuku Syaifuddin, S.H. sebagai advokat/pengacara Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dalam perkara pemberian suap kepada Moch. Soleh, S.H., M.H. (Panitera Pengganti) dan Ramadhan Rizal, S.H. (Wakil Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) untuk membantu meringankan atau memutus bebas perkara Ir. Abdullah Puteh, M.Si terkait pengadaan helikopter Mi-2 merek PLC Rostov MIL Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001/2002.

18 Oktober 2005 - 30 Januari 2006

asli, kopi

1 sampul

Ramadhan Rizal, S.H. dan Mochammad Soleh, S.H., M.H.

17. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/07/VIII/2005/KPK berisi laporan kejadian korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Ramadhan Rizal, S.H. sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mochamad Soleh, S.H., M.H. sebagai Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara penerimaan suap pada persidangan kasus pengadaan helikopter Mi-2 merek PLC Rostov Mil Milik Pemerintah Nanggroe Aceh Darusalam sekitar 2001/2002.

15 Juni - 9 Agustus 2005

asli, kopi

1 jilid

18. Berkas penuntutan atas nama Ramadhan Rizal, S.H. sebagai Wakil Ketua Panitera dan Mochammad Soleh, S.H., M.H. sebagai Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara penerimaan suap dari Teuku Syaifuddin, S.H. sebagai kuasa hukum Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si. untuk membantu meringankan putusan atau membebaskan perkara Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si terkait pengadaan helikopter Mi-2 merek PLC Rostov Mil Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2001/2002.

30 Agustus - 21 Oktober 2005

asli, kopi

1 sampul

19. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas nama Ramadhan Rizal, S.H. sebagai Wakil Ketua Panitera dan Mochammad Soleh, S.H., M.H. sebagai Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara penerimaan suap dari Teuku Syaifuddin, S.H. sebagai kuasa hukum Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si. untuk membantu meringankan putusan atau membebaskan perkara Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si. terkait pengadaan helikopter Mi-2 merek PLC Rostov Mil Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2001/2002.

29 September 2005 - 4 Januari 2006

asli, kopi, salinan

1 sampul

**Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
Pelabuhan Umum di Dusun Uf, Desa Danar, Kecamatan Pulau Kei Kecil
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2001-2003**

Drs. Moch. Harun Let Let dan Capt. Tarcisius Walla

20. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/02/XII/2004/KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Drs. Moch Harun Let Let alias Drs. Harun M. Nur L. sebagai Kepala Bagian Keuangan/Atasan Langsung Bendaharawan Rutin Penerima dan Pengguna Daftar Isian Kegiatan (DIK) Suplement Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Capt. Tarcisius Walla alias Capt. T. Walla sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI dalam perkara pengadaan tanah untuk pembangunan pelabuhan umum di Dusun Uf, Desa Danar Kecamatan Pulau Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2001-2003.

9 Juni - 21 Desember 2004

kopi

1 jilid

21. Berkas penuntutan atas nama Drs. Moch Harun Let Let alias Drs. Harun M. Nur L. sebagai Kepala Bagian Keuangan/Atasan Langsung Bendaharawan Rutin Penerima dan Pengguna Daftar Isian Kegiatan (DIK) Suplement Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Capt. Tarcisius Walla alias Capt. T. Walla sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI dalam perkara pengadaan tanah untuk pembangunan pelabuhan umum di Dusun Uf, Desa Danar Kecamatan Pulau Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2001-2003.

13 Januari - 31 Maret 2005

asli, kopi

1 sampul

22. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas nama Drs. Moch Harun Let Let alias Drs. Harun M. Nur L. sebagai Kepala Bagian Keuangan/Atasan Langsung Bendaharawan Rutin Penerima dan Pengguna Daftar Isian Kegiatan (DIK) Suplement Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Capt. Tarcisius Walla alias Capt. T. Walla sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI dalam perkara pengadaan tanah untuk pembangunan pelabuhan umum di Dusun Uf, Desa Danar Kecamatan Pulau Pulau Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2001-2003.

7 April - 16 November 2005

kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kotak Suara pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004

Dr. Ir. Susongko Suhardjo, Msc.

23. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/03/V/2005/KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Dr. Ir. Susongko Suhardjo, Msc. sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perkara pengadaan kotak suara KPU pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.

26 Agustus 2004 - 11 Mei 2005

asli, kopi

1 jilid

24. Surat tuntutan atas nama Dr. Ir. Susongko Suhardjo, M.Sc. sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perkara pengadaan kotak suara KPU pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.

22 Agustus 2005

kopi

1 sampul

25. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Dr. Ir. Susongko Suhardjo, M.Sc. sebagai Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dalam perkara pengadaan kotak suara pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.

1 Juli - 12 September 2005

asli, kopi, salinan

1 sampul

Drs. Mulyana Wira Kusumah

26. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/02/V/2005/KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Drs. Mulyana Wira Kusumah sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan Kotak Suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perkara pengadaan kotak suara KPU pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.

8 Maret - Mei 2005

asli, kopi

1 jilid

27. Berkas penuntutan atas nama Drs. Mulyana Wira Kusumah sebagai sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan Kotak Suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perkara pengadaan kotak suara KPU pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.

22 Juni 2005 - 27 Juli 2006

kopi

1 sampul

28. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Drs. Mulyana Wira Kusumah sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan Kotak Suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perkara pengadaan kotak suara KPU pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.

22 Agustus 2005 - 13 Desember 2006

kopi, salinan

1 sampul

Drs. Mulyana Wira Kusumah dan Drs. Richard Manusun Purba, M.M.

29. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/11/VI/2006/KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Drs. Mulyana Wira Kusumah sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Ketua Panitia Pengadaan Kotak Suara dan Drs. Richard Manusun Purba, M.M. sebagai Kepala Biro Logistik dan Distribusi KPU dalam perkara pengadaan kotak suara pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.

2 Januari - 15 Juni 2006

asli

1 jilid

30. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/11/VI/2006/KPK berisi lampiran barang bukti jilid II atas nama Drs. Mulyana Wira Kusumah sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Ketua Panitia Pengadaan Kotak Suara dan Drs. Richard Manusun Purba, M.M. sebagai Kepala Biro Logistik dan Distribusi KPU dalam perkara pengadaan kotak suara pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.

2 Januari - 15 Juni 2006

kopi

1 jilid

31. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/11/VI/2006/KPK berisi lampiran barang bukti jilid III atas nama Drs. Mulyana Wira Kusumah sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Ketua Panitia Pengadaan Kotak Suara dan Drs. Richard Manusun Purba, MM. sebagai Kepala Biro Logistik dan Distribusi KPU dalam perkara pengadaan kotak suara pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.

2 Januari - 15 Juni 2006

kopi

2 jilid

32. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/11/VI/2006/KPK berisi lampiran barang bukti atas nama Drs. Mulyana Wira Kusumah sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Ketua Panitia Pengadaan Kotak Suara dan Drs. Richard Manusun Purba, M.M. sebagai Kepala Biro Logistik dan Distribusi KPU dalam perkara pengadaan kotak suara terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004.

2 Januari - 15 Juni 2006

kopi

1 jilid

33. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/11/VII/2006/KPK berisi lampiran barang bukti atas nama Drs. Mulyana Wira Kusumah sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Ketua Panitia Pengadaan Kotak Suara dan Drs. Richard Manusun Purba, M.M. sebagai Kepala Biro Logistik dan Distribusi KPU dalam perkara pengadaan kotak suara terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004.

2 Januari - 15 Juni 2006

kopi

1 jilid

34. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/11/VII/2006/KPK berisi lampiran barang bukti atas nama Drs. Mulyana Wira Kusumah sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Ketua Panitia Pengadaan Kotak Suara dan Drs. Richard Manusun Purba, M.M. sebagai Kepala Biro Logistik dan Distribusi KPU dalam perkara pengadaan kotak suara pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.

2 Januari - 15 Juni 2006

kopi

1 jilid

35. Berkas penuntutan atas nama Drs. Mulyana Wira Kusumah sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Ketua Panitia Pengadaan Kotak Suara Pemilu 2004 dan Drs. Richard Manusun Purba, M.M. sebagai Kepala Biro Logistik dan Distribusi KPU/Sekretaris Panitia Pengadaan Kotak Suara Pemilu 2004 dalam perkara pengadaan kotak suara pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.

27 Juli 2006 - 23 Agustus 2006

asli

1 sampul

36. Nota Pembelaan (Pleidoi) pada proses persidangan Pengadilan Negeri atas nama Drs. Richard Manusun Purba, M.M. sebagai Kepala Biro Logistik dan Distribusi KPU/Sekretaris Panitia Pengadaan Kotak Suara Pemilu 2004 dalam perkara pengadaan kotak suara di KPU pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.

6 Desember 2006

asli

1 sampul

Ir. Sihol P. Manullang

37. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/18/XI/2006/KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Ir. Sihol P. Manullang sebagai Direktur Utama PT Survindo Indah Prestasi dalam perkara pengadaan kotak suara pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.

2 Januari - 9 November 2006

kopi

1 jilid

38. Berkas penuntutan atas nama Ir. Sihol P. Manullang sebagai Direktur Utama PT Survindo Indah Prestasi dalam perkara pengadaan kotak suara pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.

18 Desember 2006 - 13 April 2007

asli, konsep

1 sampul

39. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Ir. Sihol P. Manullang sebagai Direktur Utama PT Survindo Indah Prestasi dalam perkara pengadaan kotak suara pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.

27 April - 11 Mei 2007

kopi, salinan

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Pemberian Suap terkait Anggaran Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004

Mochammad Dentjik

40. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/14/X/2005/KPK berisi laporan kejadian korupsi, Surat Perintah Penggeledahan, Berita Acara Pemeriksaan, dll atas nama Mochamad Dentjik sebagai Wakil Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perkara pemberian suap kepada Raden Soedji Darmono sebagai Pelaksana Tugas Direktur Pembinaan Anggaran II dan Ishak Harahap sebagai Kepala Sub Direktorat Pembinaan Anggaran II E Direktorat Jenderal Keuangan Departemen Keuangan RI terkait revisi anggaran Komisi Pemilihan Umum Tahun 2004.

14 Oktober 2004 - 27 September 2005

kopi

1 jilid

41. Berkas penuntutan atas nama Mochamad Dentjik sebagai Wakil Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perkara pemberian suap kepada Raden Soedji Darmono sebagai Pelaksana Tugas Direktur Pembinaan Anggaran II dan Ishak Harahap sebagai Kepala Sub Direktorat Pembinaan Anggaran II E Direktorat Jenderal Keuangan Departemen Keuangan RI terkait revisi anggaran Komisi Pemilihan Umum Tahun 2004.

14 November 2005 - 19 Januari 2006

asli

1 sampul

42. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 15/PID.B/TPK/2005/PN.JKT PST atas nama Mochamad Dentjik sebagai Wakil Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perkara pemberian suap kepada Raden Soedji Darmono sebagai Pelaksana Tugas Direktur Pembinaan Anggaran II dan Ishak Harahap sebagai Kepala Sub Direktorat Pembinaan Anggaran II E Direktorat Jenderal Keuangan Departemen Keuangan RI terkait revisi anggaran Komisi Pemilihan Umum Tahun 2004.

2 Februari 2006

kopi

1 sampul

Raden Soedji Darmono, S.H. dan Ishak Harahap

43. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/08/VIII/2005/KPK berisi laporan kejadian korupsi, Surat Perintah Penggeledahan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Raden Soedji Darmono, S.H. sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan XI dan Ishak Harahap sebagai Kepala Sub Direktorat Anggaran II E Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI dalam perkara penerimaan suap dari Hamdani Amin dan Mochamad Djentik terkait pembahasan dan evaluasi usulan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.

26 April - 12 Agustus 2005

kopi

1 jilid

44. Berkas penyidikan atas nama Raden Soedji Darmono, S.H. sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan XI dan Ishak Harahap sebagai Kepala Sub Direktorat Anggaran II E Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI dalam perkara penerimaan suap dari Hamdani Amin dan Mochamad Djentik terkait pembahasan dan evaluasi usulan anggaran Komisi Pemilihan Umum yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.

16 Agustus - 29 September 2005

asli

1 sampul

45. Berkas penuntutan atas nama Raden Soedji Darmono, S.H. sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan XI dan Ishak Harahap sebagai Kepala Sub Direktorat Anggaran II E Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI dalam perkara penerimaan suap dari Hamdani Amin dan Mochamad Djentik terkait pembahasan dan evaluasi usulan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.

1 September - 20 Oktober 2005

asli

1 sampul

46. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas nama Raden Soedji Darmono, S.H. sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan XI dan Ishak Harahap sebagai Kepala Sub Direktorat Anggaran II E Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI dalam perkara penerimaan suap dari Hamdani Amin dan Mochamad Djentik terkait pembahasan dan evaluasi usulan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.

24 Oktober 2005 - 16 Agustus 2006

kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Asuransi Petugas Komisi Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum 2004

Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin

47. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/05/VI/2005/KPK berisi laporan kejadian korupsi, Surat Perintah Penggeledahan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perkara pengadaan asuransi petugas KPU dan logistik terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.

26 April - 15 Juli 2005

kopi

1 jilid

48. Surat dakwaan atas nama Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perkara pengadaan asuransi petugas KPU dan logistik terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.

1 Agustus 2005

konsep

1 sampul

49. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas nama Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perkara pengadaan asuransi petugas KPU dan logistik terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.

25 November 2005 - 16 Agustus 2006

kopi, salinan

1 sampul

50. Surat dari Tim Penasehat Hukum Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin kepada Ketua Mahkamah Agung RI mengenai permohonan peninjauan kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 995/K/Pid/2006 atas nama Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perkara pengadaan asuransi petugas KPU dan logistik terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.

3 Januari 2007

kopi

1 sampul

Hamdani Amin

51. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/04/VI/2005/KPK atas nama Hamdani Amin sebagai Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perkara pengadaan asuransi petugas KPU dan logistik terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.

26 April - 29 Juni 2005

kopi, konsep

1 jilid

52. Berkas penuntutan atas nama Hamdani Amin sebagai Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perkara pengadaan asuransi petugas KPU dan logistik terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.

15 Juli - 2 Agustus 2005

kopi

1 sampul

53. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas nama Hamdani Amin sebagai Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perkara pengadaan asuransi petugas KPU dan logistik terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.

21 Desember 2005 - 16 Agustus 2006

asli, kopi

1 sampul

54. Berkas permohonan peninjauan kembali atas nama Hamdani Amin sebagai Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perkara pengadaan asuransi petugas KPU dan logistik terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.

1 Desember 2005 - 8 Desember 2006

kopi

2 jilid

**Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pencetakan Buku Panduan KPPS,
Buku Keputusan dan Barang Cetakan Lainnya pada Pelaksanaan
Pemilihan Umum Tahun 2004**

Drs. R. Bambang Budiarto, M.Si. dan Safder Yussac, S.Sos., M.Si.

55. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/12/IX/2005/KPK berisi laporan kejadian korupsi, Surat Perintah Penggeledahan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Drs. R. Bambang Budiarto, M.Si. sebagai Kepala Biro Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Ketua Panitia Pengadaan dan H. Safder Yussac, S.Sos., M.Si. sebagai Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perkara pengadaan pencetakan buku panduan KPPS, buku keputusan dan barang cetakan lainnya di KPU Tahun 2004.

6 Juni - 19 September 2005

kopi

1 jilid

56. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/12/IX/2005/P.KPK berisi lampiran atas nama Drs. R. Bambang Budiarto, M.Si. sebagai Kepala Biro Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Ketua Panitia Pengadaan dan H. Safder Yussac, S.Sos., M.Si. sebagai Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perkara pengadaan pencetakan buku panduan KPPS, buku keputusan dan barang cetakan lainnya di KPU Tahun 2004.

6 Juni - 19 September 2005

kopi

1 jilid

57. Berkas penuntutan atas nama Drs. R. Bambang Budiarto, M.Si. sebagai Kepala Biro Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Ketua Panitia Pengadaan dan H. Safder Yussac, S.Sos., M.Si. sebagai Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perkara pengadaan pencetakan buku panduan KPPS, buku keputusan dan barang cetakan lainnya di KPU Tahun 2004.

11 Oktober 2005 - 20 Februari 2006

asli, kopi

1 sampul

58. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas nama Drs. R. Bambang Budiarto, M.Si. sebagai Kepala Biro Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Ketua Panitia Pengadaan dan H. Safder Yussac, S.Sos., M.Si. sebagai Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perkara pengadaan pencetakan buku panduan KPPS, buku keputusan dan barang cetakan lainnya di KPU Tahun 2004.

3 Maret - 25 Agustus 2006

asli, salinan, kopi

1 sampul

59. Berkas peninjauan kembali atas nama Drs. R. Bambang Budiarto, M.Si. sebagai Kepala Biro Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Ketua Panitia Pengadaan dan H. Safder Yussac, S.Sos., M.Si. sebagai Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perkara pengadaan pencetakan buku panduan KPPS, buku keputusan dan barang cetakan lainnya di KPU Tahun 2004.

4 Juli 2007 - 28 April 2008

asli, kopi

1 sampul

Faebudodo Tjahja Kelana Harefa

60. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/17/XII/2005/KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Faebudodo Tjahja Kelana Harefa alias FTK Harefa alias Tjetjep Harefa sebagai Direktur Utama PT Mulia Agung Utama dalam perkara pencetakan buku panduan KPPS, buku keputusan dan barang cetakan lainnya di KPU Tahun 2004.

6 Juni - 22 Desember 2005

kopi

1 jilid

61. Berkas penuntutan atas nama Faebudodo Tjahja Kelana Harefa alias FTK Harefa alias Tjetjep Harefa sebagai Direktur Utama PT Mulia Agung Utama dalam perkara pencetakan buku panduan KPPS, buku keputusan dan barang cetakan lainnya di KPU Tahun 2004.

11 Januari - 18 Mei 2006

asli

1 sampul

62. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas nama Faebudodo Tjahja Kelana Harefa alias FTK Harefa alias Tjetjep Harefa sebagai Direktur Utama PT Mulia Agung Utama dalam perkara pencetakan buku panduan KPPS, buku keputusan dan barang cetakan lainnya di KPU Tahun 2004.

30 Mei 2006 - 7 Februari 2007

kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tinta Sidik Jari pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004

Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H.

63. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/09/IX/2005/KPK atas nama Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H. sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari dalam perkara pengadaan tinta sidik jari pada pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004.

8 Juli - 13 September 2005

asli, kopi

2 jilid

64. Berkas penuntutan atas nama Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H. sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum/Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari dalam perkara pengadaan tinta sidik jari pada pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004.

29 September 2005 - 2 Februari 2006

asli

1 sampul

65. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas nama Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H. sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum/Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari dalam perkara pengadaan tinta sidik jari pada pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004.

17 Februari - 13 Oktober 2006

asli, kopi

1 sampul

Achmad Rojadi, S.Sos.

66. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/16/XI/2005/KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Achmad Rojadi, S.Sos. sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perkara pengadaan tinta sidik jari pada pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2004.

8 Juli - 17 November 2005

kopi

2 jilid

67. Berkas penuntutan atas nama Achmad Rojadi, S.Sos. sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perkara pengadaan tinta sidik jari pada pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2004.

28 Desember 2005 - 18 April 2006

asli

1 sampul

68. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas nama Achmad Rojadi, S.Sos. sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perkara pengadaan tinta sidik jari pada pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2004.

25 April 2006 - 21 Februari 2007

asli, kopi

1 sampul

**Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Segel Surat Suara Pemilihan Umum
dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum 2004**

Drs. Daan Dimara, M.A.

69. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/06/IV/2006/KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Drs. Daan Dimara, M.A. sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Ketua Panitia Pengadaan Segel Surat Suara Pemilihan Umum dalam perkara pengadaan segel sampul surat suara Pemilihan Umum legislatif, presiden dan wakil presiden Tahun 2004.

2 Januari - 12 April 2006

kopi

1 jilid

70. Berkas penuntutan tindak pidana korupsi atas nama Drs. Daan Dimara, M.A. sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Ketua Panitia Pengadaan Segel Surat Suara Pemilihan Umum dalam perkara pengadaan segel sampul surat suara Pemilihan Umum legislatif, presiden dan wakil presiden Tahun 2004.

28 April - 30 Agustus 2006

asli, kopi

1 sampul

71. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas nama Drs. Daan Dimara, M.A. sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Ketua Panitia Pengadaan Segel Surat Suara Pemilu dalam perkara pengadaan segel sampul surat suara Pemilihan Umum legislatif, presiden dan wakil presiden Tahun 2004.

5 September 2006 - 10 Januari 2007

asli, kopi, salinan

1 sampul

Untung Sastrawijaya

72. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/07/IV/2006/KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Untung Sastrawijaya sebagai Direktur Utama PT Royal Standard dalam perkara pengadaan segel sampul surat suara Pemilihan Umum legislatif, presiden dan wakil presiden Tahun 2004.

2 Januari - 12 April 2006

asli

1 jilid

73. Berkas penuntutan atas nama Untung Sastrawijaya sebagai Direktur Utama PT Royal Standard dalam perkara pengadaan segel sampul surat suara Pemilihan Umum legislatif, presiden dan wakil presiden Tahun 2004.

28 April - 29 Agustus 2006

asli

1 sampul

74. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Mahkamah Agung atas nama Untung Sastrawijaya sebagai Direktur Utama PT Royal Standard dalam perkara pengadaan segel sampul surat suara Pemilihan Umum legislatif, presiden dan wakil presiden Tahun 2004.

15 September 2006 - 21 Maret 2007

asli, kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pemancar, Peralatan Server, Jaringan Audio dan Teks, Spare Part Pemancar, dll. untuk Mendukung Siaran Hasil Pemilihan Umum pada Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia Tahun 2004

Drs. Suratno, M.M.

75. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/10/IX/2005/KPK berisi laporan kejadian korupsi, Berita Acara Pemeriksaan, Surat Perintah Penyidikan, dll. atas nama Drs. Suratno, M.M. sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia (RRI) dalam perkara pengadaan pemancar, peralatan server, jaringan audio dan teks, *spare part* pemancar, dll. untuk mendukung siaran hasil Pemilu Tahun 2004 dengan menggunakan dana Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Perusahaan Jawatan RRI Tahun Anggaran 2003.

18 Maret - 14 September 2005

asli, kopi

1 jilid

76. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/10/IX/2005/KPK berisi lampiran barang bukti atas nama Drs. Suratno, M.M. sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia (RRI) dalam perkara pengadaan pemancar, peralatan server, jaringan audio dan teks, *spare part* pemancar, dll. untuk mendukung siaran hasil Pemilu Tahun 2004 dengan menggunakan dana Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Perusahaan Jawatan RRI Tahun Anggaran 2003.

18 Maret - 14 September 2005

kopi

1 jilid

77. Berkas penuntutan atas nama Drs. Suratno, M.M. sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia (RRI) dalam perkara pengadaan pemancar, peralatan server, jaringan audio dan teks, *spare part* pemancar, dll. untuk mendukung siaran hasil Pemilu Tahun 2004 dengan menggunakan dana Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Perusahaan Jawatan RRI Tahun Anggaran 2003.

10 Oktober 2005 - 15 Februari 2006

asli, kopi

1 sampul

78. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi atas nama Drs. Suratno, M.M. sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia (RRI) dalam perkara pengadaan pemancar, peralatan server, jaringan audio dan teks, *spare part* pemancar, dll. untuk mendukung siaran hasil Pemilu Tahun 2004 dengan menggunakan dana Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Perusahaan Jawatan RRI Tahun Anggaran 2003.

22 Februari - 12 Juni 2006

kopi

1 sampul, 4 jilid

H. Fahrani Suhaimi

79. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/11/IX/2005/P.KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama H. Fahrani Suhaimi sebagai Direktur CV Budi Jaya dalam perkara pengadaan pemancar, peralatan server, jaringan audio dan teks, *spare part* pemancar, dll. untuk mendukung siaran hasil Pemilu Tahun 2004 dengan menggunakan dana Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Perusahaan Jawatan RRI Tahun Anggaran 2003.

18 Maret - 21 September 2005

asli, kopi

1 jilid

80. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/11/IX/2005/KPK berisi lampiran barang bukti atas nama H. Fahrani Suhaimi sebagai Direktur CV Budi Jaya dalam perkara pengadaan pemancar, peralatan server, jaringan audio dan teks, *spare part* pemancar, dll. untuk mendukung siaran hasil Pemilu Tahun 2004 dengan menggunakan dana Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Perusahaan Jawatan RRI Tahun Anggaran 2003.

21 Maret - 18 September 2005

kopi

1 jilid

81. Berkas penuntutan atas nama H. Fahrani Suhaimi sebagai Direktur CV Budi Jaya dalam perkara pengadaan pemancar, peralatan server, jaringan audio dan teks, *spare part* pemancar, dll. untuk mendukung siaran hasil Pemilu Tahun 2004 dengan menggunakan dana Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Perusahaan Jawatan RRI Tahun Anggaran 2003.

10 November 2005 - 1 Maret 2006

asli, kopi

1 sampul

82. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas nama H. Fahrani Suhaimi sebagai Direktur CV Budi Jaya dalam perkara pengadaan pemancar, peralatan server, jaringan audio dan teks, *spare part* pemancar, dll. untuk mendukung siaran hasil Pemilu Tahun 2004 dengan menggunakan dana Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Perusahaan Jawatan RRI Tahun Anggaran 2003.

8 Maret - 29 Agustus 2006

asli, kopi

1 sampul

83. Berkas permohonan peninjauan kembali atas nama H. Fahrani Suhaimi sebagai Direktur CV Budi Jaya dalam perkara pengadaan pemancar, peralatan server, jaringan audio dan teks, *spare part* pemancar, dll. untuk mendukung siaran hasil Pemilu Tahun 2004 dengan menggunakan dana Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Perusahaan Jawatan RRI Tahun Anggaran 2003.

2 Agustus - 24 September 2007

kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Penjualan Aset PT Industri Sandang Nusantara

Drs. Kuntjoro Hendrartono, M.B.A.

84. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/13/X/2005/KPK berisi laporan kejadian korupsi, Surat Perintah Penggeledahan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono, M.B.A sebagai Direktur Utama PT Industri Sandang Nusantara dalam perkara penjualan aset berupa tanah dan bangunan milik PT Industri Sandang Nusantara dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

6 Juni - 6 Oktober 2005

asli

1 jilid

85. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/13/X/2005/KPK berisi lampiran barang bukti atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono, M.B.A. sebagai Direktur Utama PT Industri Sandang Nusantara dalam perkara penjualan aset berupa tanah dan bangunan milik PT Industri Sandang Nusantara dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

6 Juni - 6 Oktober 2005

kopi

1 jilid

86. Berkas penuntutan atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono, M.B.A. sebagai Direktur Utama PT Industri Sandang Nusantara dalam perkara penjualan aset berupa tanah dan bangunan milik PT Industri Sandang Nusantara dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

24 Oktober 2005 - 28 Februari 2006

asli, kopi

1 sampul

87. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono, M.B.A. sebagai Direktur Utama PT Industri Sandang Nusantara dalam perkara penjualan aset berupa tanah dan bangunan milik PT Industri Sandang Nusantara dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

8 Maret - 21 Desember 2006

asli, kopi

1 sampul

Lim Kian Yin

88. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/15/XII/2005/KPK berisi laporan kejadian korupsi, Surat Perintah Penyitaan, dll. atas nama Lim Kian Yin alias Yinyin sebagai Direktur Utama PT Yans Manunggal Jaya dalam perkara penjualan aset berupa tanah dan bangunan milik PT Industri Sandang Nusantara dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

15 Juni - 13 Desember 2005

kopi

1 jilid

89. Daftar-daftar barang bukti atas nama Lim Kian Yin alias Yin Yin sebagai wiraswasta dalam perkara penjualan aset berupa tanah dan bangunan milik PT Industri Sandang Nusantara dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

TT
kopi
1 sampul

90. Berkas penuntutan atas nama Lim Kian Yin alias Yin Yin sebagai wiraswasta dalam perkara penjualan aset berupa tanah dan bangunan milik PT Industri Sandang Nusantara dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

2 Januari - 16 Mei 2006
asli, kopi
3 jilid

91. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas nama Lim Kian Yin (Yin Yin) sebagai wiraswasta dalam perkara penjualan aset berupa tanah dan bangunan milik PT Industri Sandang Nusantara dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

19 Mei - 5 Desember 2006
asli, kopi
1 sampul

Suparman, S.H.

92. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/08/V/2006/KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Suparman, S.H. sebagai Penyidik KPK/Anggota Kepolisian RI dalam perkara pemerasan kepada Tintin Surtini terkait kasus penjualan aset berupa tanah dan bangunan milik PT Industri Sandang Nusantara dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

11 Maret - 8 Mei 2006

asli, kopi

1 jilid

93. Berkas penyelidikan atas nama Suparman, S.H. sebagai Penyidik KPK/Anggota Kepolisian RI dalam perkara pemerasan kepada Tintin Surtini terkait kasus penjualan aset berupa tanah dan bangunan milik PT Industri Sandang Nusantara dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Nb. Akses Tertutup

6 -10 Maret 2006

asli

1 sampul

94. Berkas penuntutan atas nama Suparman, S.H. sebagai Penyidik KPK/Anggota Kepolisian RI dalam perkara pemerasan kepada Tintin Surtini terkait kasus penjualan aset berupa tanah dan bangunan milik PT Industri Sandang Nusantara dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

19 Mei - 9 Agustus 2006

asli

1 sampul

95. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Mahkamah Agung atas nama Suparman, S.H. sebagai Penyidik KPK/Anggota Kepolisian RI dalam perkara pemerasan kepada Tintin Surtini terkait kasus penjualan aset berupa tanah dan bangunan milik PT Industri Sandang Nusantara dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

6 September 2006 - 23 Februari 2007

kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Pemberian Suap kepada Hakim dalam Perkara Hukum Probosutedjo

R. A. Harini Wijoso, S.H.

96. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/01/I/2006/KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama R. A. Harini Wijoso, S.H. sebagai Kuasa Hukum Probosutedjo dalam perkara pemberian suap kepada Pono Waluyo sebagai mantan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta/Advokat dan Konsultan Hukum terkait kasus persidangan tingkat kasasi yang melibatkan Probosutedjo dan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan.

29 September 2005 - 24 Januari 2006

kopi

1 jilid

97. Surat tuntutan tindak pidana korupsi dari Penuntutan Umum Komisi Pemberantasan Korupsi kepada hakim Pengadilan Negeri atas nama R. A. Harini Wijoso, S.H. sebagai Kuasa Hukum Probosutedjo dalam perkara pemberian suap kepada Pono Waluyo sebagai mantan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta/Advokat dan Konsultan Hukum terkait kasus persidangan tingkat kasasi yang melibatkan Probosutedjo dan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan.

21 Juni 2006

asli

1 jilid

98. Berkas persidangan atas nama R. A. Harini Wijoso, S.H. sebagai Kuasa Hukum Probosutedjo dalam perkara pemberian suap kepada Pono Waluyo sebagai mantan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta/Advokat dan Konsultan Hukum terkait kasus persidangan tingkat kasasi yang melibatkan Probosutedjo dan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan.

27 Juni - 19 Juli 2006

asli

1 sampul

Pono Waluyo

99. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/02/I/2006/KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Pono Waluyo sebagai Staf Perjalanan Dinas dan Angkutan Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dalam perkara penerimaan suap dari R. A. Harini Wijoso, S.H. terkait kasus persidangan tingkat kasasi yang melibatkan Probosutedjo dan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan.

16 Januari 2005 - 24 Januari 2006

kopi

1 jilid

100. Berkas penuntutan atas nama Pono Waluyo sebagai Staf Perjalanan Dinas dan Angkutan Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dalam perkara penerimaan suap dari R. A. Harini Wijoso, S.H. terkait kasus persidangan tingkat kasasi yang melibatkan Probosutedjo dan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan.

9 Februari - 21 Juni 2006

asli

1 sampul

101. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 13/PID/TPK/2006/PT. DKI atas nama Pono Waluyo sebagai Staf Perjalanan Dinas dan Angkutan Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dalam perkara penerimaan suap dari R. A. Harini Wijoso, S.H. terkait kasus persidangan tingkat kasasi yang melibatkan Probosutedjo dan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan.

25 Agustus 2006

kopi

1 sampul

H. Suhartoyo, S.H. dan Sudi Achmad, S.H.

102. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/03/I/2006/KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama H. Suhartoyo, S.H. sebagai Wakil Sekretariat KORPRI Mahkamah Agung RI dan Sudi Achmad, S.H. sebagai Staf Sekretariat KORPRI Mahkamah Agung RI dalam perkara penerimaan suap dari R. A. Harini Wijoso, S.H. melalui Pono Waluyo terkait kasus persidangan tingkat kasasi yang melibatkan Probosutedjo dan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan.

29 September 2005 - 24 Januari 2006

kopi

1 jilid

103. Berkas penuntutan atas nama H. Suhartoyo, S.H. sebagai Wakil Sekretariat KORPRI Mahkamah Agung RI dan Sudi Achmad, S.H. sebagai Staf Sekretariat KORPRI Mahkamah Agung RI dalam perkara penerimaan suap dari R. A. Harini Wijoso, S.H. melalui Pono Waluyo terkait kasus persidangan tingkat kasasi yang melibatkan Probosutedjo dan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan.

9 Februari - 31 Mei 2006

asli

1 sampul

104. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas nama H. Suhartoyo, S.H. sebagai Wakil Sekretariat KORPRI Mahkamah Agung RI dan Sudi Achmad, S.H. sebagai Staf Sekretariat KORPRI Mahkamah Agung RI dalam perkara penerimaan suap dari R. A. Harini Wijoso, S.H. melalui Pono Waluyo terkait kasus persidangan tingkat kasasi yang melibatkan Probosutedjo dan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan.

7 Juni 2006 - 2 Januari 2007

asli, kopi

1 sampul

Malem Pagi Sinuhaji dan Sriyadi, S.H.

105. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/03/I/2006/KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Malem Pagi Sinuhaji sebagai Kepala Bagian Umum Kepegawaian Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI dan Sriyadi, S.H. sebagai Staf Tata Usaha Direktorat Perdata Mahkamah Agung RI dalam perkara penerimaan suap dari R. A. Harini Wijoso, S.H. melalui Pono Waluyo terkait kasus persidangan tingkat kasasi yang melibatkan Probosutedjo dan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan.

29 September 2005 - 24 Januari 2006

kopi

1 jilid

106. Berkas penuntutan atas nama Malem Pagi Sinuhaji sebagai Kepala Bagian Umum Kepegawaian Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI dan Sriyadi, SH. sebagai Staf Tata Usaha Direktorat Perdata Mahkamah Agung RI dalam perkara penerimaan suap dari R. A. Harini Wijosi melalui Pono Waluyo terkait kasus persidangan tingkat kasasi yang melibatkan Probosutedjo dan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan.

9 Februari - 24 Mei 2006

asli, kopi

1 sampul

107. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas nama Malem Pagi Sinuhaji sebagai Kepala Bagian Umum Kepegawaian Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI dan Sriyadi, S.H. sebagai Staf Tata Usaha Direktorat Perdata Mahkamah Agung RI dalam perkara penerimaan suap dari R. A. Harini Wijosi melalui Pono Waluyo terkait kasus persidangan tingkat kasasi yang melibatkan Probosutedjo dan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan.

13 Juni - 12 November 2006

asli, kopi

1 sampul

108. Berkas eksekusi atas nama Sriyadi, S.H. sebagai Staf Tata Usaha Direktorat Perdata Mahkamah Agung RI dalam perkara penerimaan suap dari R. A. Harini Wijosi melalui Pono Waluyo terkait kasus persidangan tingkat kasasi yang melibatkan Probosutedjo dan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan.

30 Agustus - 19 September 2007

asli, kopi

6 lembar

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Proyek Kegiatan Tahun Investasi Indonesia (TII) atau Indonesia Investment Year (IYY)

Theodorus Fransisco Toemion

109. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/05/III/2006/KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Theo F. Toemion alias Theodorus Fransisco Toemion sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam perkara pelaksanaan Indonesia Investment Year Tahun 2003 dan 2004 yang diselenggarakan oleh BKPM.

27 Desember 2005 - 22 Maret 2006

asli, kopi

1 jilid

110. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/05/III/2006/KPK berisi Berita Acara Pemeriksaan dan lampiran barang bukti atas nama Theo F. Toemion alias Theodorus Fransisco Toemion sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam perkara pelaksanaan Indonesia Investment Year Tahun 2003 dan 2004 yang diselenggarakan oleh BKPM.

27 Desember 2005 - 22 Maret 2006

kopi

2 jilid

111. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/05/III/2006/KPK berisi lampiran barang bukti atas nama Theo F. Toemion alias Theodorus Fransisco Toemion sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam perkara pelaksanaan Indonesia Investment Year Tahun 2003 dan 2004 yang diselenggarakan oleh BKPM.

27 Desember 2005 - 22 Maret 2006

kopi

1 jilid

112. Berkas penuntutan tindak pidana korupsi atas nama Theodorus Fransisco Toemion alias Theo F. Toemion sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam perkara pelaksanaan Indonesia Investment Year Tahun 2003 dan 2004 yang diselenggarakan oleh BKPM.

6 April - 24 Juli 2006

asli

4 jilid

113. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas nama Theodorus Fransisco Toemion alias Theo F. Toemion sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam perkara pelaksanaan Indonesia Investment Year Tahun 2003 dan 2004 yang diselenggarakan oleh BKPM.

1 Agustus 2006 - 28 Februari 2007

asli, kopi

1 sampul

114. Berkas eksekusi dan penyitaan aset atas nama Theodorus Fransisco Toemion alias Theo F. Toemion sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam perkara pelaksanaan Indonesia Investment Year Tahun 2003 dan 2004 yang diselenggarakan oleh BKPM.

5 Maret - 28 April 2008

asli

3 lembar

Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait Pungutan Tarif Kepengurusan Dokumen Keimigrasian di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang, Malaysia

Drs. Muhammad Khusnul Yakin Payapo

115. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/09/V/2006/KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Drs. Muhammad Khusnul Yakin Payapo sebagai Kepala Subbagian Umum Humas Direktorat Jenderal Imigrasi/Mantan Kepala Subbidang Imigrasi Konsulat Jenderal RI di Penang, Malaysia dalam perkara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait pungutan tarif kepengurusan dokumen keimigrasian di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang, Malaysia Tahun 2003 - 2005.

23 Februari - 22 Mei 2006

kopi

1 jilid

116. Berkas penuntutan atas nama Drs. Muhammad Khusnul Yakin Payapo sebagai Kepala Subbagian Umum Humas Direktorat Jenderal Imigrasi/Mantan Kepala Subbidang Imigrasi Konsulat Jenderal RI Penang dalam perkara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait pungutan tarif kepengurusan dokumen keimigrasian di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang, Malaysia Tahun 2003 - 2005.

14 Juni - 13 September 2006

asli, konsep

1 sampul

117. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 11/PID.B/TPK/2006/PN.JKT.PST atas nama Drs. Muhammad Khusnul Yakin Payapo sebagai Kepala Subbagian Umum Humas Direktorat Jenderal Imigrasi/Mantan Kepala Subbidang Imigrasi Konsulat Jenderal RI Penang dalam perkara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait pungutan tarif kepengurusan dokumen keimigrasian di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang, Malaysia Tahun 2003 - 2005.

2 Oktober 2006

kopi

1 sampul

Erick Hikmat Setiawan

118. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/10/V/2006/KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Erick Hikmat Setiawan sebagai Konsulat Jenderal RI di Penang, Malaysia dalam perkara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait pungutan tarif kepengurusan dokumen keimigrasian di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang, Malaysia Tahun 2003 - 2005.

23 Februari - 22 Mei 2006

kopi

1 jilid

119. Berkas penuntutan atas nama Erick Hikmat Setiawan sebagai Konsulat Jenderal RI di Penang dalam perkara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait pungutan tarif kepengurusan dokumen keimigrasian di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang, Malaysia Tahun 2003 - 2005.

14 Juni - 10 Juli 2006

asli

1 sampul

120. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 12/PID.B/TPK/2006/PN.JKT.PST atas nama Erick Hikmat Setiawan sebagai Konsulat Jenderal RI di Penang dalam perkara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait pungutan tarif kepengurusan dokumen keimigrasian di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang, Malaysia Tahun 2003 - 2005.

29 September 2006

kopi

1 sampul

**Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bus untuk Proyek Sarana
Busway pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta**

Rustam Effendy Sidabutar, S.H.

121. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/15/IX/2006/KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Rustam Effendy Sidabutar, S.H., M.Si. sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam perkara pengadaan bus untuk proyek sarana *busway* pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2003-2004.

17 Maret - 6 September 2006

asli

1 jilid

122. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/15/IX/2006/KPK berisi lampiran barang bukti atas nama Rustam Effendy Sidabutar, S.H., M.Si. sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam perkara pengadaan bus untuk proyek sarana *busway* pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2003-2004.

17 Maret - 6 September 2006

kopi

1 jilid

123. Surat dakwaan nomor: 15/D.3.KPK/IX/2006 atas nama Rustam Effendy Sidabutar, S.H., M.Si sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam perkara pengadaan bus untuk proyek sarana *busway* pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2003-2004.

25 September 2006

Asli

1 sampul

124. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Rustam Effendy Sidabutar, S.H. M.Si sebagai sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam perkara pengadaan bus untuk proyek sarana *busway* pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2003-2004.

1 - 8 Februari 2007

asli, salinan

1 sampul

125. Berkas eksekusi atas nama Rustam Effendy Sidabutar, S.H., M.Si sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam perkara pengadaan bus untuk proyek sarana *busway* pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2003-2004.

13 April - 26 September 2007

asli, kopi

8 lembar

Ir. Sylvira Ananda, M.Sc.

126. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/23/XII/2006/KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Ir. Sylvira Ananda, M.Sc. sebagai Kepala Seksi Analisa, Evaluasi, dan Penyusunan Biaya/Tarif Sub Dinas Pengembangan Sistem Dinas Perhubungan DKI Jakarta/Ketua Panitia Pengadaan Bus Proyek *Busway* dalam perkara pengadaan bus untuk proyek sarana *busway* pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2003-2004.

17 Maret - 7 Desember 2006

kopi

1 jilid

127. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/23/XII/2006/KPK berisi lampiran barang bukti atas nama Ir. Sylvira Ananda, M.Sc. sebagai Kepala Seksi Analisa, Evaluasi, dan Penyusunan Biaya/Tarif Sub Dinas Pengembangan Sistem Dinas Perhubungan DKI Jakarta/Ketua Panitia Pengadaan Bus Proyek *Busway* dalam perkara pengadaan bus untuk proyek sarana *busway* pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2003-2004.

17 Maret - 7 Desember 2006

asli, kopi

1 jilid

128. Berkas penuntutan atas nama Ir. Sylvira Ananda, M.Sc. sebagai Kepala Seksi Analisa, Evaluasi, dan Penyusunan Biaya/Tarif Sub Dinas Pengembangan Sistem Dinas Perhubungan DKI Jakarta/Ketua Panitia Pengadaan Bus Proyek *Busway* dalam perkara pengadaan bus untuk proyek sarana *busway* pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2003-2004.

18 Desember 2006 - 5 April 2007

asli, kopi

1 sampul

129. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Ir. Sylvira Ananda, M.Sc. sebagai Kepala Seksi Analisa, Evaluasi, dan Penyusunan Biaya/Tarif Sub Dinas Pengembangan Sistem Dinas Perhubungan DKI Jakarta/Ketua Panitia Pengadaan Bus Proyek *Busway* dalam perkara pengadaan bus untuk proyek sarana *busway* pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2003-2004.

17 April - 1 Mei 2007

asli, kopi

1 sampul

Budhi Susanto

130. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/17/XI/2006/KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Budhi Susanto sebagai Direktur Utama PT Armada Usaha Bersama dalam perkara pengadaan bus untuk proyek sarana *busway* pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2003-2004.

17 Maret - 1 November 2006

kopi

1 jilid

131. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/17/XI/2006/KPK berisi Berita Acara Pemeriksaan dan lampiran barang bukti atas nama Budhi Susanto sebagai Direktur Utama PT Armada Usaha Bersama dalam perkara pengadaan bus untuk proyek sarana *busway* pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2003-2004.

6 Juni - 1 November 2006

kopi

2 jilid

132. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/17/XI/2006/KPK berisi berita acara lampiran barang bukti atas nama Budhi Susanto sebagai Direktur Utama PT Armada Usaha Bersama dalam perkara pengadaan bus untuk proyek sarana *busway* pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2003-2004.

6 Juni - 1 November 2006

kopi

1 jilid

133. Berkas penuntutan atas nama Budhi Susanto sebagai Direktur Utama PT Armada Usaha Bersama dalam perkara pengadaan bus untuk proyek sarana *busway* pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2003-2004.

22 November 2006 - 21 Maret 2007

asli, konsep

1 sampul

134. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas nama Budhi Susanto sebagai Direktur Utama PT Armada Usaha Bersama dalam perkara pengadaan bus untuk proyek sarana *busway* pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2003-2004.

4 April - 6 September 2007

asli, kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang Tidak Sesuai dengan Peraturan terkait Program Pembangunan Kelapa Sawit Sejuta Hektar di Provinsi Kalimantan Timur

H. Suwarna Abdul Fatah

135. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/16/X/2006/KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama H. Suwarna Abdul Fatah sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dalam perkara penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang tidak sesuai dengan peraturan terkait program pembangunan kelapa sawit sejuta hektar di Provinsi Kalimantan Timur tahun 1999 - 2002.

13 April - 30 Oktober 2006

asli, kopi

1 jilid

136. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/16/X/2006/KPK berisi Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi atas nama H. Suwarna Abdul Fatah sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dalam perkara penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang tidak sesuai dengan peraturan terkait program pembangunan kelapa sawit sejuta hektar di Provinsi Kalimantan Timur tahun 1999 - 2002.

7 September - 12 Oktober 2006

kopi

2 jilid

137. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/17/X/2006/KPK berisi Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan lampiran barang bukti atas nama H. Suwarna Abdul Fatah sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dalam perkara penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang tidak sesuai dengan peraturan terkait program pembangunan kelapa sawit sejuta hektar di Provinsi Kalimantan Timur tahun 1999 - 2002.

30 Mei - 12 Oktober 2006

kopi

1 jilid

138. Berkas penuntutan atas nama H. Suwarna Abdul Fatah sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dalam perkara penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang tidak sesuai dengan peraturan terkait program pembangunan kelapa sawit sejuta hektar di Provinsi Kalimantan Timur tahun 1999 - 2002.

20 Juli 2006 - 2 Maret 2007

asli, kopi

1 sampul

139. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi atas nama H. Suwarna Abdul Fatah sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dalam perkara penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang tidak sesuai dengan peraturan terkait program pembangunan kelapa sawit sejuta hektar di Provinsi Kalimantan Timur tahun 1999 - 2002.

6 Maret - 27 April 2007

asli, kopi, konsep

1 sampul

140. Berkas persidangan pada Pengadilan Mahkamah Agung atas nama H. Suwarna Abdul Fatah sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dalam perkara dalam perkara penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang tidak sesuai dengan peraturan terkait program pembangunan kelapa sawit sejuta hektar di Provinsi Kalimantan Timur tahun 1999 - 2002.

31 Juli - 7 Desember 2007

asli, kopi

1 sampul

Ir. Waskito Suryodibroto, M.M.

141. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/08/KPK/IV/2007 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll atas nama Ir. Waskito Suryodibroto, M.M. sebagai Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Departemen Kehutanan dan Perkebunan RI dalam perkara turut serta atau bersama-sama dengan Gubernur Kalimantan Timur melaksanakan penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang tidak sesuai dengan peraturan terkait program pembangunan perkebunan kelapa sawit sejuta hektar di Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2000 - 2002.

13 April 2006 - 24 April 2007

asli, kopi

1 jilid

142. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji sebagai ahli untuk tersangka atas nama Ir. Waskito Suryodibroto, M.M. sebagai Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Departemen Kehutanan dan Perkebunan RI dalam perkara turut serta atau bersama-sama dengan Gubernur Kalimantan Timur melaksanakan penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang tidak sesuai dengan peraturan terkait program pembangunan perkebunan kelapa sawit sejuta hektar di Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2000 - 2002.

12 Desember 2006

kopi

4 lembar

143. Berkas penuntutan atas nama Ir. Waskito Suryodibroto, M.M. sebagai Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Departemen Kehutanan dan Perkebunan RI dalam perkara turut serta atau bersama-sama dengan Gubernur Kalimantan Timur melaksanakan penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang tidak sesuai dengan peraturan terkait program pembangunan perkebunan kelapa sawit sejuta hektar di Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2000 - 2002.

11 Mei - 15 Agustus 2007

asli

1 sampul

144. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Ir. Waskito Suryodibroto, M.M. sebagai Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Departemen Kehutanan dan Perkebunan RI dalam perkara turut serta atau bersama-sama dengan Gubernur Kalimantan Timur melaksanakan penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang tidak sesuai dengan peraturan terkait program pembangunan perkebunan kelapa sawit sejuta hektar di Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2000 - 2002.

29 Agustus - 19 September 2007

asli, kopi

1 sampul

Ir. Uuh Aliyudin, M.M.

145. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-02/KPK/II/2007 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Ir. Uuh Aliyudin, M.M. sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam perkara bersama-sama dengan Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang tidak sesuai dengan peraturan terkait program pembangunan kelapa sawit sejuta hektar di Provinsi Kalimantan Timur tahun 1999 - 2002.

13 April 2006 - 2 Februari 2007

kopi

1 jilid

146. Berkas penyidikan atas nama Ir. H. Uuh Aliyudin, M.M. sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam perkara bersama-sama dengan Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang tidak sesuai dengan peraturan terkait program pembangunan kelapa sawit sejuta hektar di Provinsi Kalimantan Timur tahun 1999 - 2002.

10 November 2006 - 22 Januari 2007

kopi

1 sampul

147. Berkas penuntutan atas nama Ir. H. Uuh Aliyudin, M.M. sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam perkara bersama-sama dengan Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang tidak sesuai dengan peraturan terkait program pembangunan kelapa sawit sejuta hektar di Provinsi Kalimantan Timur tahun 1999 - 2002.

23 Februari - 25 Juni 2007

asli

1 sampul

148. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Ir. H. Uuh Aliyudin, M.M. sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam perkara bersama-sama dengan Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang tidak sesuai dengan peraturan terkait program pembangunan kelapa sawit sejuta hektar di Provinsi Kalimantan Timur tahun 1999 - 2002.

2 - 16 Juli 2007

asli, kopi, salinan

1 sampul

149. Berkas persidangan pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas nama Ir. H. Uuh Aliyudin, M.M. sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam perkara bersama-sama dengan Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang tidak sesuai dengan peraturan terkait program pembangunan kelapa sawit sejuta hektar di Provinsi Kalimantan Timur tahun 1999 - 2002.

17 September - 4 April 2008

asli, salinan

1 sampul

Dr. Ir. H. Robian, M.Si.

150. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-03/KPK/II/2007 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Dr. Ir. H. Robian, M.Si. sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur/Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam perkara bersama-sama dengan Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang tidak sesuai dengan peraturan dalam rangka program pembangunan kelapa sawit sejuta hektar di Provinsi Kalimantan Timur tahun 1999 - 2000.

13 April 2006 - 28 Februari 2007

kopi

1 jilid

151. Berkas penyidikan atas nama Dr. Ir. H. Robian, M.Si. sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur/Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam perkara bersama-sama dengan Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang tidak sesuai dengan peraturan dalam rangka program pembangunan kelapa sawit sejuta hektar di Provinsi Kalimantan Timur tahun 1999 - 2000.

6 Oktober 2006 - 22 Januari 2007

kopi

1 sampul

152. Berkas penuntutan atas nama Dr. Ir. H. Robian, M.Si. sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam perkara bersama-sama dengan Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang tidak sesuai dengan peraturan dalam rangka program pembangunan kelapa sawit sejuta hektar di Provinsi Kalimantan Timur tahun 1999 - 2000.

23 Februari - 25 Juni 2007

asli, kopi

1 sampul

153. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Dr. Ir. H. Robian, M.Si. sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur/Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam perkara bersama-sama dengan Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang tidak sesuai dengan peraturan dalam rangka program pembangunan kelapa sawit sejuta hektar di Provinsi Kalimantan Timur tahun 1999 - 2000.

2 - 16 Juli 2007

asli, konsep

1 sampul

154. Berkas persidangan pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas nama Dr. Ir. H. Robian, M.Si. sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur/Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam perkara bersama-sama dengan Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang tidak sesuai dengan peraturan dalam rangka program pembangunan kelapa sawit sejuta hektar di Provinsi Kalimantan Timur tahun 1999 - 2000.

28 Agustus 2007 - 4 April 2008

asli, salinan

1 sampul

Martias

155. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: 21/XI/2006/KPK atas nama Martias alias Pung Kian Hwa berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. sebagai Komisaris Utama PT Surya Dumai Industri dalam perkara turut serta membantu Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang tidak sesuai dengan peraturan dalam rangka program pembangunan kelapa sawit sejuta hektar tahun 1999 - 2002.

13 April - 29 November 2006

kopi

1 jilid

156. Berkas penuntutan atas nama Martias alias Pung Kian Hwa sebagai Komisaris Utama PT Surya Dumai Industri dalam perkara turut serta membantu Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang tidak sesuai dengan peraturan dalam rangka program pembangunan kelapa sawit sejuta hektar tahun 1999 - 2002.

12 Desember 2006 - 17 April 2007

asli, kopi

1 sampul

157. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi atas nama Martias alias Pung Kian Hwa sebagai Komisaris Utama PT Surya Dumai Industri dalam perkara turut serta membantu Gubernur Kalimantan Timur untuk menerbitkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang tidak sesuai dengan peraturan dalam rangka program pembangunan kelapa sawit sejuta hektar tahun 1999 - 2002.

24 April - 6 Agustus 2007

asli, salinan

1 sampul

158. Berkas persidangan pada Mahkamah Agung atas nama Martias alias Pung Kian Hwa sebagai Komisaris Utama PT Surya Dumai Industri dalam perkara turut serta membantu Gubernur Kalimantan Timur untuk menerbitkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang tidak sesuai dengan peraturan dalam rangka program pembangunan kelapa sawit sejuta hektar tahun 1999 - 2002.

31 Agustus - 11 Desember 2007

asli, kopi, konsep

1 sampul

159. Berkas eksekusi dan penyitaan aset atas nama Martias alias Pung Kian Hwa sebagai Komisaris Utama PT Surya Dumai Industri dalam perkara turut serta membantu Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang tidak sesuai dengan peraturan dalam rangka program pembangunan kelapa sawit sejuta hektar tahun 1999 - 2002.

17 Januari - 13 Maret 2008

asli, kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Peralatan Laboratorium Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (PRPPSE-KP) pada Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan RI

Drs. Dasirwan dan Drs. Jules F Patiasiana

160. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/13/VIII/2006/P.KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Drs. Dasirwan sebagai Pimpinan Proyek Inventarisasi dan Evaluasi Daya Dukung Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Drs. Jules F Patiasiana sebagai Ketua Panitia Pengadaan dalam perkara pengadaan peralatan laboratorium Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (PRPPSE-KP) pada Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan RI Tahun Anggaran 2003.

25 April - 12 Juli 2006

kopi

1 jilid

161. Berkas penuntutan atas nama Drs. Dasirwan sebagai Pimpinan Proyek Inventarisasi dan Evaluasi Daya Dukung Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Drs. Jules F Patiasiana sebagai Ketua Panitia Pengadaan dalam perkara pengadaan peralatan laboratorium Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (PRPPSE-KP) pada Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan RI Tahun Anggaran 2003.

3 - 14 Agustus 2006

asli

1 sampul

162. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Drs. Dasirwan sebagai Pimpinan Proyek Inventarisasi dan Evaluasi Daya Dukung Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Drs. Jules F Patiasiana sebagai Ketua Panitia Pengadaan dalam perkara pengadaan peralatan laboratorium Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (PRPPSE-KP) pada Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan RI Tahun Anggaran 2003.

20 Oktober - 28 November 2006

asli, salinan

1 sampul

Ir. Andjar Suparman, M.M.

163. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-19/XI/2006/P.KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Ir. Andjar Suparman, M.M. sebagai Sekretaris Badan Riset Kelautan dan Perikanan/Atasan Langsung Pimpinan Proyek (Drs. Darsiwan) dalam perkara pengadaan peralatan laboratorium Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (PRPPSE-KP) pada Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan RI Tahun Anggaran 2003.

25 April - 3 November 2006

kopi

1 jilid

164. Berkas penuntutan atas nama Ir. Andjar Suparman, M.M. sebagai Sekretaris Badan Riset Kelautan dan Perikanan/Atasan Langsung Pimpinan Proyek (Drs. Darsiwan) dalam perkara pengadaan peralatan laboratorium Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (PRPPSE-KP) pada Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan RI Tahun Anggaran 2003.

6 Desember 2006 - 29 Januari 2007

asli

1 sampul

165. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Ir. Andjar Suparman, M.M. sebagai Sekretaris Badan Riset Kelautan dan Perikanan/Atasan Langsung Pimpinan Proyek (Drs. Darsiwan) dalam perkara pengadaan peralatan laboratorium Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (PRPPSE-KP) pada Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan RI Tahun Anggaran 2003.

19 - 26 Februari 2007

asli, kopi

1 sampul

Tirta Winata

166. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/12/VII/2006/P.KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Tirta Winata sebagai Direktur Utama PT Tirta Kencana Wahana dalam perkara pengadaan peralatan laboratorium Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (PRPPSE-KP) pada Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan RI Tahun Anggaran 2003.

25 April - 12 Juli 2006

kopi

1 jilid

167. Berkas penuntutan atas nama Tirta Winata sebagai Direktur Utama PT Tirta Kencana Wahana dalam perkara pengadaan peralatan laboratorium Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (PRPPSE-KP) pada Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2003.

3 Agustus - 31 Oktober 2006

asli

1 sampul

168. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Mahkamah Agung atas nama Tirta Winata sebagai Direktur Utama PT Tirta Kencana Wahana dalam perkara pengadaan peralatan laboratorium Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (PRPPSE-KP) pada Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan RI Tahun Anggaran 2003.

15 September 2006 - 19 Juli 2007

asli, kopi, konsep

1 sampul

169. Berkas mengenai permohonan surat keterangan yang menyatakan bahwa terdakwa atas nama Tirta Winata sebagai Direktur Utama PT Tirta Kencana Wahana tidak ada perkara lain yang belum diputus dalam perkara pengadaan peralatan laboratorium Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (PRPPSE-KP) pada Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan RI Tahun Anggaran 2003.

27 Desember 2007 - 22 Januari 2008

asli

7 lembar

170. Surat dari Penuntut Umum KPK kepada Ketua Mahkamah Agung RI mengenai pendapat Penuntut Umum atas peninjauan kembali atas nama Tirta Winata sebagai Direktur Utama PT Tirta Kencana Wahana dalam perkara pengadaan peralatan laboratorium Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (PRPPSE-KP) pada Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan RI Tahun Anggaran 2003.

22 Juli 2008

asli

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu

H. Abubakar Ahmad, S.H.

171. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/14/VIII/2006/P.KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama H. Abubakar Ahmad, S.H. sebagai Bupati Dompu, Nusa Tenggara Barat dalam perkara penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2003 - 2005.

19 Mei - 28 Agustus 2006

asli

1 jilid

172. Surat dakwaan nomor: 14/D.3.KPK/IX/2006 atas nama H. Abubakar Ahmad, S.H. sebagai Bupati Dompu, Nusa Tenggara Barat dalam perkara penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2005.

14 September 2006

Asli

1 sampul

173. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 16/Pid.B/TPK/2006.PN.JKT.PST atas nama H. Abubakar Ahmad, S.H. sebagai Bupati Dompu dalam perkara penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2005.

2 Februari 2007

kopi

1 sampul

174. Berkas eksekusi dan penyitaan aset berisi Berita Acara Penyerahan Uang Pengganti dan Biaya Pekara atas nama H. Abubakar Ahmad, S.H. sebagai Bupati Dompu dalam perkara penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2005.

13 Maret - 9 Mei 2007

asli, kopi

8 lembar

175. Berkas peninjauan kembali atas nama H. Abubakar Ahmad, S.H. sebagai Bupati Dompu dalam perkara penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2005.

25 Mei 2007 - 8 November 2009

asli

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Tarif Jasa Kepengurusan Dokumen Keimigrasian di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru, Malaysia Tahun 2000 -2004.

Prihatna Setiawan

176. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/20/XI/2006/KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Prihatna Setiawan sebagai Kepala Sub Bidang Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia dalam perkara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas tarif jasa kepengurusan dokumen keimigrasian di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru, Malaysia tahun 2000 -2004.

8 Agustus - 22 November 2006

kopi

1 jilid

177. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/20/XI/2006/KPK berisi lampiran barang bukti atas nama Prihatna Setiawan sebagai Kepala Sub Bidang Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia dalam perkara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas tarif jasa kepengurusan dokumen keimigrasian di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru, Malaysia tahun 2000 -2004.

8 Agustus - 22 November 2006

kopi

2 jilid

178. Berkas penuntutan atas nama Prihatna Setiawan sebagai Kepala Kepala Sub Bidang Imigrasi Konsulat Jenderal RI Johor Bahru, Malaysia dalam perkara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas tarif jasa kepengurusan dokumen keimigrasian di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru, Malaysia tahun 2000 -2004.

18 Desember 2006 - 3 April 2007

asli

1 sampul

179. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung atas nama Prihatna Setiawan sebagai Kepala Sub Bidang Imigrasi Konsulat Jenderal RI Johor Bahru, Malaysia dalam perkara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas tarif jasa kepengurusan dokumen keimigrasian di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru, Malaysia tahun 2000 -2004.

10 April - 27 November 2007

asli, kopi, salinan

1 sampul

Drs. Eda Makmur

180. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/22/XII/2006/KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dan lampiran barang bukti atas nama Drs. Eda Makmur sebagai Konsulat Jenderal RI Johor Bahru, Malaysia dalam perkara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas tarif jasa kepengurusan dokumen keimigrasian di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Malaysia Tahun 2000 - 2002.

8 Agustus - 7 Desember 2006

kopi

2 jilid

181. Berkas penuntutan atas nama Drs. Eda Makmur sebagai Konsulat Jenderal RI Johor Bahru, Malaysia dalam perkara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas tarif jasa kepengurusan dokumen keimigrasian di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Malaysia Tahun 2000 - 2002.

18 Desember 2006 - 25 April 2007

asli, konsep

1 sampul

182. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 24/Pid.B/TPK/2006/PN.JKT.PST atas nama Drs. Eda Makmur sebagai Konsulat Jenderal RI Johor Bahru, Malaysia dalam perkara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas tarif jasa kepengurusan dokumen keimigrasian di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Malaysia Tahun 2000 - 2002.

8 Mei 2007

kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Permintaan Dana 1% - 1,5% dari Anggaran Setiap Unit Kerja Eselon I dan Dana Dekonsentrasi di Departemen Kelautan dan Perikanan RI

Dr. Andin H. Taryoto

183. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-01/P.KPK/I/2007 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Dr. Andin H. Taryoto sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan RI dalam perkara penyalahgunaan wewenang terkait permintaan dana 1% - 1,5% dari anggaran setiap unit kerja Eselon I dan dana dekonsentrasi di Departemen Kelautan dan Perikanan RI tahun 2002 - 2006.

1 September 2006 - 19 Januari 2007

kopi

1 jilid

184. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-01/P.KPK/I/2007 berisi lampiran barang bukti atas nama Dr. Andin H. Taryoto sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan RI dalam perkara penyalahgunaan wewenang terkait permintaan dana 1% - 1,5% dari anggaran setiap unit kerja Eselon I dan dana dekonsentrasi di Departemen Kelautan dan Perikanan RI tahun 2002 - 2006.

1 September 2006 - 19 Januari 2007

kopi

1 jilid

185. Berkas penuntutan atas nama Dr. Andin H. Taryoto sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan dalam perkara penyalahgunaan wewenang terkait permintaan dana 1% - 1,5% dari anggaran setiap unit kerja Eselon I dan dana dekonsentrasi di Departemen Kelautan dan Perikanan RI tahun 2002 - 2006.

12 Februari - 29 Mei 2007

asli

1 sampul

186. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Dr. Andin H. Taryoto sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan dalam perkara penyalahgunaan wewenang terkait permintaan dana 1% - 1,5% dari anggaran setiap unit kerja Eselon I dan dana dekonsentrasi di Departemen Kelautan dan Perikanan RI tahun 2002 - 2006.

5 - 26 Juni 2007

asli, kopi

1 sampul

Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S.

187. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-04/KPK/II/2007 berisi berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S. sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam perkara penyalahgunaan wewenang terkait permintaan dana 1% - 1,5% dari anggaran setiap unit kerja Eselon I dan dana dekonsentrasi di Departemen Kelautan dan Perikanan RI tahun 2002 - 2004.

1 September 2006 - 20 Januari 2007

kopi

1 jilid

188. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-04/KPK/II/2007 berisi lampiran berkas perkara atas nama Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S. sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam perkara penyalahgunaan wewenang dalam perkara penyalahgunaan wewenang terkait permintaan dana 1% - 1,5% dari anggaran setiap unit kerja Eselon I dan dana dekonsentrasi di Departemen Kelautan dan Perikanan RI tahun 2002 - 2004.

1 September 2006 - 20 Januari 2007

kopi

1 jilid

189. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-04/P.KPK/II/2007 berisi lampiran atas nama Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S. sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam perkara penyalahgunaan wewenang terkait permintaan dana 1% - 1,5% dari anggaran setiap unit kerja Eselon I dan dana dekonsentrasi di Departemen Kelautan dan Perikanan RI tahun 2002 - 2004.

1 September 2006 - 20 Januari 2007

kopi

1 jilid

190. Berkas penuntutan atas nama Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M. S. sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam perkara penyalahgunaan wewenang terkait permintaan dana 1% - 1,5% dari anggaran setiap unit kerja Eselon I dan dana dekonsentrasi di Departemen Kelautan dan Perikanan RI tahun 2002 - 2004.

14 Maret - 27 Juni 2007

asli, kopi

1 sampul

191. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S. sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam perkara penyalahgunaan wewenang terkait permintaan dana 1% - 1,5% dari anggaran setiap unit kerja Eselon I dan dana dekonsentrasi di Departemen Kelautan dan Perikanan RI tahun 2002 - 2004.

4 Juli - 3 Agustus 2007

asli, salinan

1 sampul

192. Berkas persidangan pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas nama Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S. sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam perkara penyalahgunaan wewenang terkait permintaan dana 1% - 1,5% dari anggaran setiap unit kerja Eselon I dan dana dekonsentrasi di Departemen Kelautan dan Perikanan RI tahun 2002 - 2004.

6 September - 27 Desember 2007

asli, kopi

1 sampul

193. Berkas peninjauan kembali atas nama Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S. sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam perkara penyalahgunaan wewenang terkait permintaan dana 1% - 1,5% dari anggaran setiap unit kerja Eselon I dan dana dekonsentrasi di Departemen Kelautan dan Perikanan RI tahun 2002 - 2004.

12 - 31 Agustus 2008

asli, konsep

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2001-2004

Drs. H. M. Sjachriel Darham

194. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-05/KPK/II/2007 Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. berisi atas nama Drs. H. M. Sjachriel Darham sebagai Gubernur Kalimantan Selatan dalam perkara penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2001 - 2004 pada pos anggaran Kepala Daerah Kalimantan Selatan untuk kebutuhan pribadi.

1 September 2006 - 3 April 2007

kopi

1 jilid

195. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-04/KPK/II/2007 berisi lampiran barang bukti atas jilid I, Surat Perintah Perjalanan Dinas, dll. nama Drs. H. M. Sjachriel Darham sebagai Gubernur Kalimantan Selatan dalam perkara penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2001-2004 pada pos anggaran Kepala Daerah Kalimantan Selatan untuk kebutuhan pribadi.

1 September 2006 - 15 Februari 2007

kopi

4 jilid

196. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-04/KPK/II/2007 berisi lampiran barang bukti jilid II, Surat Perintah Perjalanan Dinas, dll. atas nama Drs. H. M. Sjachriel Darham sebagai Gubernur Kalimantan Selatan dalam perkara penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2001-2004 pada pos anggaran Kepala Daerah Kalimantan Selatan untuk kebutuhan pribadi.

1 September 2006 - 15 Februari 2007

kopi

3 jilid

197. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-04/KPK/II/2007 berisi rekapitulasi pengeluaran rutin pos Kepala Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2001 atas nama Drs. H. M. Sjachriel Darham sebagai Gubernur Kalimantan Selatan dalam perkara penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2001-2004 pada pos anggaran Kepala Daerah Kalimantan Selatan untuk kebutuhan pribadi.

1 September 2006 - 15 Februari 2007

kopi

1 jilid

198. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-04/KPK/II/2007 berisi bukti pengeluaran rutin Kepala Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2004 atas nama Drs. H. M. Sjachriel Darham sebagai Gubernur Kalimantan Selatan dalam perkara penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2001-2004 pada pos anggaran Kepala Daerah Kalimantan Selatan untuk kebutuhan pribadi.

1 September 2006 - 15 Februari 2007

kopi

1 jilid

199. Surat dakwaan nomor: 05/D.3KPK/IV/2007 atas nama Drs. H. M. Sjachriel Darham sebagai Gubernur Kalimantan Selatan dalam perkara penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2001-2004 pada pos anggaran Kepala Daerah Kalimantan Selatan untuk kebutuhan pribadi.

16 April 2007

asli

1 sampul

200. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung atas nama Drs. H. M. Sjachriel Darham sebagai Gubernur Kalimantan Selatan dalam perkara penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2001-2004 pada pos anggaran Kepala Daerah Kalimantan Selatan untuk kebutuhan pribadi.

16 Agustus - 12 Februari 2008

asli

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2003-2005

Hendy Boedoro, S.H., M.Si.

201. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/6/KPK/IV/2007 berisi Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, dll. atas nama Hendy Boedoro, S.H., M.Si. sebagai Bupati Kendal dalam perkara penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal pada pos Dana Tak Tersangka, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Pinjaman Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, Dana Bantuan Provinsi Jawa Tengah dan permintaan *fee* kepada pihak ketiga Tahun Anggran 2003-2005.

12 Oktober 2006 - 17 April 2007

asli, kopi

1 sampul

202. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/6/KPK/IV/2007 berisi berita acara penyitaan, Berita Acara Perpanjangan Penahanan, dll. atas nama Hendy Boedoro, S.H., M.Si. sebagai Bupati Kendal dalam perkara penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal pada pos Dana Tak Tersangka, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Pinjaman Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, Dana Bantuan Provinsi Jawa Tengah dan permintaan *fee* kepada pihak ketiga Tahun Anggran 2003-2005.

7 November 2006 - 3 April 2007

asli

1 sampul

203. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/6/KPK/IV/2007 berisi Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi atas nama Hendy Boedoro, S.H., M.Si. sebagai Bupati Kendal dalam perkara penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal pada Pos Dana Tak Tersangka, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Pinjaman Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, Dana Bantuan Provinsi Jawa Tengah dan permintaan fee kepada pihak ketiga Tahun Anggran 2003-2005.

30 Oktober 2006 - 2 Februari 2007

asli

1 sampul

204. Surat dari Dr. Hj. Widya Kandhi Susanti, M.M. kepada Presiden RI mengenai permohonan penangguhan/pengalihan status penahanan atas nama Hendy Boedoro, S.H., M.Si. sebagai Bupati Kendal dalam rangka penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal pada pos Dana Tak Tersangka, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Pinjaman Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, Dana Bantuan Provinsi Jawa Tengah dan permintaan *fee* kepada pihak ketiga Tahun Anggran 2003-2005.

3 Januari 2007

asli

1 sampul

205. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung atas nama Hendy Boedoro, S.H., M.Si. sebagai Bupati Kendal dalam perkara penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal pada pos Dana Tak Tersangka, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Pinjaman Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, Dana Bantuan Provinsi Jawa Tengah dan permintaan *fee* kepada pihak ketiga Tahun Anggran 2003-2005.

18 September 2007 - 4 Juni 2008

asli, kopi, salinan

1 sampul

Drs. Warsa Susilo, M.Pd.

206. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/7/KPK/IV/2007 berisi Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll atas nama Drs. Warsa Susilo, M.Pd. sebagai Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kendal dalam perkara penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal pada pos Dana Tak Tersangka, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Pinjaman Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, Dana Bantuan Provinsi Jawa Tengah dan permintaan *fee* kepada pihak ketiga Tahun Anggran 2003-2005.

12 Oktober 2006 - 19 April 2007

asli, kopi

2 jilid

207. Berkas penuntutan atas nama Drs. Warsa Susilo, M.Pd. sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kendal dalam perkara penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal pada pos Dana Tak Tersangka, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Pinjaman Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, Dana Bantuan Provinsi Jawa Tengah dan permintaan *fee* kepada pihak ketiga Tahun Anggran 2003-2005.

7 Mei - 11 September 2007

asli, konsep

1 sampul

208. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Drs. Warsa Susilo, M.Pd. sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kendal dalam perkara penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal pada pos Dana Tak Tersangka, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Pinjaman Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, Dana Bantuan Provinsi Jawa Tengah dan permintaan *fee* kepada pihak ketiga Tahun Anggran 2003-2005.

18 - 27 September 2007

asli, salinan

1 sampul

209. Berkas persidangan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Mahkamah Agung atas nama Drs. Warsa Susilo, M.Pd. sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kendal dalam perkara penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal pada pos Dana Tak Tersangka, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Pinjaman Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, Dana Bantuan Provinsi Jawa Tengah dan permintaan *fee* kepada pihak ketiga Tahun Anggran 2003-2005.

21 November 2007 - 25 Juni 2008

asli, salinan

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Tahun 2001-2005

Prof. Dr. H. Syaukani Hassan Rais, S.E., M.M.

210. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-11/KPK/VII/2007 berisi Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Prof. Dr. H. Syaukani Hassan Rais, S.E., M.M. sebagai Bupati Kutai Kartanegara dalam perkara penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2001-2005 terkait penetapan pembagian uang perangsang atas penerimaan daerah terhadap minyak bumi dan gas bumi, pembangunan Bandar Udara Samarinda-Kukar, dan penggunaan dana kesejahteraan rakyat/bantuan sosial.

7 Desember 2006 - 11 Juli 2007

kopi

1 jilid

211. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/11/KPK/VII/2007 berisi Berita Acara Penyitaan Barang Bukti atas nama Prof. Dr. H. Syaukani Hassan Rais, S.E., M.M. sebagai Bupati Kutai Kartanegara dalam perkara penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2001-2005 terkait penetapan pembagian uang perangsang atas penerimaan daerah terhadap minyak bumi dan gas bumi, pembangunan Bandar Udara Samarinda-Kukar, dan penggunaan dana kesejahteraan rakyat/bantuan sosial.

18 Desember 2006- 11 Juli 2007

kopi

1 jilid

212. Berkas penuntutan atas nama Prof. Dr. H. Syaukani Hassan Rais, S.E., M.M. sebagai Bupati Kutai Kartanegara dalam perkara penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2001-2005 terkait penetapan pembagian uang perangsang atas penerimaan daerah terhadap minyak bumi dan gas bumi, pembangunan Bandar Udara Samarinda-Kukar, dan penggunaan dana kesejahteraan rakyat/bantuan sosial.

26 Juli - 26 November 2007

asli, kopi

1 sampul

213. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi atas nama Prof. Dr. H. Syaukani Hassan Rais, S.E., M.M. sebagai Bupati Kutai Kartanegara dalam perkara penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2001-2005 terkait penetapan pembagian uang perangsang atas penerimaan daerah terhadap minyak bumi dan gas bumi, pembangunan Bandar Udara Samarinda-Kukar, dan penggunaan dana kesejahteraan rakyat/bantuan sosial.

7 Desember 2007 - 26 Maret 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul

214. Berkas persidangan pada Mahkamah Agung atas nama Prof. Dr. H. Syaukani Hassan Rais, S.E., M.M. sebagai Bupati Kutai Kartanegara dalam perkara penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2001-2005 terkait penetapan pembagian uang perangsang atas penerimaan daerah terhadap minyak bumi dan gas bumi, pembangunan Bandar Udara Samarinda-Kukar, dan penggunaan dana kesejahteraan rakyat/bantuan sosial.

28 April - 28 Juli 2008

asli, kopi, salinan

1 sampul

215. Surat dari Penuntut Umum KPK kepada Ketua Mahkamah Agung RI mengenai penyampaian kontra memori peninjauan kembali atas nama Prof. Dr. H. Syaukani Hassan Rais, S.E., M.M. sebagai Bupati Kutai Kartanegara dalam perkara penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2001-2005 terkait penetapan pembagian uang perangsang atas penerimaan daerah terhadap minyak bumi dan gas bumi, pembangunan Bandar Udara Samarinda-Kukar, dan penggunaan dana kesejahteraan rakyat/bantuan sosial.

9 Desember 2008

asli, konsep

1 sampul

216. Berkas eksekusi atas nama Prof. Dr. H. Syaukani Hassan Rais, S.E., M.M. sebagai Bupati Kutai Kartanegara dalam perkara penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2001-2005 terkait penetapan pembagian uang perangsang atas penerimaan daerah terhadap minyak bumi dan gas bumi, pembangunan Bandar Udara Samarinda-Kukar, dan penggunaan dana kesejahteraan rakyat/bantuan sosial.

19 April - 20 Agustus 2010

asli, kopi

1 sampul

Vonnie Anneke Panambunan

217. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/02/23/I/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Vonnie Anneke Panambunan sebagai Bupati Kepala Daerah (KDH) Minahasa Utara, Sulawesi Utara/mantan Direktur Utama PT Mahakam Diastar Internasional (PT MDI) dalam perkara penyalahgunaan pekerjaan pengadaan jasa konsultasi dalam pembuatan studi kelayakan (*feasibility study*) pembangunan Bandar Udara Samarinda-Kutai Kartanegara di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Tahun 2003-2004.

18 September 2007 - 30 Januari 2008

kopi

1 jilid

218. Berkas penuntutan atas nama Vonnie Anneke Panambunan sebagai Bupati Kepala Daerah (KDH) Minahasa Utara, Sulawesi Utara/mantan Direktur Utama PT Mahakam Diastar Internasional (PT MDI) dalam perkara penyalahgunaan pekerjaan pengadaan jasa konsultasi dalam pembuatan studi kelayakan (*feasibility study*) pembangunan Bandar Udara Samarinda-Kutai Kartanegara di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Tahun 2003-2004.

11 Februari-30 April 2008

asli, kopi

1 sampul

219. Putusan Pengadilan Negeri nomor: 03/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst atas nama Vonnie Anneke Panambunan sebagai Bupati Kepala Daerah (KDH) Minahasa Utara, Sulawesi Utara/mantan Direktur Utama PT Mahakam Diastar Internasional (PT MDI) dalam perkara penyalahgunaan pekerjaan pengadaan jasa konsultasi dalam pembuatan studi kelayakan (*feasibility study*) pembangunan Bandar Udara Samarinda-Kutai Kartanegara di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Tahun 2003-2004.

16 Mei 2008

kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat *Automatic Fingerprint Identification System* (AFIS) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2004

Zulkarnain Yunus dan Apendi

220. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-09/VI/2007/KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Zulkarnain Yunus sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI dan Apendi sebagai Pimpinan Proyek Pembinaan Fasilitas Pelayanan Hukum (PPFPH) dalam perkara pengadaan alat *Automatic Fingerprint Identification System* (AFIS) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI tahun 2004. Disertai lampiran berkas perkara.

26 Desember 2006 - 31 Mei 2007

kopi

2 jilid

221. Berkas penuntutan atas nama Zulkarnain Yunus sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI dan Apendi sebagai Pimpinan Proyek Pembinaan Fasilitas Pelayanan Hukum (PPFPH) dalam perkara pengadaan alat *Automatic Fingerprint Identification System* (AFIS) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI tahun 2004.

21 Juni - 29 Oktober 2007

asli, konsep

1 sampul

222. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung atas nama Zulkarnain Yunus sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI dan Apendi sebagai Pimpinan Proyek Pembinaan Fasilitas Pelayanan Hukum (PPFPH) dalam perkara pengadaan alat *Automatic Fingerprint Identification System* (AFIS) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI tahun 2004.

5 November 2007 - 12 Agustus 2008

asli, kopi, salinan

1 sampul

Eman Rachman

223. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/10/VI/2007/KPK berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Eman Rachman sebagai Direktur Utama PT Sentral Filindo dalam perkara bersama-sama dengan Zulkarnain Yunus dan Apendi melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat *Automatic Fingerprint Identification System* (AFIS) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI tahun 2004.

26 Desember 2006 - 5 Juni 2007

kopi

1 jilid

224. Berkas penuntutan atas nama Eman Rachman sebagai Direktur Utama PT Sentral Filindo dalam perkara bersama-sama dengan Zulkarnain Yunus dan Apendi melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat *Automatic Fingerprint Identification System* (AFIS) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI tahun 2004.

21 Juni - 24 Oktober 2007

asli

1 sampul

225. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Eman Rachman sebagai Direktur Utama PT Sentral Filindo dalam perkara bersama-sama dengan Zulkarnain Yunus dan Apendi melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat *Automatic Fingerprint Identification System* (AFIS) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI tahun 2004.

31 Oktober - 8 November 2007

kopi, konsep

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait Pungutan Biaya Pengurusan Dokumen Keimigrasian di Kantor Kedutaan Besar RI untuk Malaysia di Kuala Lumpur Tahun 2004-2005

Drs. Rusdiharjo, S.H. dan Drs. Arihken Tarigan

226. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-01/23/I/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Drs. Rusdiharjo, S.H. sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia di Kuala Lumpur dan Drs. Arihken Tarigan sebagai Kepala Bidang Imigrasi Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur dalam perkara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait pungutan biaya pengurusan dokumen keimigrasian di Kantor Kedutaan Besar RI untuk Malaysia di Kuala Lumpur Tahun 2004-2005.

14 Maret 2007 - 3 Januari 2008

kopi

1 jilid

227. Berkas penuntutan atas nama Drs. Rusdiharjo, S.H. sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia di Kuala Lumpur dan Drs. Arihken Tarigan sebagai Kepala Bidang Imigrasi Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur dalam perkara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait pungutan biaya pengurusan dokumen keimigrasian di Kantor Kedutaan Besar RI untuk Malaysia di Kuala Lumpur Tahun 2004-2005.

24 Januari - 21 Mei 2008

asli

1 sampul

228. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas nama Drs. Rusdiharjo, S.H. sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia di Kuala Lumpur dan Drs. Arihken Tarigan sebagai Kepala Bidang Imigrasi Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur dalam perkara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait pungutan biaya pengurusan dokumen keimigrasian di Kantor Kedutaan Besar RI untuk Malaysia di Kuala Lumpur Tahun 2004-2005.

28 Mei - 8 Oktober 2008

asli, kopi, salinan

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait Pungutan Biaya Pengurusan Dokumen Keimigrasian di Kantor Kedutaan Besar RI untuk Malaysia di Kuala Lumpur Tahun 2004-2005

Drs. Hadi A. Wayarabi Al Hadar dan Drs. Suparba W. Amiarsa

229. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-12/P.KPK/VIII/2007 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Drs. Hadi A. Wayarabi Al Hadar sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia dan Drs. Suparba W. Amiarsa sebagai Kepala Bidang Imigrasi Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur dalam perkara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait pungutan biaya pengurusan dokumen keimigrasian tahun 2000-2003 di Kantor Kedutaan Besar RI Malaysia di Kuala Lumpur.

14 Maret - 9 Agustus 2007

kopi

1 jilid

230. Surat tuntutan atas nama Drs. Hadi A. Wayarabi Al Hadar sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia di Kuala Lumpur dan Suparba W. Amiarsa sebagai Kepala Bidang Imigrasi Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur dalam perkara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait pungutan biaya pengurusan dokumen keimigrasian tahun 2000-2003 di Kantor Kedutaan Besar RI Malaysia di Kuala Lumpur.

12 Desember 2007

asli

1 sampul

231. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Drs. Hadi A. Wayarabi Al Hadar sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia di Kuala Lumpur dan Suparba W. Amiarsa sebagai Kepala Bidang Imigrasi Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur dalam perkara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait pungutan biaya pengurusan dokumen keimigrasian tahun 2000-2003 di Kantor Kedutaan Besar RI Malaysia di Kuala Lumpur.

18 Desember 2007 - 2 Januari 2008

asli, salinan

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Pembahasan Anggaran Biaya Tambahan terkait Pengadaan Tanah untuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Teknologi Nuklir Tahun 2004

Sugiyono Prasodjo dan Ir. Hieronimus Abdul Salam, M.Sc.

232. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-13/P.KPK/IX/2007 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Sugiyono Prasodjo sebagai Pimpinan Proyek Peningkatan Kelembagaan dan Sarana (PKS) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan Ir. Hieronimus Abdul Salam, M.Sc. sebagai Sekretaris Utama Bapeten dalam perkara proyek peningkatan kelembagaan dan sarana Bapeten Tahun Anggaran 2004 terkait pengadaan tanah untuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bapeten.

20 April - 14 September 2007

kopi

1 jilid

233. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-13/P.KPK/IX/2007 berisi lampiran bekas perkara atas nama Sugiyono Prasodjo sebagai Pimpinan Proyek Peningkatan Kelembagaan dan Sarana (PKS) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan Ir. Hieronimus Abdul Salam, M.Sc. sebagai Sekretaris Utama Bapeten dalam perkara proyek peningkatan kelembagaan dan sarana Bapeten Tahun Anggaran 2004 terkait pengadaan tanah untuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bapeten.

20 April - 14 September 2007

kopi

1 jilid

234. Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi atas nama Sugiyo Prasajo sebagai Pimpinan Proyek Peningkatan Kelembagaan dan Sarana (PKS) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan Ir. Hieronimus Abdul Salam, M.Sc. sebagai Sekretaris Utama Bapeten dalam perkara proyek peningkatan kelembagaan dan sarana Bapeten Tahun Anggaran 2004 terkait pengadaan tanah untuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bapeten.

Nb. Akses Tertutup.

31 Agustus 2007

konsep

1 sampul

235. Berkas penuntutan atas nama Sugiyo Prasajo sebagai Pimpinan Proyek Peningkatan Kelembagaan dan Sarana (PKS) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan Ir. Hieronimus Abdul Salam, M.Sc. sebagai Sekretaris Utama Bapeten dalam perkara proyek peningkatan kelembagaan dan sarana Bapeten Tahun Anggaran 2004 terkait pengadaan tanah untuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bapeten.

3 Oktober 2007 - 30 Januari 2008

asli

1 sampul

236. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung atas nama Sugiyo Prasajo sebagai Pimpinan Proyek Peningkatan Kelembagaan dan Sarana (PKS) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan Ir. Hieronimus Abdul Salam, M.Sc. sebagai Sekretaris Utama Bapeten dalam perkara proyek peningkatan kelembagaan dan sarana Bapeten Tahun Anggaran 2004 terkait pengadaan tanah untuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bapeten.

13 Februari - 23 Desember 2008

asli, kopi, salinan

1 sampul

237. Berkas peninjauan kembali atas nama Sugiyo Prasajo sebagai Pimpinan Proyek Peningkatan Kelembagaan dan Sarana (PKS) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan Ir. Hieronimus Abdul Salam, M.Sc. sebagai Sekretaris Utama Bapeten dalam perkara proyek peningkatan kelembagaan dan sarana Bapeten Tahun Anggaran 2004 terkait pengadaan tanah untuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bapeten.

16 Juni 2009 - 30 Juni 2010

asli, kopi

1 sampul

238. Berkas eksekusi atas nama Sugiyo Prasajo sebagai Pimpinan Proyek Peningkatan Kelembagaan dan Sarana (PKS) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan Ir. Hieronimus Abdul Salam, M.Sc. sebagai Sekretaris Utama Bapeten dalam perkara proyek peningkatan kelembagaan dan sarana Bapeten Tahun Anggaran 2004 terkait pengadaan tanah untuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bapeten.

5 Maret 2009 - 26 Oktober 2010

asli, kopi

1 sampul

H. Noor Adenan Razak, S.E.

- 239 Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-03/23/I/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama H. Noor Adenan Razak, S.E. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) Tahun 1999-2004 dengan jabatan Anggota Panitia Anggaran Komisi VIII dalam perkara penerimaan sejumlah uang terkait pembahasan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Tahun 2004. Disertai lampiran berkas perkara.

19 November 2007 - 31 Januari 2008

kopi

2 jilid

240. Berkas penyidikan atas nama H. Noor Adenan Razak, S.E. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 1999-2004 dengan jabatan Anggota Panitia Anggaran Komisi VIII dalam perkara penerimaan sejumlah uang terkait pembahasan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Tahun 2004.

19 November 2007 - 15 Februari 2008

asli, kopi

1 sampul

241. Berkas penuntutan atas nama H. Noor Adenan Razak, S.E. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 1999-2004 dengan jabatan Anggota Panitia Anggaran Komisi VIII dalam perkara penerimaan sejumlah uang terkait pembahasan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Tahun 2004.

14 Februari - 24 April 2008

asli

1 sampul

242. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama H. Noor Adenan Razak, S.E. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 1999-2004 dengan jabatan Anggota Panitia Anggaran Komisi VIII dalam perkara penerimaan sejumlah uang terkait pembahasan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Tahun 2004.

15 Februari - 8 Mei 2008

asli, kopi

1 sampul

243. Berkas eksekusi dan penyitaan aset atas nama H. Noor Adenan Razak, S.E. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 1999-2004 dengan jabatan Anggota Panitia Anggaran Komisi VIII dalam perkara penerimaan sejumlah uang terkait pembahasan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Tahun 2004.

16 Mei - 4 Agustus 2008

asli, kopi

1 sampul

244. Berkas peninjauan kembali atas nama H. Noor Adenan Razak, S.E. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 1999-2004 dengan jabatan Anggota Panitia Anggaran Komisi VIII dalam perkara penerimaan sejumlah uang terkait pembahasan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Tahun 2004.

29 April-18 Mei 2009

asli, kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran *Ladder Truck* Morita model MLF 4-30 R di Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara

Drs. Abdillah, Ak. M.B.A.

245. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-08/23/IV/2008 berisi lampiran barang bukti atas nama Drs. Abdillah, Ak. M.B.A. sebagai Wali Kota Medan dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran *ladder truck* Morita model MLF 4-30 R sebanyak 1 (satu) unit untuk Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2005.

2 Mei 2007 - 28 April 2008

kopi

1 jilid

246. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-08/23/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Drs. Abdillah, Ak. M.B.A. sebagai Wali Kota Medan dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran *ladder truck* Morita model MLF 4-30 R sebanyak 1 (satu) unit untuk Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2005.

2 Mei 2007 - 28 April 2008

kopi

1 jilid

247. Data dukung dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi atas nama Drs. Abdillah, Ak. M.B.A. sebagai Wali Kota Medan dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran *ladder truck* Morita model MLF 4-30 R sebanyak 1 (satu) unit untuk Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2005.

TT

asli, kopi

1 sampul

248. Berkas penuntutan atas nama Drs. Abdillah, Ak. M.B.A. sebagai Wali Kota Medan dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran *ladder truck* Morita model MLF 4-30 R sebanyak 1 (satu) unit untuk Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2005.

15 Mei - 3 September 2008

asli

1 sampul

249. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung atas nama Drs. Abdillah, Ak. M.B.A. sebagai Wali Kota Medan dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran *ladder truck* Morita model MLF 4-30 R sebanyak 1 (satu) unit untuk Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2005.

10 September 2008 - 14 Juli 2009

asli, kopi, salinan

1 sampul

Dr. Drs. H. Ramli, M.M.

250. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/09/23/IV/2008 berisi Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Dr. Drs. H. Ramli, M.M. sebagai Wakil Wali Kota Medan dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran *ladder truck* Morita model MLF 4-30 R sebanyak 1 (satu) unit untuk Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2005.

2 Mei 2007 - 29 April 2008

kopi

1 jilid

251. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/09/23/IV/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Dr. Drs. H. Ramli, M.M. sebagai Wakil Wali Kota Medan dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran *ladder truck* Morita model MLF 4-30 R sebanyak 1 (satu) unit untuk Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2005.
- 2 Mei 2007 - 28 April 2008
kopi
1 jilid
252. Surat tuntutan dari Penuntut Umum KPK kepada Pengadilan Negeri atas nama Dr. Drs. H. Ramli, M.M. sebagai Wakil Wali Kota Medan dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran *ladder truck* Morita model MLF 4-30 R sebanyak 1 (satu) unit untuk Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2005.
- 5 Juni – 8 Oktober 2008
asli
1 jilid
253. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Dr. Drs. H. Ramli, M.M. sebagai Wakil Wali Kota Medan dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran *ladder truck* Morita model MLF 4-30 R sebanyak 1 (satu) unit untuk Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2005.
- 5 Juni - 8 Oktober 2008
asli, kopi
1 sampul

254. Berkas eksekusi atas nama Dr. Drs. H. Ramli, M.M. sebagai Wakil Wali Kota Medan dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran *ladder truck* Morita model MLF 4-30 R sebanyak 1 (satu) unit untuk Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2005.

14 Juli - 12 Agustus 2010

tembusan

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Tipe V.80 ASM di Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2003

H. Saleh Djasit, S.H.

255. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-07/23/IV/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama H. Saleh Djasit, S.H. sebagai Gubernur Provinsi Riau dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran tipe V.80 ASM sebanyak 20 (dua puluh) unit yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2003.

2 Mei 2007 - 18 April 2008

asli, kopi

1 jilid

256. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-07/23/IV/2008 berisi lampiran atas nama H. Saleh Djasit, S.H. sebagai Gubernur Provinsi Riau dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran tipe V.80 ASM sebanyak 20 (dua puluh) unit yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2003.

2 Mei 2007 - 18 April 2008

kopi

1 jilid

257. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-07/23/IV/2008 berisi lampiran berkas atas nama H. Saleh Djasit, S.H. sebagai Gubernur Provinsi Riau dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran tipe V.80 ASM sebanyak 20 (dua puluh) unit yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2003.

2 Mei 2007 - 18 April 2008

kopi

1 jilid

258. Berkas penuntutan atas nama H. Saleh Djasit, S.H. sebagai Gubernur Provinsi Riau dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran tipe V.80 ASM sebanyak 20 (dua puluh) unit yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2003.

19 Mei - 28 Juli 2008

asli

1 sampul

259. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama H. Saleh Djasit, S.H. sebagai Gubernur Provinsi Riau dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran tipe V.80 ASM sebanyak 20 (dua puluh) unit yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2003.

Nb.: terdapat 1 buah DVD (Persidangan pemeriksaan saksi Oentarto Sindung Mawardi dan Soeroso)

4 - 28 Agustus 2008

asli, kopi

1 sampul; 1 keping DVD (1:44:47)

260. Berkas peninjauan kembali atas nama H. Saleh Djasit, S.H. sebagai Gubernur Provinsi Riau dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran tipe V.80 ASM sebanyak 20 (dua puluh) unit yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2003.

12 Desember 2008 - 16 Juni 2010

asli

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Tipe V.80 ASM di Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan Tahun 2003-2004

Drs. H. Baso Amiruddin Maula, S.H., M.H., M.Si.

261. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/14/KPK/X/2007 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Drs. H. Baso Amiruddin Maula, S.H., M.H., M.Si. sebagai Wali Kota Makassar dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran yang menggunakan pompa merek Tohatsu jenis V.80 ASM yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun 2003-2004.

2 Mei - 3 Oktober 2007

asli, kopi

1 jilid

262. Berkas mengenai pemblokiran rekening dan penitipan uang sementara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi atas nama Drs. H. Baso Amiruddin Maula, S.H., M.H., M.Si. sebagai Wali Kota Makassar dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran yang menggunakan pompa dengan merek Tohatsu jenis V.80 ASM yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Makassar Tahun 2003 dan 2004.

5 Juni 2007 - 29 Juli 2008

asli, kopi

4 lembar

263. Berkas penuntutan atas nama Drs. H. Baso Amiruddin Maula, S.H., M.H., M.Si sebagai Wali Kota Makassar dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran yang menggunakan pompa dengan merek Tohatsu jenis V.80 ASM yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Makassar Tahun 2003 dan 2004.

26 Oktober 2007 - 18 Februari 2008

asli, kopi

1 sampul

264. Putusan sidang pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi atas nama Drs. H. Baso Amiruddin Maula, S.H., M.H., M.Si sebagai Wali Kota Makassar dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran yang menggunakan pompa dengan merek Tohatsu jenis V.80 ASM yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Makassar Tahun 2003 dan 2004.

6 Maret - 3 Juni 2008

kopi

1 sampul

**Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Tipe V.80
ASM di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2003
dan 2005**

Ismed Rusdany, S.E., M.A.P.

265. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/04/23/I/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Ismed Rusdany, S.E., M.A.P. sebagai Kepala Subbagian Analisa Kebijakan dan Keuangan Daerah/Pimpinan Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana/Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi Kalimantan Timur dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran Tipe V.80 ASM sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit dan mobil pemadam kebakaran *hydrolic* tangga *ladder truck* merek Morita Model MLF4-30R sebanyak 2 (dua) unit di Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2003 dan 2005.

4 Mei 2007 - 29 Februari 2008

kopi

1 jilid

266. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-04/23/I/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Ismed Rusdany, S.E., M.A.P. sebagai Kepala Subbagian Analisa Kebijakan dan Keuangan Daerah/Pimpinan Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana/Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi Kalimantan Timur dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran Tipe V.80 ASM sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit dan mobil pemadam kebakaran *hydrolic* tangga *ladder truck* merek Morita Model MLF4-30R sebanyak 2 (dua) unit di Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2003 dan 2005.

4 Mei 2007 - 23 Januari 2008

kopi

1 jilid

267. Berkas penyidikan atas nama Ismed Rusdany, S.E., M.A.P. sebagai Kepala Subbagian Analisa Kebijakan dan Keuangan Daerah/Pimpinan Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana/Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi Kalimantan Timur dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran Tipe V.80 ASM sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit dan mobil pemadam kebakaran *hydrolic* tangga *ladder truck* merek Morita Model MLF4-30R sebanyak 2 (dua) unit di Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2003 dan 2005.

19 Juni 2007-5 Maret 2008

asli, kopi

1 sampul

268. Berkas penuntutan atas nama Ismed Rusdany, S.E., M.A.P. sebagai Kepala Subbagian Analisa Kebijakan dan Keuangan Daerah/Pimpinan Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana /Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi Kalimantan Timur dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran Tipe V.80 ASM sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit dan mobil pemadam kebakaran *hydrolic* tangga *ladder truck* merek Morita Model MLF4-30R sebanyak 2 (dua) unit di Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2003 dan 2005.

5 Maret - 11 Juni 2008

asli, kopi

1 sampul

269. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Ismed Rusdany, S.E., M.A.P. sebagai Kepala Subbagian Analisa Kebijakan dan Keuangan Daerah/Pimpinan Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana/Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi Kalimantan Timur dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran Tipe V.80 ASM sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit dan mobil pemadam kebakaran *hydrolic* tangga *ladder truck* merek Morita Model MLF4-30R sebanyak 2 (dua) unit di Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2003 dan 2005.

18 Maret - 2 Juli 2008

asli, konsep, salinan, kopi

1 sampul

270. Berkas eksekusi atas nama Ismed Rusdany, S.E., M.A.P. sebagai Kepala Subbagian Analisa Kebijakan dan Keuangan Daerah/Pimpinan Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana/Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi Kalimantan Timur dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran Tipe V.80 ASM sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit dan mobil pemadam kebakaran *hydrolic* tangga *ladder truck* merek Morita Model MLF4-30R sebanyak 2 (dua) unit di Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2003 dan 2005.

10 Juli - 13 Oktober 2008

asli, kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Tipe V.80 ASM dan Pembebasan Bea Masuk/Pajak Mobil Pemadam Kebakaran di Beberapa Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Indonesia

Oentarto Sindung Mawardi

271. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/21/23/VIII/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Oentarto Sindung Mawardi sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dalam perkara penerbitan radiogram terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran tipe V.80 ASM dan pembebasan bea masuk/pajak mobil pemadam kebakaran jenis mobil tangga merek Morita model MLF4-30R di beberapa pemerintahan provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia.

18 April 2008 - 18 Agustus 2009

asli

1 jilid

272. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/21/23/VIII/2009 berisi lampiran barang bukti atas nama Oentarto Sindung Mawardi sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dalam perkara penerbitan radiogram dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran tipe V.80 ASM dan pembebasan bea masuk/pajak mobil pemadam kebakaran jenis mobil tangga merek Morita model MLF4-30R di beberapa pemerintahan provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia.

18 April 2008 - 18 Agustus 2009

kopi

1 jilid

273. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/21/23/VIII/2009 berisi lampiran barang bukti atas nama Oentarto Sindung Mawardi sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dalam perkara penerbitan radiogram dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran tipe V.80 ASM dan pembebasan bea masuk/pajak mobil pemadam kebakaran jenis mobil tangga merek Morita model MLF4-30R di beberapa pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia.

18 April 2008 - 18 Agustus 2009

kopi

1 jilid

274. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/21/23/VIII/2009 berisi lampiran berkas perkara antara lain Berita Acara Penyitaan, Berita Acara Pemotretan, dll. atas nama Oentarto Sindung Mawardi sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri RI dalam perkara penerbitan radiogram terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran Tipe V.80 ASM dan pembebasan bea masuk/pajak mobil pemadam kebakaran jenis mobil tangga merek Morita model MLF4-30R di beberapa pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia pada Tahun Anggaran 2000-2005.

18 April 2008 - 18 Agustus 2009

kopi

1 jilid

275. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/21/23/VIII/2009 berisi lampiran barang bukti atas nama Oentarto Sindung Mawardi sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dalam perkara penerbitan radiogram terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran tipe V.80 ASM dan pembebasan bea masuk/pajak mobil pemadam kebakaran jenis mobil tangga merek Morita model MLF4-30R di beberapa pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia.

18 April 2008 - 18 Agustus 2009

kopi

1 jilid

276. Berkas penyidikan atas nama Oentarto Sindung Mawardi sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri RI dalam perkara penerbitan radiogram terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran tipe V.80 ASM dan pembebasan bea masuk/pajak mobil pemadam kebakaran jenis mobil tangga merek Morita model MLF4-30R di beberapa pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia.

12 Mei - 28 Oktober 2008

asli

8 lembar

277. Berkas penuntutan atas nama Oentarto Sindung Mawardi sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri RI dalam perkara penerbitan radiogram terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran tipe V.80 ASM dan pembebasan bea masuk/pajak mobil pemadam kebakaran jenis mobil tangga merek Morita model MLF4-30R di beberapa pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia.

7 September - 17 Desember 2009

kopi

1 sampul

278. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 21/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST atas nama Oentarto Sindung Mawardi sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri RI dalam perkara penerbitan radiogram terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran tipe V.80 ASM dan pembebasan bea masuk/pajak mobil pemadam kebakaran jenis mobil tangga merek Morita model MLF4-30R di beberapa pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia.

4 Januari 2010

kopi

1 jilid

Hengky Samuel Daud, M.B.A.

279. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/24/23/IX/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Hengky Samuel Daud, M.B.A. sebagai Direktur Utama PT Istana Sarana Raya dan PT Satal Nusantara dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran tipe V.80 ASM untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia Tahun 2002-2005.

7 Mei 2007 - 9 September 2009

asli, kopi

1 jilid

280. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/24/23/IX/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Hengky Samuel Daud, M.B.A. sebagai Direktur Utama PT Istana Sarana Raya dan PT Satal Nusantara dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran tipe V.80 ASM untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia Tahun 2002-2005.

7 Mei 2007 - 9 September 2009

asli, kopi

1 jilid

281. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/24/23/IX/2009 berisi lampiran barang bukti (Jilid I) atas nama Hengky Samuel Daud, M.B.A. sebagai Direktur Utama PT Istana Sarana Raya dan PT Satal Nusantara dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran tipe V.80 ASM di Pemerintah Kota Kendari, Maluku Utara dan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 2002-2005.

7 Mei 2007 - 9 September 2009

kopi

1 jilid

282. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/24/23/IX/2009 berisi lampiran barang bukti (Jilid II) atas nama Hengky Samuel Daud, M.B.A. sebagai Direktur Utama PT Istana Sarana Raya dan PT Satal Nusantara dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran tipe V.80 ASM di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Minahasa, Pemerintah Kabupaten Bolmong, Pemerintah Kabupaten Talaud, dan Pemerintah Kota Makasar Tahun 2002-2005.

7 Mei 2007 - 9 September 2009

kopi

1 jilid

283. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/24/23/IX/2009 berisi lampiran barang bukti (Jilid III) atas nama Hengky Samuel Daud, M.B.A. sebagai Direktur Utama PT Istana Sarana Raya dan PT Satal Nusantara dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran tipe V.80 ASM di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Kalimantan Timur Tahun 2002-2005.

7 Mei 2007 - 9 September 2009

kopi

1 jilid

284. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/24/23/IX/2009 berisi lampiran barang bukti (Jilid IV) atas nama Hengky Samuel Daud, M.B.A. sebagai Direktur Utama PT Istana Sarana Raya dan PT Satal Nusantara dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran tipe V.80 ASM di Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dan Pemerintah Kota Medan Tahun 2002-2005.

7 Mei 2007 - 9 September 2009

kopi

1 jilid

285. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/24/23/IX/2009 berisi lampiran barang bukti (Jilid V) atas nama Hengky Samuel Daud, M.B.A. sebagai Direktur Utama PT Istana Sarana Raya dan PT Satal Nusantara dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran tipe V-80 ASM di Otorita Batam, Pemerintah Kota Jambi, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pemerintah Kabupaten Tebo, Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2002-2005.

7 Mei 2007 - 9 September 2009

kopi

1 jilid

286. Surat dari Kepala Biro Psikologi Sumber Daya Ekonomi Sumber Daya Manusia Kepolisian RI kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai hasil pemeriksaan psikologi atas nama Hengky Samuel Daud, M.B.A. dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran tipe V.80 ASM dan pembebasan bea masuk mobil pemadam kebakaran merek Morita.

4 September 2009

kopi

1 sampul

287. Berkas penuntutan atas nama Hengky Samuel Daud, M.B.A. sebagai Direktur Utama PT Istana Sarana Raya dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran tipe V.80 ASM dan pembebasan bea masuknya untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia tahun 2002-2005.

14 September 2009 - 14 Januari 2010

asli, kopi

1 sampul

288. Berkas persidangan pada Pengadilan Tinggi atas nama Hengky Samuel Daud, M.B.A. sebagai Direktur Utama PT Istana Sarana Raya dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran tipe V.80 ASM dan pembebasan bea masuknya untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia tahun 2002-2005.

28 Januari - 26 Mei 2010

asli, kopi

1 sampul

289. Surat dari Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penyampaian laporan tahanan KPK atas nama Hengky Samuel Daud, M.B.A. sebagai Direktur Utama PT Istana Sarana Raya dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran tipe V.80 ASM dan pembebasan bea masuknya untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia tahun 2002-2005, telah meninggal dunia.

25 Juni 2010

asli, kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran, Ambulans, *Stoom Walls*, *Dump Truck*, Mobil Tangga, *Backhoe Loader* di Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003-2004

Drs. H. Danny Setiawan, M.Si., Drs. Wahyu Kurnia, M.M., M.B.A., dan Drs. Ijuddin Budhyana, M.Si.

290. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor BP/05/23/I/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Drs. Danny Setiawan, M.Si. sebagai Gubernur Jawa Barat dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran, ambulans, *stoom walls*, *dump truck*, mobil tangga, *backhoe loader* di Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003-2004.

10 Juli 2008 - 29 Januari 2009

asli, kopi

1 jilid

291. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor BP/05/23/I/2009 berisi lampiran atas nama Drs. Danny Setiawan, M.Si. sebagai Gubernur Jawa Barat dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran, ambulans, *stoom walls*, *dump truck*, mobil tangga, *backhoe loader* di Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003-2004.

10 Juli 2008 - 29 Januari 2009

kopi

1 jilid

292. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/06/23/I/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Drs. Wahyu Kurnia, M.M., M.B.A. sebagai Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran, ambulans, *stoom walls*, *dump truck*, mobil tangga, *backhoe loader* di Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003-2004.

10 Juli 2008 - 29 Januari 2009

kopi

1 jilid

293. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/06/23/I/2009 berisi lampiran berupa Berita Acara Penyitaan, Berita Acara Penyisihan Benda Sitaan, dll. atas nama Drs. Wahyu Kurnia, M.M., M.B.A. sebagai Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran, ambulans, *stoom walls*, *dump truck*, mobil tangga, *backhoe loader* di Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003-2004.

10 Juli 2008 - 29 Januari 2009

kopi

1 jilid

294. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/06/23/I/2009 berisi lampiran berkas atas nama Drs. Wahyu Kurnia, M.M., M.B.A. sebagai Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran, ambulans, *stoom walls*, *dump truck*, mobil tangga, *backhoe loader* di Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003-2004.

10 Juli 2008 - 29 Januari 2009

kopi

1 jilid

295. Berkas penuntutan atas nama Drs. H. Danny Setiawan, M.Si. sebagai Gubernur Jawa Barat, Drs. Wahyu Kurnia, M.M., M.B.A. sebagai Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Drs. H. Ijuddin Budhyana, M.Si. sebagai Kepala Biro Pengendalian Program Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran, mobil ambulans, mobil tangga, *dump truck*, *stoom walls*, dan *backhoe loader* di Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kabupaten/kota seluruh Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 dan 2004.

19 Februari - 9 Juni 2009

asli

1 sampul

296. Nota pembelaan pribadi dan penasehat hukum pada persidangan di Pengadilan Negeri atas nama Drs. H. Danny Setiawan, M.Si. sebagai Gubernur Jawa Barat dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran, mobil ambulans, mobil tangga, *dump truck*, *stoom walls*, dan *backhoe loader* di Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kabupaten/kota seluruh Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 dan 2004.

16 Juni 2009

asli

2 jilid

297. Nota pembelaan pribadi dan penasehat hukum pada persidangan di Pengadilan Negeri atas nama Drs. Wahyu Kurnia, M.M., M.B.A. sebagai Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran, mobil ambulans, mobil tangga, *dump truck*, *stoom walls*, dan *backhoe loader* di Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kabupaten/kota seluruh Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 dan 2004.

16 Juni 2009

asli

1 sampul

298. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/07/23/I/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Drs. Ijuddin Budhyana., M.Si. sebagai Kepala Biro Pengendalian Program Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran, ambulans, *stoom walls*, *dump truck*, mobil tangga, *backhoe loader* di Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003-2004.

10 Juli 2008 - 29 Januari 2009

kopi

1 jilid

299. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor BP/06/23/I/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Drs. Ijuddin Budhyana., M.Si. sebagai Kepala Biro Pengendalian Program Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran, ambulans, *stoom walls*, *dump truck*, mobil tangga, *backhoe loader* di Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003-2004.

10 Juli 2008 - 29 Januari 2009

kopi

1 jilid

300. Nota pembelaan pribadi dan penasehat hukum pada persidangan di Pengadilan Negeri atas nama Drs. H. Ijuddin Budhyana, M.Si. sebagai Kepala Biro Pengendalian Program Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran, mobil ambulans, mobil tangga, *dump truck*, *stoom walls*, dan *backhoe loader* di Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kabupaten/kota seluruh Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 dan 2004.

16 Juni 2009

asli

2 jilid

301. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 05/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST atas nama Drs. H. Danny Setiawan, M.Si. sebagai Gubernur Jawa Barat, Drs. Wahyu Kurnia, M.M., M.B.A. sebagai Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Drs. H. Ijuddin Budhyana, M.Si. sebagai Kepala Biro Pengendalian Program Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran, mobil ambulans, mobil tangga, *dump truck*, *stoom walls*, dan *backhoe loader* di Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kabupaten/kota seluruh Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 dan 2004.

30 Juni 2009

kopi

1 sampul

302. Surat Keputusan Presiden Nomor 15/G Tahun 2010 tentang penolakan permohonan grasi terpidana tindak pidana korupsi atas nama Drs. H. Danny Setiawan, M.Si. sebagai Gubernur Jawa Barat. Disertai surat pengantar.

8 Oktober 2010

salinan, asli

6 lembar

Yusuf Setiawan

303. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/06/23/I/2009 berisi lampiran atas nama Yusuf Setiawan sebagai Direktur PT Setiajaya Mobilindo dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran, ambulans, *stoom walls*, *dump truck*, mobil tangga, *backhoe loader* pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003-2004.

10 Juli 2008 - 29 Januari 2009

kopi

1 jilid

304. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/08/23/I/2009 berisi lampiran atas nama Yusuf Setiawan sebagai Direktur PT Setiajaya Mobilindo dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran, ambulans, *stoom walls*, *dump truck*, mobil tangga, *backhoe loader* pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003-2004.

10 Juli 2008 - 29 Januari 2009

kopi

1 jilid

305. Berkas penuntutan atas nama Yusuf Setiawan sebagai Direktur PT Setiajaya Mobilindo dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran, mobil ambulans, mobil tangga, *dump truck*, *stoom walls*, dan *backhoe loader* pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kabupaten/kota seluruh Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 dan 2004.

29 Januari - 11 Juni 2009

asli

1 sampul

306. Naskah mengenai fakta-fakta persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Yusuf Setiawan sebagai Direktur PT Setiajaya Mobilindo dalam perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran, mobil ambulans, mobil tangga, *dump truck*, *stoom walls*, dan *backhoe loader* pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kabupaten/kota seluruh Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 dan 2004.

28 Mei 2005

asli

1 sampul

307. Berkas persidangan perdata pada Pengadilan Negeri dengan tergugat Juli Tukiman sebagai istri, Abed Nego sebagai putra pertama, Yacob Setiawan sebagai putra kedua, dan Lidia Margareta sebagai putri ketiga dari terdakwa atas nama Yusuf Setiawan sebagai Direktur PT Setiajaya Mobilindo dalam perkara pengadaan mobil Pemadam kebakaran, mobil ambulans, mobil tangga, *dump truck*, *stoom walls*, dan *backhoe loader* pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kabupaten/kota seluruh Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 dan 2004.

6 Januari - 30 Juni 2010

asli, kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Kabupaten Pelalawan Tahun 2001-2006

H. Tengku Azmun Jafar, S.H.

308. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-05/23/I/2008 berisi Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama H. Tengku Azmun Jaafar, S.H. sebagai Bupati Pelalawan dalam perkara penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Kabupaten Pelalawan Tahun 2001-2007.

21 Mei 2007 - 11 April 2008

kopi

1 jilid

309. Berkas penyidikan atas nama H. Tengku Azmun Jaafar, S.H. sebagai Bupati Kabupaten Pelalawan dalam perkara penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Kabupaten Pelalawan Tahun 2001-2007.

6 September 2007 - 5 Maret 2008

asli, kopi

1 sampul

310. Berkas penuntutan atas nama H. Tengku Azmun Jaafar, S.H. sebagai Bupati Kabupaten Pelalawan dalam perkara penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Kabupaten Pelalawan Tahun 2001-2007.

28 April - 26 Agustus 2008

asli, kopi

1 sampul

311. Berkas persidangan pada Mahkamah Agung atas nama H. Tengku Azmun Jaafar, S.H. sebagai Bupati Kabupaten Pelalawan dalam perkara penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Kabupaten Pelalawan Tahun 2001-2007.

2 April 2009-14 Februari 2011

asli

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pekerjaan Pemeriksaan Penggunaan Tenaga Asing/Audit Investigasi pada 46 (empat puluh enam) Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2004 di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

Marudin Saur Marulitua S.H., M.M. dan Suseno Tjipto Mantoro, S.E.

312. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/18/KPK/XI/2007 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Marudin Saur Marulitua S.H., M.M. sebagai Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Ditjen PPK Depnakertrans) dan Suseno Tjipto Mantoro, S.E. sebagai mantan atasan langsung bendaharawan Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia (DPKGTKI) Ditjen PPK Depnakertrans dalam perkara pengadaan pekerjaan pemeriksaan penggunaan tenaga asing/audit investigasi pada 46 (empat puluh enam) kabupaten/kota di Indonesia Tahun Anggaran 2004 di Ditjen PPK Depnakertrans RI.

25 Mei - 26 November 2007

kopi

1 jilid

313. Berkas penuntutan atas nama Marudin Saur Marulitua S.H., M.M. sebagai Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Ditjen PPK Depnakertrans) dan Suseno Tjipto Mantoro, S.E. sebagai mantan atasan langsung bendaharawan Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia (DPKKTKI) Ditjen PPK Depnakertrans dalam perkara pengadaan pekerjaan pemeriksaan penggunaan tenaga asing/audit investigasi pada 46 (empat puluh enam) kabupaten/kota di Indonesia Tahun Anggaran 2004 di Ditjen PPK Depnakertrans RI.

17 Desember 2007 - 8 April 2008

asli

1 sampul

314. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung atas nama Marudin Saur Marulitua S.H., M.M. sebagai Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Ditjen PPK Depnakertrans) dan Suseno Tjipto Mantoro, S.E. sebagai mantan atasan langsung bendaharawan Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia (DPKKTKI) Ditjen PPK Depnakertrans dalam perkara pengadaan pekerjaan pemeriksaan penggunaan tenaga asing/audit investigasi pada 46 (empat puluh enam) Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2004 di Ditjen PPK Depnakertrans RI.

15 April 2008 - 12 Januari 2009

asli, kopi

1 sampul

315. Putusan Mahkamah Agung mengenai peninjauan kembali atas nama Marudin Saur Marulitua S.H., M.M. sebagai Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Ditjen PPK Depnakertrans) dan Suseno Tjipto Mantoro, S.E. sebagai mantan atasan langsung bendaharawan Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia (DPKKTKI) Ditjen PPK Depnakertrans dalam perkara pengadaan pekerjaan pemeriksaan penggunaan tenaga asing/audit investigasi pada 46 (empat puluh enam) Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2004 di Ditjen PPK Depnakertrans RI.

10 Mei 2011

kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut dan Dana Bantuan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2004-2007

H. Agus Supriadi

316. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/15/KPK/XI/2007 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama H. Agus Supriadi sebagai Bupati Garut dalam perkara penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut dan dana bantuan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2004-2007.

23 Juli - 21 November 2007

kopi

1 jilid

317. Berkas penuntutan atas nama H. Agus Supriadi sebagai Bupati Garut dalam perkara penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut dan dana bantuan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2004-2007.
- 5 Desember 2007 - 11 April 2008
asli
1 sampul
318. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung atas nama H. Agus Supriadi sebagai Bupati Garut dalam perkara penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut dan dana bantuan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2004-2007.
- 14 April - 24 November 2008
asli, kopi, salinan
1 sampul
319. Berkas peninjauan kembali atas nama H. Agus Supriadi sebagai Bupati Garut dalam perkara penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut dan dana bantuan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2004-2007.
- 13 Oktober 2010- 17 Januari 2011
asli, kopi
1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Proyek Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perikanan Tangkap Pasca Gempa dan Gelombang Tsunami pada Satuan Kerja Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006

David Kurniawan Wiranata

320. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-26/23/IX/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama David Kurniawan Wiranata sebagai Direktur PT Buntala Bersaudara Daramaja dalam perkara proyek kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan gelombang tsunami terkait pengadaan mesin 15 PK sebanyak 286 unit, 25 PK sebanyak 4 unit, dan 40 PK sebanyak 1 unit, rumpon sebanyak 60 unit, bahan alat tangkap sebanyak 952 unit, dan perahu fiberglass 1 GT sebanyak 610 unit pada Satuan Kerja Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006.

26 Juli 2007 - 15 September 2008

kopi

1 jilid

321. Berkas penyidikan atas nama David Kurniawan Wiranata sebagai Direktur PT Buntala Bersaudara Daramaja dalam perkara proyek kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan gelombang tsunami terkait pengadaan mesin 15 PK sebanyak 286 unit, 25 PK sebanyak 4 unit, dan 40 PK sebanyak 1 unit, rumpon sebanyak 60 unit, bahan alat tangkap sebanyak 952 unit, dan perahu fiberglass 1 GT sebanyak 610 unit pada Satuan Kerja Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006.

26 Juli 2007 - 15 September 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul

322. Berkas penuntutan atas nama David Kurniawan Wiranata sebagai Direktur PT Buntala Bersaudara Daramaja dalam perkara proyek kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan gelombang tsunami terkait pengadaan mesin 15 PK sebanyak 286 unit, 25 PK sebanyak 4 unit, dan 40 PK sebanyak 1 unit, rumpon sebanyak 60 unit, bahan alat tangkap sebanyak 952 unit, dan perahu fiberglass 1 GT sebanyak 610 unit pada Satuan Kerja Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006.

15 September 2008 - 2 Februari 2009

asli, tembusan

1 sampul

323. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung atas nama David Kurniawan Wiranata sebagai Direktur PT Buntala Bersaudara Daramaja dalam perkara proyek kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan gelombang tsunami terkait pengadaan mesin 15 PK sebanyak 286 unit, 25 PK sebanyak 4 unit, dan 40 PK sebanyak 1 unit, rumpon sebanyak 60 unit, bahan alat tangkap sebanyak 952 unit, dan perahu fiberglass 1 GT sebanyak 610 unit pada Satuan Kerja Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006.

6 Februari - 23 Desember 2009

asli, kopi, salinan, tembusan

1 sampul

324. Berkas eksekusi dan penyitaan aset atas nama David Kurniawan Wiranata sebagai Direktur PT Buntala Bersaudara Daramaja dalam perkara proyek kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan gelombang tsunami terkait pengadaan mesin 15 PK sebanyak 286 unit, 25 PK sebanyak 4 unit, dan 40 PK sebanyak 1 unit, rumpon sebanyak 60 unit, bahan alat tangkap sebanyak 952 unit, dan perahu fiberglass 1 GT sebanyak 610 unit pada Satuan Kerja Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006.

12 Januari 2009 - 28 Mei 2012

asli, kopi

1 sampul

Asep Hartiyoman, S.Pi. dan Ir. Ade Kusumana, M.M.

325. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-19/23/VII/2008 berisi Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Asep Hartiyoman, S.Pi. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat dan Ir. Ade Kusumana, M.M. sebagai Ketua Sub Bidang Sumber Daya Alam Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat/Ketua Panitia Pengadaan Barang Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap dalam perkara proyek kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan gelombang tsunami terkait pengadaan mesin 15 PK sebanyak 286 unit, 25 PK sebanyak 4 unit, dan 40 PK sebanyak 1 unit, rumpon sebanyak 60 unit, bahan alat tangkap sebanyak 952 unit, dan perahu fiberglass 1 GT sebanyak 610 unit pada Satuan Kerja Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006.

7 Januari - 21 Juli 2008

kopi

1 jilid

326. Berkas penyidikan atas nama Asep Hartiyoman, S.Pi. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat dan Ir. Ade Kusmana, M.M. sebagai Ketua Sub Bidang Sumber Daya Alam Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat/Ketua Panitia Pengadaan Barang Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap dalam perkara proyek kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan gelombang tsunami terkait pengadaan mesin 15 PK sebanyak 286 unit, 25 PK sebanyak 4 unit, dan 40 PK sebanyak 1 unit, rumpon sebanyak 60 unit, bahan alat tangkap sebanyak 952 unit, dan perahu *fiberglass* 1 GT sebanyak 610 unit pada Satuan Kerja Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006.

18 Januari - 29 Juli 2008

asli, kopi

1 sampul

327. Berkas penuntutan atas nama Asep Hartiyoman, S.Pi. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat dan Ir. Ade Kusmana, M.M. sebagai Ketua Sub Bidang Sumber Daya Alam Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat/Ketua Panitia Pengadaan Barang Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap dalam perkara proyek kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan gelombang tsunami terkait pengadaan mesin 15 PK sebanyak 286 unit, 25 PK sebanyak 4 unit, dan 40 PK sebanyak 1 unit, rumpon sebanyak 60 unit, bahan alat tangkap sebanyak 952 unit, dan perahu *fiberglass* 1 GT sebanyak 610 unit pada Satuan Kerja Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006.

12 Agustus - 19 November 2008

asli, kopi

1 sampul

328. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Asep Hartiyoman, S.Pi. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat dan Ir. Ade Kusmana, M.M. sebagai Ketua Sub Bidang Sumber Daya Alam Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat/Ketua Panitia Pengadaan Barang Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap dalam perkara proyek kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan gelombang tsunami terkait pengadaan mesin 15 PK sebanyak 286 unit, 25 PK sebanyak 4 unit, dan 40 PK sebanyak 1 unit, rumpon sebanyak 60 unit, bahan alat tangkap sebanyak 952 unit, dan perahu *fiberglass* 1 GT sebanyak 610 unit pada Satuan Kerja Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006.

13 Agustus - 10 Desember 2008

asli, kopi, tembusan

1 sampul

329. Berkas eksekusi atas nama Asep Hartiyoman, S.Pi. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat dan Ir. Ade Kusmana, M.M. sebagai Ketua Sub Bidang Sumber Daya Alam Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat/Ketua Panitia Pengadaan Barang Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap dalam perkara proyek kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan gelombang tsunami terkait pengadaan mesin 15 PK sebanyak 286 unit, 25 PK sebanyak 4 unit, dan 40 PK sebanyak 1 unit, rumpon sebanyak 60 unit, bahan alat tangkap sebanyak 952 unit, dan perahu *fiberglass* 1 GT sebanyak 610 unit pada Satuan Kerja Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006.

23 Desember 2008 - 15 April 2009

asli, kopi

1 sampul

Hari Purnomo dan Margareth Elisabeth Tutuarima

330. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/19/KPK/XII/2007 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Hari Purnomo sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Margareth Elisabeth Tutuarima sebagai Kepala Seksi Produksi Penangkapan/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam perkara pengadaan perahu *fiberglass* 1 GT sebanyak 416 unit, mesin 15 PK sebanyak 99 unit, dan alat tangkap sebanyak 1.445 unit terkait kegiatan dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan gelombang tsunami pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2007.

26 Juli - 27 Desember 2007

asli, kopi

1 jilid

331. Berkas penyidikan atas nama Hari Purnomo sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Margareth Elisabeth Tutuarima sebagai Kepala Seksi Produksi Penangkapan/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam perkara pengadaan perahu *fiberglass* 1 GT sebanyak 416 unit, mesin 15 PK sebanyak 99 unit, dan alat tangkap sebanyak 1.445 unit terkait kegiatan dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan gelombang tsunami pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2007.

Disertai Daftar Barang Bukti.

6 Agustus 2007 - 19 Mei 2008

asli, kopi

1 sampul

332. Berkas penuntutan atas nama Hari Purnomo sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Margareth Elisabeth Tutuarima sebagai Kepala Seksi Produksi Penangkapan/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam perkara pengadaan perahu *fiberglass* 1 GT sebanyak 416 unit, mesin 15 PK sebanyak 99 unit, dan alat tangkap sebanyak 1.445 unit terkait kegiatan dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan gelombang tsunami pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2007.

9 Januari - 6 Mei 2008

asli, salinan

1 sampul

333. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Hari Purnomo sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Margareth Elisabeth Tutuarima sebagai Kepala Seksi Produksi Penangkapan/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam perkara pengadaan perahu *fiberglass* 1 GT sebanyak 416 unit, Mesin 15 PK sebanyak 99 unit, dan alat tangkap sebanyak 1.445 unit terkait kegiatan dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan gelombang tsunami pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2007.

13 Mei - 22 Mei 2008

asli, salinan

1 sampul

334. Berkas persidangan pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas nama Hari Purnomo sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Margareth Elisabeth Tutuarima sebagai Kepala Seksi Produksi Penangkapan/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam perkara pengadaan perahu fiberglass 1 GT sebanyak 416 unit, mesin 15 PK sebanyak 99 unit, dan alat tangkap sebanyak 1.445 unit terkait kegiatan dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan gelombang tsunami pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2007.

26 Mei 2008 - 12 Januari 2009

asli, kopi, salinan

1 sampul

335. Berkas eksekusi dan penyitaan aset atas nama Hari Purnomo sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Margareth Elisabeth Tutuarima sebagai Kepala Seksi Produksi Penangkapan/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam perkara pengadaan perahu *fiberglass* 1 GT sebanyak 416 unit, mesin 15 PK sebanyak 99 unit, dan alat tangkap sebanyak 1.445 unit terkait kegiatan dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan gelombang tsunami pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2007.

13 April 2009 - 19 Maret 2011

asli, salinan

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Peningkatan Fasilitas Mesin dan Peralatan Pelatihan sebagai Tempat Uji Kompetensi untuk Balai Latihan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (BLK/UPT) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Dalam Negeri (Binapendagri/PPTKDN) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun Anggaran 2004

Drs. Bachrun Effendi

336. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/32/23/XI/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Drs. Bachrun Effendi sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Dalam Negeri (Binapendagri/PPTKDN) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Depnakertrans RI) dalam perkara pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan pelatihan sebagai tempat uji kompetensi untuk Balai Latihan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (BLK/UPT) Semarang, Serang, dan Lembang yang dananya bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Kegiatan-Suplemen (ABT DIK-S) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Dalam Negeri (Binapendagri/PPTKDN) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun Anggaran 2004.

13 September 2007 - 5 November 2008

kopi

1 jilid

337. Berkas penuntutan atas nama Drs. Bachrun Effendi sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Dalam Negeri (Binapendagri/PPTKDN) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Depnakertrans RI) dalam perkara pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan pelatihan sebagai tempat uji kompetensi untuk Balai Latihan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (BLK/UPT) Semarang, Serang, dan Lembang yang dananya bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Kegiatan-Suplemen (ABT DIK-S) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Dalam Negeri (Binapendagri/PPTKDN) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun Anggaran 2004.

1 Desember 2008 - 31 Maret 2009

asli, konsep

1 sampul

338. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Drs. Bachrun Effendi sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Dalam Negeri (Binapendagri/PPTKDN) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Depnakertrans RI) dalam perkara pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan pelatihan sebagai tempat uji kompetensi untuk Balai Latihan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (BLK/UPT) Semarang, Serang, dan Lembang yang dananya bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Kegiatan-Suplemen (ABT DIK-S) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Dalam Negeri (Binapendagri/PPTKDN) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun Anggaran 2004.

25 Maret - 15 April 2009

asli, kopi

1 sampul

Vaylana Dharmawan

339. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/32/23/XI/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Vaylana Dharmawan sebagai Direktur PT Suryantara Purna Wibawa dalam perkara pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan pelatihan sebagai tempat uji kompetensi untuk Balai Latihan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (BLK/UPT) Semarang, Serang, dan Lembang yang dananya bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Kegiatan-Suplemen (ABT DIK-S) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Dalam Negeri (Binapendagri/PPTKDN) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun Anggaran 2004.

13 September 2007 - 5 November 2008

kopi

1 jilid

340. Berkas penuntutan atas nama Vaylana Dharmawan sebagai Direktur PT Suryantara Purna Wibawa dalam perkara pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan pelatihan sebagai tempat uji kompetensi untuk Balai Latihan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (BLK/UPT) Semarang, Serang, dan Lembang yang dananya bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Kegiatan-Suplemen (ABT DIK-S) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Dalam Negeri (Binapendagri/PPTKDN) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun Anggaran 2004.

28 November 2008 - 24 Februari 2009

asli

1 sampul

341. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Vaylana Dharmawan sebagai Direktur PT Suryantara Purna Wibawa dalam perkara pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan pelatihan sebagai tempat uji kompetensi untuk Balai Latihan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (BLK/UPT) Semarang, Serang, dan Lembang yang dananya bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Kegiatan-Suplemen (ABT DIK-S) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Dalam Negeri (Binapendagri/PPTKDN) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun Anggaran 2004.

3 - 24 Maret 2009

asli, kopi, salinan

1 sampul

342. Surat dari Penuntut Umum KPK kepada Ketua Mahkamah Agung RI mengenai kontra memori peninjauan kembali atas nama Vaylana Dharmawan sebagai Direktur PT Suryantara Purna Wibawa dalam perkara pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan pelatihan sebagai tempat uji kompetensi untuk Balai Latihan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (BLK/UPT) Semarang, Serang, dan Lembang yang dananya bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Kegiatan-Suplemen (ABT DIK-S) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Dalam Negeri (Binapendagri/PPTKDN) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun Anggaran 2004.

10 November 2009

asli

1 sampul

H. KGS. Taswin Zein, S.E., M.M.

343. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-17/23/V/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama H. KGS. Taswin Zein, S.E., M.M. sebagai Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem dan Inovasi Direktorat Produktivitas Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI/Pemimpin Proyek Pengembangan Sistem Pelatihan dan Pemagangan pada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dalam perkara proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan yang dananya bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Proyek (ABT DIP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2004 dan pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan pelatihan sebagai tempat uji kompetensi untuk Balai Latihan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (BLK/UPT) Semarang, Serang, dan Lembang yang dananya bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Kegiatan-Suplemen (ABT DIK-S) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Dalam Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun Anggaran 2004.

13 September 2007 - 18 Juni 2008

kopi

1 jilid

344. Berkas penuntutan atas nama H. KGS. Taswin Zein, S.E, M.M. sebagai Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem dan Inovasi Direktorat Produktivitas Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI/Pemimpin Proyek Pengembangan Sistem Pelatihan dan Pemagangan pada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dalam perkara proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan yang dananya bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Proyek (ABT DIP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2004 dan pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan pelatihan sebagai tempat uji kompetensi untuk Balai Latihan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (BLK/UPT) Semarang, Serang, dan Lembang yang dananya bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Kegiatan-Suplemen (ABT DIK-S) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Dalam Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun Anggaran 2004.

31 Juli - 27 November 2008

asli, kopi

1 sampul

345. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama H. KGS. Taswin Zein, S.E., M.M. sebagai Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem dan Inovasi Direktorat Produktivitas Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI/Pemimpin Proyek Pengembangan Sistem Pelatihan dan Pemagangan pada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dalam perkara proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan yang dananya bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Proyek (ABT DIP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2004 dan pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan pelatihan sebagai tempat uji kompetensi untuk Balai Latihan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (BLK/UPT) Semarang, Serang, dan Lembang yang dananya bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Kegiatan-Suplemen (ABT DIK-S) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Dalam Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun Anggaran 2004.

4 - 11 Desember 2008

asli, kopi

1 sampul

346. Berkas peninjauan kembali atas nama H. KGS. Taswin Zein, S.E, M.M. sebagai Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem dan Inovasi Direktorat Produktivitas Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI/Pemimpin Proyek Pengembangan Sistem Pelatihan dan Pemagangan pada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dalam perkara proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan yang dananya bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Proyek (ABT DIP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2004 dan pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan pelatihan sebagai tempat uji kompetensi untuk Balai Latihan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (BLK/UPT) Semarang, Serang, dan Lembang yang dananya bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Kegiatan-Suplemen (ABT DIK-S) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Dalam Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun Anggaran 2004.

16 Februari 2008 - 9 Juni 2010

asli, kopi

1 sampul

Karnawi

347. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/37/23/XII/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Karnawi sebagai Direktur Utama PT Panton Pauh Putra dalam perkara pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan pelatihan sebagai tempat uji kompetensi untuk Balai Latihan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (BLK/UPT) Banda Aceh dan Medan yang dananya bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Kegiatan-Suplemen (ABT DIK-S) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Dalam Negeri (Binapendagri/PPTKDN) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun Anggaran 2004.

13 September 2007 - 24 Desember 2008

kopi

1 jilid

348. Berkas penuntutan atas nama Karnawi sebagai Direktur Utama PT Panton Pauh Putra dalam perkara pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan pelatihan sebagai tempat uji kompetensi untuk Balai Latihan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (BLK/UPT) Banda Aceh dan Medan yang dananya bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Kegiatan-Suplemen (ABT DIK-S) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Dalam Negeri (Binapendagri/PPTKDN) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun Anggaran 2004.

23 Januari - 13 April 2009

asli

1 sampul

349. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Karnawi sebagai Direktur Utama PT Panton Pauh Putra dalam perkara pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan pelatihan sebagai tempat uji kompetensi untuk Balai Latihan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (BLK/UPT) Banda Aceh dan Medan yang dananya bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Kegiatan-Suplemen (ABT DIK-S) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Dalam Negeri (Binapendagri/PPTKDN) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun Anggaran 2004.

27 April - 18 Mei 2009

asli, kopi, salinan

1 sampul

Ines Wulanari Setyawati

350. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/2/23/I/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Ines Wulanari Setyawati sebagai Direktris PT Gita Vidya Utama dalam perkara pemberian sejumlah uang kepada H. KGS. Taswin Zein, S.E., M.M. dan Drs. Bachrun Effendi terkait pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan pelatihan sebagai tempat uji kompetensi untuk Balai Latihan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (BLK/UPT) Makassar, Ternate dan Samarinda yang dananya bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Kegiatan-Suplemen (ABT DIK-S) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Dalam Negeri (Binapendagri/PPTKDN) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun Anggaran 2004.

13 September 2007 - 8 Januari 2009

kopi

1 jilid

351. Berkas penuntutan atas nama Ines Wulanari Setyawati sebagai Direktris PT Gita Vidya Utama dalam perkara pemberian sejumlah uang kepada H. KGS. Taswin Zein, S.E., M.M. dan Drs. Bachrun Effendi terkait pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan pelatihan sebagai tempat uji kompetensi untuk Balai Latihan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (BLK/UPT) Makassar, Ternate dan Samarinda yang dananya bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Kegiatan-Suplemen (ABT DIK-S) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Dalam Negeri (Binapendagri/PPTKDN) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun Anggaran 2004.

22 Januari - 6 Mei 2009

asli

1 sampul

352. Nota pembelaan pada persidangan di Pengadilan Negeri atas nama Ines Wulanari Setyawati sebagai Direktris PT Gita Vidya Utama dalam perkara pemberian sejumlah uang kepada H. KGS. Taswin Zein, S.E., M.M. dan Drs. Bachrun Effendi terkait pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan pelatihan sebagai tempat uji kompetensi untuk Balai Latihan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (BLK/UPT) Makassar, Ternate dan Samarinda yang dananya bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Kegiatan-Suplemen (ABT DIK-S) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Dalam Negeri (Binapendagri/PPTKDN) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun Anggaran 2004.

18 Mei 2009

asli

1 sampul

Mulyono Subroto

353. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/4/20/I/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Mulyono Subroto sebagai Direktur PT Mulindo Agung Trikarsa dalam perkara pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan untuk pengadaan alat bengkel/keterampilan di 12 lokasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dan pondok pesantren yang dananya bersumber dari Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Daftar Isian Proyek (DIP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2004 dan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan pelatihan sebagai tempat uji kompetensi untuk Balai Latihan Kerja (BLK)/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Palembang dan Pekanbaru yang dananya bersumber dari Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Daftar Isian Kegiatan-Suplemen (DIK-S) Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan-Tenaga Kerja Indonesia (DPKK-TKI) Tahun Anggaran 2004 pada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

13 September 2007 - 30 Januari 2009

kopi

1 jilid

354. Berkas penuntutan atas nama Mulyono Subroto sebagai Direktur PT Mulindo Agung Trikarsa dalam perkara pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan untuk pengadaan alat bengkel/keterampilan di 12 lokasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dan pondok pesantren yang dananya bersumber dari Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Daftar Isian Proyek (DIP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2004 dan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan pelatihan sebagai tempat uji kompetensi untuk Balai Latihan Kerja (BLK)/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Palembang dan Pekanbaru yang dananya bersumber dari Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Daftar Isian Kegiatan-Suplemen (DIK-S) Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan-Tenaga Kerja Indonesia (DPKK-TKI) Tahun Anggaran 2004 pada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

24 Februari - 2 Juli 2009

asli

1 sampul

355. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung atas nama Mulyono Subroto sebagai Direktur PT Mulindo Agung Trikarsa dalam perkara pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan untuk pengadaan alat bengkel/keterampilan di 12 lokasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dan pondok pesantren yang dananya bersumber dari Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Daftar Isian Proyek (DIP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2004 dan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan pelatihan sebagai tempat uji kompetensi untuk Balai Latihan Kerja (BLK)/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Palembang dan Pekanbaru yang dananya bersumber dari Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Daftar Isian Kegiatan-Suplemen (DIK-S) Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan-Tenaga Kerja Indonesia (DPKK-TKI) Tahun Anggaran 2004 pada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

12 Juli 2009 - 31 Maret 2010

asli, kopi

1 sampul

Erry Fuad

356. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/03/23/I/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Erry Fuad sebagai Direktur CV Dareta dalam perkara pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan untuk pengadaan alat bengkel/keterampilan di 7 Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) yang dananya bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Proyek (ABT DIP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2004 pada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

13 September 2007 - 30 Januari 2009

kopi

1 jilid

357. Surat dakwaan atas nama Erry Fuad sebagai Direktur CV Dareta dalam perkara pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan untuk pengadaan alat bengkel/keterampilan di 7 Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) yang dananya bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Proyek (ABT DIP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2004 pada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

26 Februari 2009

asli

1 sampul

358. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung atas nama Erry Fuad sebagai Direktur CV Dareta dalam perkara pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan untuk pengadaan alat bengkel/keterampilan di 7 Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) yang dananya bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Proyek (ABT DIP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2004 pada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

12 Juni 2009 - 8 Februari 2010

asli, kopi

1 sampul

Bagindo Quirinno, M.Acc., CMA, CFM, CIA

359. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/13/23/IV/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll atas nama Bagindo Quirinno, M.Acc, CMA, CFM, CIA. sebagai Ketua Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Staf Evaluasi Pelaporan Pemeriksaan (EPP) Kinerja BPK RI dalam perkara penerimaan suap terkait pemeriksaan terhadap penggunaan Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (DPKK) Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Kegiatan Suplemen (ABT DIKS) Tahun Anggaran 2004 dan pemeriksaan atas Proyek Pengembangan Sistem Pelatihan dan Pemagangan Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Proyek (ABT DIP) Tahun 2004 pada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Ditjen PPTKDN/Binapendagri) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

13 September 2007 - 21 April 2009

kopi

1 jilid

360. Berkas penuntutan atas nama Bagindo Quirinno, M.Acc., CMA, CFM, CIA sebagai Ketua Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Staf Evaluasi Pelaporan Pemeriksaan (EPP) Kinerja BPK RI dalam perkara penerimaan suap terkait pemeriksaan terhadap penggunaan Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (DPKK) Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Kegiatan Suplemen (ABT DIKS) Tahun Anggaran 2004 dan pemeriksaan atas Proyek Pengembangan Sistem Pelatihan dan Pemagangan Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Proyek (ABT DIP) Tahun 2004 pada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Ditjen PPTKDN/Binapendagri) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

11 Mei - 9 September 2009

asli

1 sampul

361. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung atas nama Bagindo Quirinno, M.Acc., CMA, CFM, CIA sebagai Ketua Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Staf Evaluasi Pelaporan Pemeriksaan (EPP) Kinerja BPK RI dalam perkara penerimaan suap terkait pemeriksaan terhadap penggunaan Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (DPKK) Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Kegiatan Suplemen (ABT DIKS) Tahun Anggaran 2004 dan pemeriksaan atas Proyek Pengembangan Sistem Pelatihan dan Pemagangan Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Proyek (ABT DIP) Tahun 2004 pada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Ditjen PPTKDN/Binapendagri) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

16 September 2009 - 4 Mei 2010

asli, kopi

1 sampul

362. Berkas peninjauan kembali atas nama Bagindo Quirinno, M.Acc., CMA, CFM, CIA sebagai Ketua Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Staf Evaluasi Pelaporan Pemeriksaan (EPP) Kinerja BPK RI dalam perkara penerimaan suap terkait pemeriksaan terhadap penggunaan Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (DPKK) Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Kegiatan Suplemen (ABT DIKS) Tahun Anggaran 2004 dan pemeriksaan atas Proyek Pengembangan Sistem Pelatihan dan Pemagangan Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Proyek (ABT DIP) Tahun 2004 pada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Ditjen PPTKDN/Binapendagri) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

27 Desember 2010 - 25 Agustus 2011

asli, kopi

1 sampul

**Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gedung
Komisi Yudisial Republik Indonesia di Jakarta Tahun 2007**

H. M. Irawady Joenoos, S.H.

363. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-16/P.KPK/XI/2007 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama H. M. Irawady Joenoos, S.H. sebagai Anggota Komisi Yudisial RI dalam perkara penerimaan sejumlah uang dari Freddy Santoso (pemilik tanah) terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Gedung Komisi Yudisial RI di Jakarta tahun 2007.

26 September - 16 November 2007

kopi

1 jilid

364. Berkas penuntutan atas nama H. M. Irawady Joenoes, S.H. sebagai Anggota Komisi Yudisial RI dalam perkara penerimaan sejumlah uang dari Freddy Santoso (pemilik tanah) terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Gedung Komisi Yudisial RI di Jakarta tahun 2007.

30 November 2007 - 22 Februari 2008

asli

1 sampul

365. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung atas nama H. M. Irawady Joenoes, S.H. sebagai Anggota Komisi Yudisial RI dalam perkara penerimaan sejumlah uang dari Freddy Santoso (pemilik tanah) terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Gedung Komisi Yudisial RI di Jakarta tahun 2007.

3 Maret 2008 - 14 November 2008

asli, kopi, salinan

1 sampul

366. Putusan peninjauan kembali atas nama H. M. Irawady Joenoes, S.H. sebagai Anggota Komisi Yudisial RI dalam perkara penerimaan sejumlah uang dari Freddy Santoso (pemilik tanah) terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Gedung Komisi Yudisial RI di Jakarta tahun 2007.

18 Maret 2010

kopi

1 sampul

367. Berkas eksekusi atas nama H. M. Irawady Joenoes, S.H. sebagai Anggota Komisi Yudisial RI dalam perkara penerimaan sejumlah uang dari Freddy Santoso (pemilik tanah) terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Gedung Komisi Yudisial RI di Jakarta tahun 2007.

15 April 2010 - 25 Maret 2011

asli, kopi, salinan

1 sampul

Freddy Santoso

368. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-17/P.KPK/XI/2007 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Freddy Santoso sebagai pemilik tanah Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat dalam perkara pemberian sejumlah uang kepada H. M. Irawady Joenoes, S.H. terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Gedung Komisi Yudisial RI di Jakarta tahun 2007.

26 September - 16 November 2007

kopi

1 jilid

369. Berkas penuntutan atas nama Freddy Santoso sebagai pemilik tanah Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat dalam perkara pemberian sejumlah uang kepada H. M. Irawady Joenoes, S.H. terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Gedung Komisi Yudisial RI di Jakarta tahun 2007.

30 November 2007 - 1 Februari 2008

asli, kopi

1 sampul

370. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung atas nama Freddy Santoso sebagai pemilik tanah Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat dalam perkara pemberian sejumlah uang kepada H. M. Irawady Joenoes, S.H. terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Gedung Komisi Yudisial RI di Jakarta tahun 2007.

11 Februari - 14 November 2008

asli, kopi, salinan

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2002 – 2006

Drs. Abdillah, Ak., M.B.A.

371. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-08/23/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Drs. Abdillah, Ak., M.B.A sebagai Wali Kota Medan dalam perkara penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2002-2006.

11 Oktober 2007 - 29 April 2008

kopi

1 jilid

Dr. Drs. Ramli, M.M.

372. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/11/23/IV/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Dr. Drs. Ramli, M.M. sebagai Wakil Wali Kota Medan dalam perkara penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2002-2006.

11 Oktober 2007 - 30 April 2008

kopi

1 jilid

**Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2006**

Ir. Daud Solleman Betawi

373. Berkas penyelidikan atas nama Ir. Daud Solleman Betawi sebagai Bupati Kabupaten Yapen Waropen Periode 2005-2010 dalam perkara penyalahgunaan pengelolaan keuangan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2006 terkait penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) untuk digunakan bagi pembiayaan kegiatan yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pengeluaran dana tanpa bukti dukung yang lengkap dan sah dari rekening kas Sekretariat Daerah Kabupaten Yapen Waropen.

Nb. Akses tertutup.

24 November 2007 - 24 Desember 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul

374. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-34/23/XI/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Ir. Daud Solleman Betawi sebagai Bupati Kabupaten Yapen Waropen Periode 2005-2010 dalam perkara penyalahgunaan pengelolaan keuangan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2006 terkait penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) untuk digunakan bagi pembiayaan kegiatan yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pengeluaran dana tanpa bukti dukung yang lengkap dan sah dari rekening kas Sekretariat Daerah Kabupaten Yapen Waropen.

3 April - 20 November 2008

kopi

1 jilid

375. Berkas penuntutan atas nama Ir. Daud Solleman Betawi sebagai Bupati Kabupaten Yapen Waropen Periode 2005-2010 dalam perkara penyalahgunaan pengelolaan keuangan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2006 terkait penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) untuk digunakan bagi pembiayaan kegiatan yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pengeluaran dana tanpa bukti dukung yang lengkap dan sah dari rekening kas Sekretariat Daerah Kabupaten Yapen Waropen.

4 Desember 2008 - 8 April 2009

asli, kopi

1 sampul

376. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung atas nama Ir. Daud Solleman Betawi sebagai Bupati Kabupaten Yapen Waropen Periode 2005-2010 dalam perkara penyalahgunaan pengelolaan keuangan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2006 terkait penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) untuk digunakan bagi pembiayaan kegiatan yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pengeluaran dana tanpa bukti dukung yang lengkap dan sah dari rekening kas Sekretariat Daerah Kabupaten Yapen Waropen.

14 April - 18 November 2009

asli, kopi, tembusan

1 sampul

377. Berkas eksekusi atas nama Ir. Daud Solleman Betawi sebagai Bupati Kabupaten Yapen Waropen Periode 2005-2010 dalam perkara penyalahgunaan pengelolaan keuangan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2006 terkait penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) untuk digunakan bagi pembiayaan kegiatan yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pengeluaran dana tanpa bukti dukung yang lengkap dan sah dari rekening kas Sekretariat Daerah Kabupaten Yapen Waropen.

17 November 2009 - 17 Juni 2011

asli, kopi, konsep

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Penyerahan Aset oleh Pemegang Saham Bank Penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

Sjamsul Nursalim

378. Surat-surat mengenai permintaan keterangan atas nama Sjamsul Nursalim sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara penyerahan aset oleh pemegang saham bank penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

30 November 2007 - 15 Januari 2008

kopi

5 lembar

Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta Tahun Anggaran 2004

Drs. H. A. Chalik Saleh, M.M.

379. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-13/23/VI/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Drs. H. A. Chalik Saleh, M.M. sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jambi dalam perkara penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta tahun anggaran 2004.

18 Desember 2007 - 4 Juni 2008

kopi

1 jilid

380. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-13/23/VI/2008 berisi lampiran barang bukti atas nama Drs. H. A. Chalik Saleh, M.M. sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jambi dalam perkara penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta tahun anggaran 2004.

18 Desember 2007 - 4 Juni 2008

kopi

1 jilid

381. Berkas penuntutan atas nama Drs. H. A. Chalik Saleh, M.M. sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jambi dalam perkara penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta tahun anggaran 2004.

25 Juni - 10 September 2008

asli

1 sampul

382. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Drs. H. A. Chalik Saleh, M.M. sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jambi dalam perkara penyalahgunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta tahun anggaran 2004.

17 September-15 Oktober 2008

asli, kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bank Indonesia (BI) yang Dikelola oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) Tahun 2003

Ir. Burhanuddin Abdullah, M.A.

383. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/14/23/V/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Ir. Burhanuddin Abdullah, M.A. sebagai Gubernur Bank Indonesia/Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam perkara penyalahgunaan dana Bank Indonesia (BI) yang dikelola oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tahun 2003.

25 Januari - 15 Mei 2008

kopi

1 jilid

384. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/14/23/V/2008 berisi lampiran berkas perkara atas nama Ir. Burhanuddin Abdullah, M.A. sebagai Gubernur Bank Indonesia/Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam perkara penyalahgunaan dana Bank Indonesia (BI) yang dikelola oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tahun 2003.

25 Januari - 15 Mei 2008

kopi

1 jilid

385. Surat dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Direktur Kepatuhan PT Bank Danamon mengenai pemblokiran rekening atas nama Ir. Burhanuddin Abdullah, M.A. sebagai Gubernur Bank Indonesia/Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam perkara penyalahgunaan dana Bank Indonesia (BI) yang dikelola oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tahun 2003.

12 Maret 2008

asli, kopi

4 lembar

386. Berkas penuntutan atas nama Ir. Burhanuddin Abdullah, M.A. sebagai Gubernur Bank Indonesia/Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam perkara penyalahgunaan dana Bank Indonesia (BI) yang dikelola oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tahun 2003.

16 Juni - 8 Oktober 2008

asli

1 sampul

387. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Ir. Burhanuddin Abdullah, M.A. sebagai Gubernur Bank Indonesia/Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam perkara penyalahgunaan dana Bank Indonesia (BI) yang dikelola oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tahun 2003.

15 - 29 Oktober 2008

kopi, salinan

1 sampul

388. Berkas persidangan pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas nama Ir. Burhanuddin Abdullah, M.A. sebagai Gubernur Bank Indonesia/Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam perkara penyalahgunaan dana Bank Indonesia (BI) yang dikelola oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tahun 2003.

13 November 2008 - 17 April 2009

asli, kopi

1 sampul

389. Berkas eksekusi atas nama Ir. Burhanuddin Abdullah, M.A. sebagai Gubernur Bank Indonesia/Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam perkara penyalahgunaan dana Bank Indonesia (BI) yang dikelola oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tahun 2003.

31 Agustus-22 Oktober 2009

asli, kopi

1 sampul

Aulia Thantawi Pohan, Bun Bunan E.J. Hutapea, Aslim Tadjuddin, dan Maman Husein

390. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-41/23/XII/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Aulia Thantawi Pohan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia/Ketua Dewan Pengawas Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI), Maman Husen Somantri sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia/Wakil Ketua YLPPI dan berubah menjadi Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), Bun Bun E.J. Hutapea sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan Aslim Tadjuddin sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dalam perkara penyalahgunaan dana Bank Indonesia (BI) yang dikelola oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tahun 2003.

25 Januari - 19 Desember 2008

kopi

1 jilid

391. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-41/23/XII/2008 berisi lampiran berkas perkara atas nama Aulia Thantawi Pohan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia/Ketua Dewan Pengawas Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI), Maman Husen Somantri sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia/Wakil Ketua YLPPI dan berubah menjadi Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), Bun Bun E.J. Hutapea sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan Aslim Tadjuddin sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dalam perkara penyalahgunaan dana Bank Indonesia (BI) yang dikelola oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tahun 2003.

25 Januari - 19 Desember 2008

kopi

1 jilid

392. Berkas penuntutan atas nama Aulia Thantawi Pohan sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia/Ketua Dewan Pengawas Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI), Maman Husen Somantri sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia/Wakil Ketua YLPPI dan berubah menjadi Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), Bun Bun E. J. Hutapea sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia, dan Aslim Tadjuddin sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam perkara penyalahgunaan dana Bank Indonesia yang dikelola oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tahun 2003.

20 Januari - 2 Juni 2009

asli, kopi

1 sampul

393. Nota pembelaan pada persidangan Pengadilan Negeri atas nama Aulia Thantawi Pohan sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia/Ketua Dewan Pengawas Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI), Maman Husen Somantri sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia/Wakil Ketua YLPPI dan berubah menjadi Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), Bun Bun E.J. Hutapea sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia, dan Aslim Tadjuddin sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia dalam perkara penyalahgunaan dana Bank Indonesia (BI) yang dikelola oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tahun 2003.

12 Juni 2009

asli, konsep

1 sampul

394. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Aulia Thantawi Pohan sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia/Ketua Dewan Pengawas Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPI), Maman Husen Somantri sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia/Wakil Ketua YLPI dan berubah menjadi Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPI), Bun Bun E.J. Hutapea sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia, dan Aslim Tadjuddin sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam perkara penyalahgunaan dana Bank Indonesia yang dikelola oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPI) tahun 2003.

12 - 17 Juni 2009

asli, kopi

1 sampul

395. Berkas persidangan pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas nama Aulia Thantawi Pohan sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia/Ketua Dewan Pengawas Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPI), Maman Husen Somantri sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia/Wakil Ketua YLPI dan berubah menjadi Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPI), Bun Bun E.J. Hutapea sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia, dan Aslim Tadjuddin sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia dalam perkara penyalahgunaan dana Bank Indonesia (BI) yang dikelola oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPI) tahun 2003.

23 Juli 2009 - 15 Maret 2010

asli, kopi

1 sampul

396. Berita Acara Pengembalian Barang Bukti atas nama Aulia Thantawi Pohan sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia/Ketua Dewan Pengawas Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPPI), Maman Husen Somantri sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia/Wakil Ketua YLPPPI dan berubah menjadi Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), Bun Bun E.J. Hutapea sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia, dan Aslim Tadjuddin sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia dalam perkara penyalahgunaan dana Bank Indonesia (BI) yang dikelola oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tahun 2003.

10 Juni 2010

asli

2 lembar

Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak

397. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor BP/14/23/VI/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Oey Hoey Tiong sebagai Deputy Direktur pada Direktorat Hukum Bank Indonesia dan Rusli Simanjuntak sebagai Kepala Biro pada Biro Gubernur Bank Indonesia dalam perkara penyalahgunaan dana Bank Indonesia (BI) yang dikelola oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tahun 2003.

25 Januari - 1 Juni 2008

kopi

1 jilid

398. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/15/23/IV/2008 berisi lampiran berkas perkara atas nama Oey Hoey Tiong sebagai Deputi Direktur pada Direktorat Hukum Bank Indonesia dan Rusli Simanjuntak sebagai Kepala Biro pada Biro Gubernur Bank Indonesia dalam perkara penyalahgunaan dana Bank Indonesia (BI) yang dikelola oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tahun 2003.

25 Januari - 11 Juni 2008

kopi

1 jilid

399. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/15/23/IV/2008 berisi lampiran berkas perkara atas nama Oey Hoey Tiong sebagai Deputi Direktur pada Direktorat Hukum Bank Indonesia dan Rusli Simanjuntak sebagai Kepala Biro pada Biro Gubernur Bank Indonesia dalam perkara penyalahgunaan dana Bank Indonesia (BI) yang dikelola oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tahun 2003.

25 Januari - 11 Juni 2008

kopi

1 jilid

400. Berkas penuntutan atas nama Oey Hoey Tiong sebagai Deputi Direktur pada Direktorat Hukum Bank Indonesia dan Rusli Simanjuntak sebagai Kepala Biro pada Biro Gubernur Bank Indonesia dalam perkara penyalahgunaan dana Bank Indonesia (BI) yang dikelola oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tahun 2003.

26 Juni - 5 November 2008

asli

1 sampul

401. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Oey Hoey Tiong sebagai Deputi Direktur pada Direktorat Hukum Bank Indonesia dan Rusli Simanjuntak sebagai Kepala Biro pada Biro Gubernur Bank Indonesia dalam perkara penyalahgunaan dana Bank Indonesia (BI) yang dikelola oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tahun 2003.

3 - 12 November 2008

asli, kopi, salinan

1 sampul

402. Berkas persidangan pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas nama Oey Hoey Tiong sebagai Deputi Direktur pada Direktorat Hukum Bank Indonesia dan Rusli Simanjuntak sebagai Kepala Biro pada Biro Gubernur Bank Indonesia dalam perkara penyalahgunaan dana Bank Indonesia (BI) yang dikelola oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tahun 2003.

18 Desember 2008 - 26 Agustus 2009

asli, kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Suap Terkait Penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Hamka Yamdhu Y.R., S.E. dan Antony Zeidra Abidin

403. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-23/23/VIII/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Hamka Yamdhu Y.R., S.E. dan Antony Zeidra Abidin sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam perkara penerimaan suap terkait penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) secara politis dan amendemen Undang-Undang Bank Indonesia Tahun 2003.

25 Januari - 4 Agustus 2008

kopi

1 jilid

404. Berkas penyidikan atas nama Hamka Yamdhu Y. R., S.E. dan Antony Zeidra Abidin sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam perkara penerimaan suap terkait penyelesaian Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) secara politis dan amendemen Undang-Undang Bank Indonesia (BI) Tahun 2003.

21 April - 29 Juli 2008

kopi

1 sampul

405. Berkas penuntutan atas nama Hamka Yamdhu Y. R., S.E. dan Antony Zeidra Abidin sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam perkara penerimaan suap terkait penyelesaian Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) secara politis dan amendemen Undang-Undang Bank Indonesia (BI) Tahun 2003.

25 Agustus - 10 Desember 2008

kopi

1 sampul

406. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Hamka Yamdhu Y. R., S.E. dan Antony Zeidra Abidin sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam perkara penerimaan suap terkait penyelesaian Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) secara politis dan amendemen Undang-Undang Bank Indonesia (BI) Tahun 2003.

5 September 2008 - 7 Januari 2009

asli, kopi

1 sampul

407. Berkas persidangan pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas nama Hamka Yamdhu Y. R., S.E. sebagai dan Antony Zeidra Abidin sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam perkara penerimaan suap terkait penyelesaian Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) secara politis dan amendemen Undang-Undang Bank Indonesia (BI) Tahun 2003.

30 Januari - 18 Agustus 2009

asli, kopi

1 sampul

408. Berkas eksekusi atas nama Hamka Yamdhu Y. R., S.E. sebagai dan Antony Zeidra Abidin sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam perkara penerimaan suap terkait penyelesaian Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) secara politis dan amendemen Undang-Undang Bank Indonesia (BI) Tahun 2003.

15 April 2009 - 6 Mei 2010

asli, kopi

1 sampul

Artalyta Suryani

409. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-06/23/IV/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Artalyta Suryani sebagai Ibu Rumah Tangga dalam perkara pemberian suap kepada Urip Tri Gunawan, S.H. sebagai Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI terkait penyelidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

2 Maret - 21 April 2008

kopi

1 jilid

410. Berkas penyelidikan atas nama Artalyta Suryani sebagai Ibu Rumah Tangga dalam perkara pemberian suap kepada Urip Tri Gunawan, S.H. sebagai Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI terkait penyelidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Nb. Akses Tertutup.

3 Maret - 15 Mei 2008

asli, kopi

1 sampul

411. Berkas penuntutan atas nama Artalyta Suryani sebagai Ibu Rumah Tangga dalam perkara pemberian suap kepada Urip Tri Gunawan, S.H. sebagai Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI terkait penyelidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

8 Mei - 7 Juli 2008

asli, kopi

1 sampul

412. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung atas nama Artalyta Suryani sebagai Ibu Rumah Tangga dalam perkara pemberian suap kepada Urip Tri Gunawan, S.H. sebagai Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI terkait penyelidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

19 Mei 2008 - 13 Maret 2009

asli, kopi

1 sampul

413. Berkas peninjauan kembali atas nama Artalyta Suryani sebagai Ibu Rumah Tangga dalam perkara pemberian suap kepada Urip Tri Gunawan, S.H. sebagai Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI terkait penyelidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

6 Agustus 2009 - 21 April 2010

asli, kopi

1 sampul

414. Berkas eksekusi dan penyitaan aset atas nama Artalyta Suryani sebagai Ibu Rumah Tangga dalam perkara pemberian suap kepada Urip Tri Gunawan, S.H. sebagai Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI terkait penyelidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

18 Maret 2009 - 22 Juli 2010

asli, tembusan, kopi

1 sampul

Urip Tri Gunawan, S.H.

415. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-12/23/V/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll atas nama Urip Tri Gunawan, S.H. sebagai Jaksa/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Ekonomi Direktorat Penyidikan Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI dalam perkara penerimaan suap dari Artalyta Suryani terkait proses penyelidikan Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

2 Maret - 26 Mei 2008

kopi

1 jilid

416. Berkas penyelidikan atas nama Urip Tri Gunawan, S.H. sebagai Jaksa/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Ekonomi Direktorat Penyidikan Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI dalam perkara penerimaan suap dari Artalyta Suryani terkait proses penyelidikan Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Nb. Akses tertutup.

2 Maret 2008

asli, kopi

1 sampul

417. Berkas penyidikan atas nama Urip Tri Gunawan, S.H. sebagai Jaksa/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Ekonomi Direktorat Penyidikan Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI dalam perkara penerimaan suap dari Artalyta Suryani terkait proses penyelidikan Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
3 Maret - 24 Maret 2008
asli, kopi
4 lembar
418. Berkas penuntutan atas nama Urip Tri Gunawan, S.H. sebagai Jaksa/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Ekonomi Direktorat Penyidikan Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI dalam perkara penerimaan suap dari Artalyta Suryani terkait proses penyelidikan Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
12 Juni - 21 Agustus 2008
kopi
1 sampul
419. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung atas nama Urip Tri Gunawan, S.H. sebagai Jaksa/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Ekonomi Direktorat Penyidikan Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI dalam perkara penerimaan suap dari Artalyta Suryani terkait proses penyelidikan Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
28 Agustus 2008 -11 Maret 2009
asli, kopi, tembusan
1 sampul

420. Surat dari Satgas Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Direktur Penuntutan KPK mengenai dugaan keterlibatan Glenn Muhammad Surya Yusuf dan Reno Iskandarsyah, S.H. dalam perkara pemberian suap kepada terpidana Urip Tri Gunawan, S.H. sebagai Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya Kejaksaan Agung RI terkait proses penyelidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

13 Juli 2010

Asli

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Pemberian Suap terkait Rekomendasi/Persetujuan Pelepasan Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan seluas 600 Ha untuk Pembangunan dan Sarana Dermaga Tanjung Api-Api Tahun 2006-2007

Syahrial Oesman

421. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/18/23/VI/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Syahrial Oesman sebagai Gubernur Sumatra Selatan dalam perkara pemberian suap kepada Sarjan Tahir, S.E., M.M. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait rekomendasi/persetujuan pelepasan alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan seluas 600 Ha untuk pembangunan dan sarana Dermaga Tanjung Api-Api tahun 2006-2007.

30 Januari 2008 - 31 Juli 2009

kopi

1 jilid

422. Berkas penuntutan atas nama Syahrial Oesman sebagai Gubernur Sumatra Selatan dalam perkara pemberian suap kepada Sarjan Tahir, S.E., M.M. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait rekomendasi/persetujuan pelepasan alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan seluas 600 Ha untuk pembangunan dan sarana Dermaga Tanjung Api-Api tahun 2006-2007.

22 Juli - 8 September 2009

asli

1 sampul

423. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung atas nama Syahrial Oesman sebagai Gubernur Sumatra Selatan dalam perkara pemberian suap kepada Sarjan Tahir, S.E., M.M. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait rekomendasi/persetujuan pelepasan alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan seluas 600 Ha untuk pembangunan dan sarana Dermaga Tanjung Api-Api tahun 2006-2007.

6 Oktober 2009 - 20 April 2010

asli, kopi

1 sampul

Sarjan Tahir, S.E., M.M.

424. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/25/01/VIII/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Sarjan Tahir, S.E., M.M. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam perkara penerimaan suap dari Chandra Antonio Tan dan Sofyan Rebuin sebagai Direktur Utama Badan Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-Api (BPPTAA) terkait rekomendasi/persetujuan pelepasan alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan seluas 600 Ha untuk pembangunan dan sarana Dermaga Tanjung Api-Api tahun 2006-2007.

30 Januari - 25 Agustus 2008

kopi

1 jilid

425. Berkas penuntutan atas nama Sarjan Tahir, S.E., M.M. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam perkara penerimaan suap dari Chandra Antonio Tan dan Sofyan Rebuin sebagai Direktur Utama Badan Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-Api (BPPTAA) terkait rekomendasi/persetujuan pelepasan alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan seluas 600 Ha untuk pembangunan dan sarana Dermaga Tanjung Api-Api tahun 2006-2007.

10 September 2008 - 7 Januari 2009

asli, kopi

1 sampul

426. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Sarjan Tahir, S.E., M.M. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam perkara penerimaan suap dari Chandra Antonio Tan dan Sofyan Rebuin sebagai Direktur Utama Badan Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-Api (BPPTAA) terkait rekomendasi/persetujuan pelepasan alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan seluas 600 Ha untuk pembangunan dan sarana Dermaga Tanjung Api-Api tahun 2006-2007.

14 - 28 Januari 2009

asli, salinan

1 sampul

427. Berkas eksekusi atas nama Sarjan Tahir, S.E., M.M. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam perkara penerimaan sejumlah dana dari Chandra Antonio Tan dan Sofyan Rebuin sebagai Direktur Utama Badan Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-Api (BPPTAA) terkait rekomendasi/persetujuan pelepasan alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan seluas 600 Ha untuk pembangunan dan sarana Dermaga Tanjung Api-Api tahun 2006-2007.

14 - 15 Oktober 2009

asli, kopi

1 sampul

H. M. Yusuf Erwin Faishal

428. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-31/23/XI/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama H. M. Yusuf Erwin Faishal sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam perkara penerimaan suap dari Chandra Antonio Tan dan Sofyan Rebuin sebagai Direktur Utama Badan Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-Api (BPPTAA) terkait rekomendasi/persetujuan pelepasan alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan seluas 600 Ha untuk pembangunan dan sarana Dermaga Tanjung Api-Api tahun 2006-2007.

1 Januari - 6 November 2008

kopi

1 jilid

429. Surat Penetapan Nomor: 29/Pen.Pid/2008/PN.JKT.PST mengenai pemberian izin kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku penyidik untuk melakukan penggeledahan rumah/kantor/ruang kerja atas nama H. M. Yusuf Erwin Faishal sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dalam perkara penerimaan suap dari Chandra Antonio Tan dan Sofyan Rebuin sebagai Direktur Utama Badan Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-Api (BPPTAA) terkait rekomendasi/persetujuan pelepasan alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan seluas 600 Ha untuk pembangunan dan sarana Dermaga Tanjung Api-Api tahun 2006-2007.

15 Juli 2008

asli

1 lembar

430. Berkas penuntutan atas nama H. M. Yusuf Erwin Faishal sebagai Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dalam perkara penerimaan suap dari Chandra Antonio Tan dan Sofyan Rebuin sebagai Direktur Utama Badan Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-Api (BPPTAA) terkait rekomendasi/persetujuan pelepasan alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan seluas 600 Ha di Provinsi Sumatera Selatan untuk pembangunan dan sarana Dermaga Tanjung Api-Api tahun 2006-2007.

21 November 2008 - 16 Maret 2009

asli

1 sampul

431. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama H. M. Yusuf Erwin Faishal sebagai Anggota Komisi Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dalam perkara penerimaan suap dari Chandra Antonio Tan dan Sofyan Rebuin sebagai Direktur Utama Badan Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-Api (BPPTAA) terkait rekomendasi/persetujuan pelepasan alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan seluas 600 Ha di Provinsi Sumatera Selatan untuk pembangunan dan sarana Dermaga Tanjung Api-Api tahun 2006-2007.

23 Maret - 6 April 2009

asli, salinan

1 sampul

Chandra Antonio Tan

432. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/35/23/XI/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Chandra Antonio Tan sebagai Direktur Utama PT Chandratex Indo Artha dalam perkara pemberian suap kepada Sarjan Tahir, S.E., M.M. dan H. M. Yusuf Erwin Faishal, Hilman Indra, Azwar Chesputra, dan H. M. Fachri Andi Leluasa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait rekomendasi/persetujuan pelepasan alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan seluas 600 Ha untuk pembangunan dan sarana Dermaga Tanjung Api-Api tahun 2006-2007.

1 Januari - 19 November 2008

kopi

1 jilid

433. Berkas penuntutan atas nama Chandra Antonio Tan sebagai Direktur Utama PT Chandratex Indo Artha dalam perkara pemberian suap kepada Sarjan Tahir, S.E., M.M. dan H. M. Yusuf Erwin Faishal, Hilman Indra, Azwar Chesputra, dan H. M. Fachri Andi Leluasa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait rekomendasi/persetujuan pelepasan alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan seluas 600 Ha untuk pembangunan dan sarana Dermaga Tanjung Api-Api tahun 2006-2007.

12 Desember 2008 - 6 Maret 2009

asli

1 sampul

434. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 35/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST atas nama Chandra Antonio Tan sebagai Direktur Utama PT Chandratex Indo Artha dalam perkara pemberian suap kepada Sarjan Tahir, S.E., M.M. dan H. M. Yusuf Erwin Faishal, Hilman Indra, Azwar Chesputra, dan H. M. Fachri Andi Leluasa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait rekomendasi/persetujuan pelepasan alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan seluas 600 Ha untuk pembangunan dan sarana Dermaga Tanjung Api-Api tahun 2006-2007.

13 Maret 2009

salinan

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Tukar Guling (*Ruilslag*) Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2004-2006

Drs. H. Iskandar

435. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/20/23/VII/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Drs. H. Iskandar sebagai Bupati Lombok Barat dalam perkara tukar guling (*ruilslag*) aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok berupa tanah dan bangunan eks Kantor Bupati Lombok Barat tahun 2004-2006.

11 Februari - 22 Agustus 2008

kopi

1 jilid

436. Surat dakwaan atas nama Drs. H. Iskandar sebagai Bupati Lombok Barat dalam perkara tukar guling (*ruilslag*) aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok berupa tanah dan bangunan eks Kantor Bupati Lombok Barat tahun 2004-2006.

15 September 2008

asli

1 sampul

Drs. Izzat Husein, M.M.

437. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/21/23/VIII/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Drs. Izzat Husein, M.M. sebagai Direktur PT Varindo Lombok Inti dalam perkara tukar guling (*ruilslag*) aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok berupa tanah dan bangunan eks Kantor Bupati Lombok Barat tahun 2004-2006.

11 Februari - 22 Agustus 2008

kopi

1 jilid

438. Berkas penuntutan atas nama Drs. Izzat Husein, M.M. sebagai Direktur Utama PT Varindo Lombok Inti dalam perkara tukar guling (*ruilslag*) aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat berupa tanah dan bangunan eks Kantor Bupati Lombok Barat tahun 2004-2006.

15 September 2008 - 28 Januari 2009

asli, kopi

1 sampul

439. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung atas nama Drs. Izzat Husein, M.M. sebagai Direktur Utama PT Varindo Lombok Inti dalam perkara tukar guling (*ruilslag*) aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat berupa tanah dan bangunan eks Kantor Bupati Lombok Barat tahun 2004-2006.

2 Februari - 27 Oktober 2009

asli, salinan, kopi

1 sampul

440. Pendapat Jaksa Umum atas Memori Peninjauan Kembali atas nama terpidana Drs. Izzat Husein, M.M. sebagai Direktur Utama PT Varindo Lombok Inti dalam perkara tukar guling (*ruilslag*) aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat berupa tanah dan bangunan eks Kantor Bupati Lombok Barat tahun 2004-2006.

30 Maret 2010

asli

1 sampul

**Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Bantuan Sosial
Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-
2006**

Setia Budi

441. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/28/23/X/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Setia Budi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara dalam perkara penyalahgunaan anggaran bantuan sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005-2006.

18 Februari - 17 Oktober 2008

kopi

1 jilid

442. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 26/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst atas nama Setia Budi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perkara penyalahgunaan anggaran bantuan sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005-2006.

23 Maret 2009

kopi

1 sampul

Drs. H. Samsuri Aspar, M.M.

443. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/27/23/X/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Drs. H. Samsuri Aspar, M.M. sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara/Plt. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perkara penyalahgunaan anggaran bantuan sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005-2006.

18 Februari - 17 Oktober 2008

kopi

1 jilid

444. Berkas penuntutan atas nama Drs. H. Samsuri Aspar, M.M. sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara/Plt. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perkara penyalahgunaan anggaran bantuan sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005-2006.

3 November 2008 - 12 Februari 2009

asli

1 sampul

445. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Drs. H. Samsuri Aspar, M.M. selaku Wakil Bupati Kutai Kartanegara/Plt. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perkara penyalahgunaan anggaran bantuan sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005-2006.

25 Februari - 16 Maret 2009

asli, salinan

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Pungutan Tarif Jasa/Biaya Pengurusan Dokumen Keimigrasian di Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu, Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Kuching, dan Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Tawau, Malaysia Tahun 1999-2005

Arifin Hamzah, Radite Edyatmo, Drs. Nugraha, dan Drs. Kamsu Simatupang

446. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-38/23/XI/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Arifin Hamzah sebagai Konsul Jenderal RI di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia pada Agustus 1999; Radite Edyatmo sebagai Kepala Bidang Konsuler Ekonomi Penerangan Sosial dan Budaya Konsulat Jenderal RI (KJRI) Kota Kinabalu, Malaysia; Drs. Nugraha alias Ayi Nugraha sebagai Kepala Subbidang Imigrasi pada Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Kuching, Malaysia; dan Kamsu Simatupang sebagai Kepala Subbidang Imigrasi pada Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu, Malaysia di Tawau dalam perkara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait pungutan tarif jasa/biaya pengurusan dokumen keimigrasian di Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu, Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Kuching, dan Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Tawau, Malaysia tahun 1999-2005.

28 Maret - 21 November 2008

kopi

1 jilid

447. Berkas penuntutan atas nama Arifin Hamzah sebagai Konsul Jenderal RI di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia pada Agustus 1999; Radite Edyatmo sebagai Kepala Bidang Konsuler Ekonomi Penerangan Sosial dan Budaya Konsulat Jenderal RI (KJRI) Kota Kinabalu, Malaysia; Drs. Nugraha alias Ayi Nugraha sebagai Kepala Subbidang Imigrasi pada Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Kuching, Malaysia; dan Kamso Simatupang sebagai Kepala Subbidang Imigrasi pada Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu, Malaysia di Tawau dalam perkara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait pungutan tarif jasa/biaya pengurusan dokumen keimigrasian di Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu, Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Kuching, dan Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Tawau, Malaysia tahun 1999-2005.

11 Desember 2008 - 23 Maret 2009

asli, kopi

1 sampul

448. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Arifin Hamzah sebagai Konsul Jenderal RI di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia pada Agustus 1999; Radite Edyatmo sebagai Kepala Bidang Konsuler Ekonomi Penerangan Sosial dan Budaya Konsulat Jenderal RI (KJRI) Kota Kinabalu, Malaysia; Drs. Nugraha alias Ayi Nugraha sebagai Kepala Subbidang Imigrasi pada Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Kuching, Malaysia; dan Kamso Simatupang sebagai Kepala Subbidang Imigrasi pada Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu, Malaysia di Tawau dalam perkara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait pungutan tarif jasa/biaya pengurusan dokumen keimigrasian di Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu, Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Kuching, dan Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Tawau, Malaysia tahun 1999-2005.

30 Maret - 23 April 2009

asli, kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Pungutan Tarif Jasa/Biaya Pengurusan Dokumen Keimigrasian di Konsulat Jenderal RI (KJRI) Kota Kinabalu, Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Kuching, dan Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Tawau, Malaysia Tahun 2000-2005

Muchamad Sukarna, Mas Tata Machron, Irsyafli Rasoel, dan Makdum Tahir

449. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-39/23/XII/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll atas nama Muchamad Sukarna sebagai Konsul Jenderal RI Kota Kinabalu, Mas Tata Machron sebagai Kepala Bidang Konsuler Ekonomi Penerangan Sosial dan Budaya pada KJRI Kota Kinabalu, Irsyafli Rasoel sebagai Kepala Sub Bidang Imigrasi/Konsul Muda Imigrasi pada KJRI di Kota Kinabalu yang berkedudukan di Kuching, dan Makdum Tahir sebagai Kepala Sub Bidang Imigrasi/Konsul Muda Imigrasi pada KJRI Kota Kinabalu yang berkedudukan di Tawau dalam perkara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait pungutan tarif jasa/biaya pengurusan dokumen keimigrasian di Konsulat Jenderal RI (KJRI) Kota Kinabalu, Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Kuching, dan Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Tawau, Malaysia tahun 2000-2005.

28 Maret - 9 Desember 2008

kopi

1 jilid

450. Berkas penuntutan atas nama Muchamad Sukarna sebagai Konsul Jenderal RI Kota Kinabalu, Mas Tata Machron sebagai Kepala Bidang Konsuler Ekonomi Penerangan Sosial dan Budaya pada KJRI Kota Kinabalu, Irsyafli Rasoel sebagai Kepala Sub Bidang Imigrasi/Konsul Muda Imigrasi pada KJRI di Kota Kinabalu yang berkedudukan di Kuching, dan Makdum Tahir sebagai Kepala Sub Bidang Imigrasi/Konsul Muda Imigrasi pada KJRI Kota Kinabalu yang berkedudukan di Tawau dalam perkara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait pungutan tarif jasa/biaya pengurusan dokumen keimigrasian di Konsulat Jenderal RI (KJRI) Kota Kinabalu, Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Kuching, dan Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Tawau, Malaysia tahun 2000-2005.

19 Desember 2008 - 8 April 2009

asli

1 sampul

451. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Muchamad Sukarna sebagai Konsul Jenderal RI Kota Kinabalu, Mas Tata Machron sebagai Kepala Bidang Konsuler Ekonomi Penerangan Sosial dan Budaya pada KJRI Kota Kinabalu, Irsyafl Rasoel sebagai Kepala Sub Bidang Imigrasi/Konsul Muda Imigrasi pada KJRI di Kota Kinabalu yang berkedudukan di Kuching, dan Makdum Tahir sebagai Kepala Sub Bidang Imigrasi/Konsul Muda Imigrasi pada KJRI Kota Kinabalu yang berkedudukan di Tawau dalam perkara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait pungutan tarif jasa/biaya pengurusan dokumen keimigrasian di Konsulat Jenderal RI (KJRI) Kota Kinabalu, Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Kuching, dan Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Tawau, Malaysia tahun 2000-2005.

15 - 29 April 2009

asli, kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Pungutan Tarif Jasa/Biaya Pengurusan Dokumen Keimigrasian di Konsulat Jenderal RI (KJRI) Kota Kinabalu, Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Kuching, dan Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Tawau, Malaysia Tahun 2004-2005

Kurniawan Roebadi

452. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-40/23/XII/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Kurniawan Roebadi sebagai Konsul Jenderal RI Kota Kinabalu Departemen Luar Negeri RI dalam perkara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait pungutan tarif jasa/biaya pengurusan dokumen keimigrasian di Konsulat Jenderal RI (KJRI) Kota Kinabalu, Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Kuching, dan Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Tawau, Malaysia tahun 2004-2005.

28 Maret - 9 Desember 2008

kopi

1 jilid

453. Berkas penuntutan atas nama Kurniawan Roebadi sebagai Konsul Jenderal RI Kota Kinabalu Departemen Luar Negeri RI dalam perkara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait pungutan tarif jasa/biaya pengurusan dokumen keimigrasian di Konsulat Jenderal RI (KJRI) Kota Kinabalu, Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Kuching, dan Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Tawau, Malaysia tahun 2004-2005.

19 Desember 2008 - 8 April 2009

asli

1 sampul

454. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Kurniawan Roebadi sebagai Konsul Jenderal RI Kota Kinabalu Departemen Luar Negeri RI dalam perkara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait pungutan tarif jasa/biaya pengurusan dokumen keimigrasian di Konsulat Jenderal RI (KJRI) Kota Kinabalu, Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Kuching, dan Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Tawau, Malaysia tahun 2004-2005.

15 - 29 April 2009

asli, salinan

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Pelepasan Alih Fungsi Hutan Lindung Pulau Bintan, Kepulauan Riau Tahun 2007-2008

Drs. Azirwan

455. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/16/23/VI/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Drs. Azirwan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan dalam perkara pemberian suap kepada M. Al Amien Nur Nasution, S.E. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait proses persetujuan pelepasan alih fungsi hutan lindung Pulau Bintan, Kepulauan Riau tahun 2007-2008.

9 April - 4 Juni 2008

kopi

1 jilid

456. Berkas penuntutan atas nama Drs. Azirwan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan dalam perkara pemberian suap kepada M. Al Amien Nur Nasution, S.E. sebagai Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait proses persetujuan pelepasan alih fungsi hutan lindung Pulau Bintan, Kepulauan Riau tahun 2007-2008.

18 Juni - 11 Agustus 2008

asli

1 sampul

457. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Drs. Azirwan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan dalam perkara pemberian suap kepada M. Al Amien Nur Nasution, S.E. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait proses persetujuan pelepasan alih fungsi hutan lindung Pulau Bintan, Kepulauan Riau tahun 2007-2008.

21 Agustus - 1 September 2008

asli, kopi, salinan

1 sampul

M. Al Amien Nur Nasution, S.E.

458. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/22/23/VIII/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama M. Al Amien Nur Nasution, S.E. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam perkara penerimaan sejumlah uang terkait proses persetujuan DPR dalam usulan pelepasan kawasan hutan lindung di Tanjung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan dan Pulau Bintan Kepulauan Riau, serta proyek pengadaan GPS (*Giographical Position System*) geodetik di Badan Planologi Kehutanan (Baplan) tahun 2006-2008.

9 April - 4 Agustus 2008

kopi

1 jilid

459. Berkas penyidikan atas nama M. Al Amien Nur Nasution, S.E. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam perkara penerimaan sejumlah uang terkait proses persetujuan DPR dalam usulan pelepasan kawasan hutan lindung di Tanjung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan dan Pulau Bintan Kepulauan Riau, serta proyek pengadaan GPS (*Giographical Position System*) geodetik di Badan Planologi Kehutanan (Baplan) tahun 2006-2008.

28 April 2008

Asli

1 sampul

460. Berkas penuntutan atas nama M. Al Amien Nur Nasution, S.E. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam perkara penerimaan sejumlah uang terkait proses persetujuan DPR dalam usulan pelepasan kawasan hutan lindung di Tanjung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan dan Pulau Bintan Kepulauan Riau, serta proyek pengadaan GPS (*Giographical Position System*) geodetik di Badan Planologi Kehutanan (Baplan) tahun 2006-2008.

27 Mei - 10 Desember 2008

asli, kopi

1 sampul

461. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung atas nama M. Al Amien Nur Nasution, S.E. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam perkara penerimaan sejumlah uang terkait proses persetujuan DPR dalam usulan pelepasan kawasan hutan lindung di Tanjung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan dan Pulau Bintan Kepulauan Riau, serta proyek pengadaan GPS (*Giographical Position System*) geodetik di Badan Planologi Kehutanan (Baplan) tahun 2006-2008.

17 Desember 2008 - 15 September 2009

asli, kopi, salinan

1 sampul

462. Berkas peninjauan kembali atas nama M. Al Amien Nur Nasution, S.E. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam perkara penerimaan sejumlah uang terkait proses persetujuan DPR dalam usulan pelepasan kawasan hutan lindung di Tanjung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan dan Pulau Bintan Kepulauan Riau, serta proyek pengadaan GPS (*Giographical Position System*) geodetik di Badan Planologi Kehutanan (Baplan) tahun 2006-2008.

3 Mei - 29 Juli 2010

asli, kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Perbaikan Gedung Kantor Kedutaan Besar RI di Singapura, Wisma Duta Besar, Wisma *Deputy Chief of Mission* (DCM) dan Rumah-Rumah Dinas Kedutaan Besar RI di Singapura Tahun 2003-2004

Mochamad Slamet Hidayat dan Erizal

463. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-18/23/VI/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Mochamad Slamet Hidayat sebagai Duta Besar RI untuk Singapura dan Erizal sebagai Kepala Bagian Tata Usaha/Bendaharawan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura dalam perkara perbaikan gedung Kantor Kedutaan Besar RI di Singapura, wisma duta besar, wisma *Deputy Chief of Mission* (DCM) dan rumah-rumah dinas Kedutaan Besar RI di Singapura tahun 2003-2004.

2 Mei - 30 Juni 2008

kopi

1 jilid

464. Berkas penuntutan atas nama Mochamad Slamet Hidayat sebagai Duta Besar RI untuk Singapura dan Erizal sebagai Kepala Bagian Tata Usaha/Bendaharawan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura dalam perkara perbaikan gedung Kantor Kedutaan Besar RI di Singapura, wisma duta besar, wisma *Deputy Chief of Mission* (DCM) dan rumah-rumah dinas Kedutaan Besar RI di Singapura tahun 2003-2004.

13 Agustus - 19 November 2008

asli

1 sampul

465. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas nama Mochamad Slamet Hidayat sebagai Duta Besar RI untuk Singapura dan Erizal sebagai Kepala Bagian Tata Usaha/Bendaharawan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura dalam perkara perbaikan gedung Kantor Kedutaan Besar RI di Singapura, wisma duta besar, wisma *Deputy Chief of Mission* (DCM) dan rumah-rumah dinas Kedutaan Besar RI di Singapura Tahun 2003-2004.

26 November 2008 - 8 November 2009

asli, kopi, konsep

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Suap Terkait dengan Proses Impor Barang yang Masuk atau Diperiksa oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Jalur Hijau pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok Kementerian Keuangan RI

Agus Sjafiin Pane

466. Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Agus Sjafiin Pane sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Jalur Hijau pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Tanjung Priok dalam perkara penerimaan suap terkait proses impor barang yang masuk atau diperiksa oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) jalur hijau pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok Kementerian Keuangan RI.

Nb. Akses Tertutup.

4 Juni 2008

asli, kopi

1 sampul

467. Berkas penyidikan atas nama Agus Sjafiin Pane sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Jalur Hijau pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Tanjung Priok dalam perkara penerimaan suap terkait proses impor barang yang masuk atau diperiksa oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) jalur hijau pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok Kementerian Keuangan RI.

30 Januari 2008 - 18 Februari 2009

asli, kopi

1 sampul

468. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-09/23/02/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Agus Sjafiin Pane sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Jalur Hijau pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Tanjung Priok dalam perkara penerimaan suap terkait proses impor barang yang masuk atau diperiksa oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) jalur hijau pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok Kementerian Keuangan RI.

29 Agustus 2008 - 12 Februari 2009

kopi

1 jilid

469. Berkas penuntutan atas nama Agus Sjafiin Pane sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Jalur Hijau pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Tanjung Priok dalam perkara penerimaan suap terkait proses impor barang yang masuk atau diperiksa oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) jalur hijau pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok Kementerian Keuangan RI.

3 Maret - 13 Juli 2009

asli, kopi

1 sampul

470. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi atas nama Agus Sjafiin Pane sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Jalur Hijau pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Tanjung Priok dalam perkara penerimaan suap terkait proses impor barang yang masuk atau diperiksa oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) jalur hijau pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok Kementerian Keuangan RI.

21 Juli - 17 Desember 2009

asli, kopi

1 sampul

471. Berkas eksekusi dan penyitaan aset atas nama Agus Sjafiin Pane sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Jalur Hijau pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Tanjung Priok dalam perkara penerimaan suap terkait proses impor barang yang masuk atau diperiksa oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) jalur hijau pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok Kementerian Keuangan RI.

6 Januari - 25 Maret 2010

asli, kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Hak Siar Penayangan Pertandingan Liga Utama Inggris (*Barclays Premier League*) musim 2007-2010

Billy Sindoro

472. Berkas penyelidikan atas nama Billy Sindoro sebagai Komisaris PT Bank Lippo, Tbk. dan Eksekutif Lippo Group dalam perkara pemberian suap kepada Ir. H. Mohammad Iqbal sebagai Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait hak siar penayangan pertandingan Liga Utama Inggris (*Barclays Premier League*) musim 2007-2010 dan membocorkan materi pembahasan putusan perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tahun 2008.

Nb.: Akses tertutup

20 Juni - 16 September 2008

asli, kopi

1 sampul

473. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/30/23/XI/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Billy Sindoro sebagai Komisaris PT Bank Lippo, Tbk. dan Eksekutif Lippo Group dalam perkara pemberian suap kepada Ir. H. Mohammad Iqbal sebagai Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait hak siar penayangan pertandingan Liga Utama Inggris (*Barclays Premier League*) musim 2007-2010 dan membocorkan materi pembahasan putusan perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tahun 2008.

16 September - 6 November 2008

kopi

1 jilid

474. Berkas penyidikan atas nama Billy Sindoro sebagai Komisaris PT Bank Lippo, Tbk. dan Eksekutif Lippo Group dalam perkara pemberian suap kepada Ir. H. Mohammad Iqbal sebagai Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait hak siar penayangan pertandingan Liga Utama Inggris (*Barclays Premier League*) musim 2007-2010 dan membocorkan materi pembahasan putusan perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tahun 2008.

18 September - 27 November 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul

475. Berkas penuntutan atas nama Billy Sindoro sebagai Komisaris PT Bank Lippo, Tbk. dan Eksekutif Lippo Group dalam perkara pemberian suap kepada Ir. H. Mohammad Iqbal sebagai Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait hak siar penayangan pertandingan Liga Utama Inggris (*Barclays Premier League*) musim 2007-2010 dan membocorkan materi pembahasan putusan perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tahun 2008.

27 November 2008 - 28 Januari 2009

asli

1 sampul

476. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Billy Sindoro sebagai Komisaris PT Bank Lippo, Tbk. dan Eksekutif Lippo Group dalam perkara pemberian suap kepada Ir. H. Mohammad Iqbal sebagai Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait hak siar penayangan pertandingan Liga Utama Inggris (*Barclays Premier League*) musim 2007-2010 dan membocorkan materi pembahasan putusan perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tahun 2008.

14 Oktober 2008 - 6 Februari 2009

asli, kopi

1 sampul

477. Berkas eksekusi atas nama Billy Sindoro sebagai Komisaris PT Bank Lippo, Tbk. dan Eksekutif Lippo Group dalam perkara pemberian suap kepada Ir. H. Mohammad Iqbal sebagai Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait hak siar penayangan pertandingan Liga Utama Inggris (*Barclays Premier League*) musim 2007-2010 dan membocorkan materi pembahasan putusan perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tahun 2008.

16 Februari 2009 - 27 Agustus 2010

asli, kopi, tembusan

1 sampul

478. Berkas peninjauan kembali atas nama Billy Sindoro sebagai Komisaris PT Bank Lippo, Tbk. dan Eksekutif Lippo Group dalam perkara pemberian suap kepada Ir. H. Mohammad Iqbal sebagai Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait hak siar penayangan pertandingan Liga Utama Inggris (*Barclays Premier League*) musim 2007-2010 dan membocorkan materi pembahasan putusan perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tahun 2008.

12 Juni 2009 - 11 April 2011

asli

1 sampul

Ir. H. Mohammad Iqbal

479. Berkas penyidikan atas nama Ir. H. Mohammad Iqbal sebagai Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perkara penerimaan suap dari Billy Sindoro terkait penanganan kasus dugaan praktik monopoli mengenai hak siar penayangan pertandingan Liga Utama Inggris (*Barclays Premier League*) tahun 2008.

7 Agustus 2008 - 13 Januari 2009

asli, kopi

1 sampul

480. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-01/23/I/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Ir. H. Mohammad Iqbal sebagai Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perkara penerimaan suap dari Billy Sindoro terkait penanganan kasus dugaan praktik monopoli mengenai hak siar penayangan pertandingan Liga Utama Inggris (*Barclays Premier League*) tahun 2008.

16 September 2008 - 6 Januari 2009

kopi

1 jilid

481. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-01/23/I/2009 berisi lampiran berkas perkara atas nama Ir. H. Mohammad Iqbal sebagai anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perkara penerimaan suap dari Billy Sindoro terkait penanganan kasus dugaan praktik monopoli mengenai hak siar penayangan pertandingan Liga Utama Inggris (*Barclays Premier League*) tahun 2008.

16 September - 6 Januari 2009

kopi

1 jilid

482. Berkas penuntutan atas nama Ir. H. Mohammad Iqbal sebagai anggota Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam perkara penerimaan suap dari Billy Sindoro terkait penanganan kasus dugaan praktik monopoli mengenai hak siar penayangan pertandingan Liga Utama Inggris (*Barclays Premier League*) tahun 2008.

23 Januari - 1 Juni 2009

asli, kopi

1 sampul

483. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung atas nama Ir. H. Mohammad Iqbal sebagai anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perkara penerimaan suap dari Billy Sindoro terkait penanganan kasus dugaan praktik monopoli mengenai hak siar penayangan pertandingan Liga Utama Inggris (*Barclays Premier League*) tahun 2008.

8 Juni 2009 - 8 Juni 2010

asli, kopi, konsep

1 sampul

484. Berkas eksekusi dan penyitaan aset atas nama Ir. H. Mohammad Iqbal sebagai anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perkara penerimaan suap dari Billy Sindoro terkait penanganan kasus dugaan praktik monopoli mengenai hak siar penayangan pertandingan Liga Utama Inggris (*Barclays Premier League*) tahun 2008.

15 Juni 2010 - 7 Juli 2011

asli, kopi, konsep

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal Patroli Kelas III Tipe FRP pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI Tahun 2007-2008

Djoni Anwir Algamar dan Tansean Parlindungan Malau

485. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-22/23/VIII/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Djoni Anwir Algamar sebagai Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Tansean Parlindungan Malau sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Operasional/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI dalam perkara penerimaan suap terkait pengadaan kapal patroli kelas III tipe FRP pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI tahun 2007-2008.

30 Juni 2008 - 31 Agustus 2009

kopi

1 jilid

486. Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Saksi Ahli, dan Tersangka atas nama Djoni Anwir Algamar sebagai Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Tansean Parlindungan Malau sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Operasional/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI dalam perkara penerimaan suap terkait pengadaan kapal patroli kelas III tipe FRP pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI tahun 2007-2008.

19 Februari - 23 Juli 2009

asli

1 sampul

487. Berkas penuntutan atas nama Djoni Anwir Algamar sebagai Mantan Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Tansean Parlindungan Malau sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Operasional/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI dalam perkara penerimaan suap terkait pengadaan kapal patroli kelas III tipe FRP pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI tahun 2007-2008.

24 September 2009 - 14 Januari 2010

asli

2 jilid

488. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Djoni Anwir Algamar sebagai Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Tansean Parlindungan Malau sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Operasional/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI dalam perkara penerimaan suap terkait pengadaan kapal patroli kelas III tipe FRP pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI tahun 2007-2008.

21 Januari - 4 Februari 2010

asli, kopi

1 sampul

489. Kontra memori peninjauan kembali atas nama Djoni Anwir Algamar sebagai Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Tansean Parlindungan Malau sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Operasional/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI dalam perkara penerimaan suap terkait pengadaan kapal patroli kelas III tipe FRP pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI tahun 2007-2008.

29 Juli 2010

asli

1 sampul

Bulyan Royan

490. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/29/23/X/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Bulyan Royan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam perkara pengadaan kapal patroli kelas III tipe FRP di Direktorat Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI tahun 2007-2008.

30 Juni - 23 Oktober 2008

kopi

1 jilid

491. Ringkasan laporan penyidikan atas nama Bulyan Royan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam perkara pengadaan kapal patroli kelas III tipe FRP pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI tahun 2007-2008.

23 Oktober 2008

kopi

1 sampul

492. Berkas penuntutan atas nama Bulyan Royan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam perkara pengadaan kapal patroli kelas III tipe FRP pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI tahun 2007-2008.

10 November 2008 - 18 Februari 2009

asli, kopi

1 sampul

493. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Bulyan Royan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam perkara pengadaan kapal patroli kelas III tipe FRP pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI tahun 2007-2008.

4 Maret 2009 - 18 Maret 2009

asli, salinan, kopi

1 sampul

494. Berkas peninjauan kembali atas nama Bulyan Royan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam perkara pengadaan kapal patroli kelas III tipe FRP pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI tahun 2007-2008.

22 Juni 2009 - 19 April 2010

asli, salinan, kopi

1 sampul

Dedy Suwarsono

495. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/24/23/VIII/2008 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Dedy Suwarsono sebagai Direktur PT Bina Mina Karya Perkasa dalam perkara pengadaan kapal patroli kelas III tipe FRP di Direktorat Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI tahun 2007-2008.

30 Juni - 11 Agustus 2008

kopi

1 jilid

496. Berkas penuntutan atas nama Dedy Suwarsono sebagai Direktur PT Bina Mina Karya Perkasa dalam perkara pemberian sejumlah uang kepada Bulyan Royan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait proses anggaran pengadaan kapal patroli kelas III tipe FRP pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI tahun 2007-2008.

9 September - 17 November 2008

asli, kopi

1 sampul

497. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi atas nama Dedy Suwarsono sebagai Direktur PT Bina Mina Karya Perkasa dalam perkara pemberian sejumlah uang kepada Bulyan Royan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait proses anggaran pengadaan kapal patroli kelas III tipe FRP pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI tahun 2007-2008.

24 November 2008 - 27 Februari 2009

asli, kopi, konsep

1 sampul

498. Berkas peninjauan kembali atas nama Dedy Suwarsono sebagai Direktur PT Bina Mina Karya Perkasa dalam perkara pemberian sejumlah uang kepada Bulyan Royan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait proses anggaran pengadaan kapal patroli kelas III tipe FRP pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI tahun 2007-2008.

15 Juni - 2 Juli 2009

asli, kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pengadaan, Penyimpanan, dan Penyaluran Gula Kristal Putih di Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI Tahun 2003

Ranendra Dangin

499. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-11/23/III/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Ranendra Dangin sebagai Direktur Keuangan PT Rajawali Nusantara Indonesia dalam perkara penyalahgunaan dana pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran gula kristal putih di Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI tahun 2003.

17 Juli 2008 - 31 Maret 2009

kopi

1 jilid

500. Berkas penuntutan atas nama Ranendra Dangin sebagai Direktur Keuangan PT Rajawali Nusantara Indonesia dalam perkara penyalahgunaan dana pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran gula kristal putih di Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI tahun 2003.

19 Maret - 1 Juni 2009

asli

1 sampul

501. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Ranendra Dangin sebagai Direktur Keuangan PT Rajawali Nusantara Indonesia dalam perkara penyalahgunaan dana pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran gula kristal putih di Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI tahun 2003.

8 Juni - 22 Juni 2009

asli, kopi

1 sampul

502. Berkas permohonan peninjauan kembali atas nama Ranendra Dangin sebagai Direktur Keuangan PT Rajawali Nusantara Indonesia dalam perkara penyalahgunaan dana pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran gula kristal putih di Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI tahun 2003.

17 September - 26 Oktober 2009

Asli

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2004 – 2006

Drs. H. Armen Desky, M.M.

503. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor BP-19/23/VI/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Drs. H. Armen Desky, M.M. sebagai Bupati Aceh Tenggara dalam perkara penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2004-2006.

15 Agustus 2008 - 31 Juli 2009

kopi

1 jilid

504. Berkas penyidikan atas nama Drs. H. Armen Desky, M.M. sebagai Bupati Aceh Tenggara dalam perkara penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2004-2006.

16 April - 30 Juli 2009

kopi

1 sampul

505. Berkas penuntutan atas nama Drs. H. Armen Desky, M.M. sebagai Bupati Aceh Tenggara dalam perkara penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2004-2006.

27 Juli - 18 November 2009

asli, konsep

1 sampul

506. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Drs. H. Armen Desky, M.M. sebagai Bupati Aceh Tenggara dalam perkara penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2004-2006.

25 November - 9 Desember 2009

asli, kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Suap dari Rekanan-Rekanan atau Instalatur PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Wilayah II Jawa Bagian Timur tahun 2003-2006

Ir. Trijono, M.M.

507. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-15/23/04/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Ir. Trijono, M.M. sebagai Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Migas/mantan General Manager Strategic Business Unit (SBU) PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Wilayah II Jawa Bagian Timur dalam perkara penerimaan suap dari rekanan-rekanan atau instalatur PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Wilayah II Jawa Bagian Timur tahun 2003-2006.

16 September 2008 - 8 April 2009

kopi

1 jilid

508. Berkas penuntutan atas nama Ir. Trijono, M.M. sebagai Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Migas/mantan General Manager Strategic Business Unit (SBU) PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Wilayah II Jawa Bagian Timur dalam perkara penerimaan suap dari rekanan-rekanan atau instalatur PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Wilayah II Jawa Bagian Timur tahun 2003-2006.

4 Mei - 19 Agustus 2009

asli, kopi, konsep

1 sampul

509. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung atas nama Ir. Trijono, M.M. sebagai Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Migas/mantan General Manager Strategic Business Unit (SBU) PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Wilayah II Jawa Bagian Timur dalam perkara penerimaan suap dari rekanan-rekanan atau instalatur PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Wilayah II Jawa Bagian Timur tahun 2003-2006.

26 Agustus 2009 - 6 April 2010

asli, kopi, konsep

1 sampul

510. Surat dari Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya mengenai pembukaan pemblokiran sertifikat tanah atas nama Ir. Trijono, M.M. sebagai Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Migas/mantan General Manager Strategic Business Unit (SBU) PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Wilayah II Jawa Bagian Timur dalam perkara penerimaan suap dari rekanan-rekanan atau instalatur PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Wilayah II Jawa Bagian Timur tahun 2003-2006.

27 Mei 2010

asli

4 lembar

511. Berkas permohonan peninjauan kembali atas nama Ir. Trijono, M.M. sebagai Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Migas/mantan General Manager Strategic Business Unit (SBU) PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Wilayah II Jawa Bagian Timur dalam perkara penerimaan suap dari rekanan-rekanan atau instalatur PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Wilayah II Jawa Bagian Timur tahun 2003-2006.

13 Oktober - 16 November 2010

asli, kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Perkara Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2006-2007

Jimmy Rimba Rogi, S.Sos.

512. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-12/23/III/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Jimmy Rimba Rogi, S.Sos. sebagai Wali Kota Manado dalam perkara penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2006-2007.

25 September 2008 - 6 Maret 2009

kopi

1 jilid

513. Berkas penuntutan atas nama Jimmy Rimba Rogi, S.Sos. sebagai Wali Kota Manado dalam perkara penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2006-2007.

25 Maret - 27 Juli 2009

asli, kopi

1 sampul

514. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Jimmy Rimba Rogi, S.Sos. sebagai Wali Kota Manado dalam perkara penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2006-2007.

3 - 10 Agustus 2009

asli, kopi

1 sampul

515. Berkas persidangan pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas nama Jimmy Rimba Rogi, S.Sos. sebagai Wali Kota Manado dalam perkara penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2006-2007.

24 Agustus 2009-10 Maret 2010

asli, kopi

1 sampul

516. Berkas peninjauan kembali atas nama Jimmy Rimba Rogi, S.Sos. sebagai Wali Kota Manado dalam perkara penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2006-2007.

8 Juni - 12 Juli 2011

asli, kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Rontgen *Portable* untuk Pelayanan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Tahun Anggaran 2007

dr. Madiono, M.P.H.

517. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/33/23/XI/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama dr. Madiono, M.P.H. sebagai Kepala Bagian Perencanaan Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI dalam perkara pengadaan alat rontgen *portable* untuk pelayanan puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan pulau-pulau kecil tahun anggaran 2007.

26 September 2008 - 16 November 2009

kopi

1 jilid

518. Berkas penuntutan atas nama dr. Madiono, M.P.H. sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI dalam perkara pengadaan alat rontgen *portable* untuk pelayanan puskesmas di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau kecil tahun anggaran 2007.

7 Desember 2009 - 8 April 2010

asli, kopi

1 sampul

519. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama dr. Madiono, M.P.H. sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI dalam perkara pengadaan alat rontgen *portable* untuk pelayanan puskesmas di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau kecil Tahun Anggaran 2007. Nb. Terdapat arsip foto ukuran 4R.

20 - 27 April 2010

asli, kopi

1 sampul; 16 lembar

Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2007

Ismunarso

520. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/10/23/02/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Ismunarso sebagai Bupati Kabupaten Situbondo dalam perkara penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo tahun 2005-2007 terkait pengelolaan dan penggunaan dana kas daerah, pengambilan bunga khusus/*special rate* atas deposito pada PT Bank Negara Indonesia 46, dan investasi dana milik Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo pada PT Sentra Artha Futures dan PT Sentra Artha Utama.

7 November 2008 - 28 Februari 2009

kopi

1 jilid

521. Berkas penuntutan atas nama Ismunarso sebagai Bupati Kabupaten Situbondo dalam perkara penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo tahun 2005-2007 terkait pengelolaan dan penggunaan dana kas daerah, pengambilan bunga khusus/*special rate* atas deposito pada PT Bank Negara Indonesia 46, dan investasi dana milik Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo pada PT Sentra Artha Futures dan PT Sentra Artha Utama.

19 Maret - 16 Juli 2009

asli, kopi

1 sampul

522. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung atas nama Ismunarso sebagai Bupati Kabupaten Situbondo dalam perkara penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo tahun 2005-2007 terkait pengelolaan dan penggunaan dana kas daerah, pengambilan bunga khusus/*special rate* atas deposito pada PT Bank Negara Indonesia 46, dan investasi dana milik Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo pada PT Sentra Artha Futures dan PT Sentra Artha Utama.

22 Juli 2009 - 19 Januari 2010

asli, kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Medik untuk Daerah Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat Tahun 2003

dr. Achmad Sujudi, M.H.A.

523. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/31/23/XI/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama dr. Achmad Sujudi, M.H.A. sebagai Menteri Kesehatan RI/Komisaris Utama PT Bio Farma dalam perkara pengadaan alat kesehatan medik untuk Daerah Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat tahun 2003 yang menggunakan Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Proyek (ABT DIP) tahun 2003 pada bagian proyek peningkatan pelayanan medik spesialistik Departemen Kesehatan RI.

30 Desember 2008 - 9 November 2009

asli, kopi

1 jilid

524. Berkas penuntutan atas nama dr. Achmad Sujudi, M.H.A. sebagai Menteri Kesehatan RI/Komisaris Utama PT Bio Farma dalam perkara pengadaan alat kesehatan medik untuk Daerah Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat tahun 2003 yang menggunakan Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Proyek (ABT DIP) tahun 2003 pada bagian proyek peningkatan pelayanan medik spesialistik Departemen Kesehatan RI.

3 Desember 2009 - April 2010

asli, kopi

1 sampul

525. Nota pembelaan penasehat hukum dan pribadi atas nama dr. Achmad Sujudi, M.H.A. sebagai Menteri Kesehatan RI/Komisaris Utama PT Bio Farma dalam perkara pengadaan alat kesehatan medik untuk Daerah Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat tahun 2003 yang menggunakan Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Proyek (ABT DIP) tahun 2003 pada bagian proyek peningkatan pelayanan medik spesialisik Departemen Kesehatan RI.

20 April 2010

asli

1 sampul

526. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 29/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST atas nama dr. Achmad Sujudi, M.H.A. sebagai Menteri Kesehatan RI/Komisaris Utama PT Bio Farma dalam perkara pengadaan alat kesehatan medik untuk Daerah Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat tahun 2003 yang menggunakan Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Proyek (ABT DIP) tahun 2003 pada bagian proyek peningkatan pelayanan medik spesialisik Departemen Kesehatan RI.

23 April 2010

salinan

1 jilid

527. Berkas persidangan pada Pengadilan Tinggi atas nama dr. Achmad Sujudi, M.H.A. sebagai Menteri Kesehatan RI/Komisaris Utama PT Bio Farma dalam perkara pengadaan alat kesehatan medik untuk Daerah Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat tahun 2003 yang menggunakan Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Proyek (ABT DIP) tahun 2003 pada bagian proyek peningkatan pelayanan medik spesialisik Departemen Kesehatan RI.

24 Mei - 23 Juni 2010

asli, kopi

1 sampul

528. Berkas peninjauan kembali atas nama dr. Achmad Sujudi, M.H.A. sebagai Menteri Kesehatan RI/Komisaris Utama PT Bio Farma dalam perkara pengadaan alat kesehatan medik untuk Daerah Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat tahun 2003 yang menggunakan Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Proyek (ABT DIP) tahun 2003 pada bagian proyek peningkatan pelayanan medik spesialisik Departemen Kesehatan RI.

12 Oktober - 11 November 2010

asli, kopi

1 sampul

Drs. Gunawan Pranoto, Apt. dan Rinaldi Yusuf

529. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/29/23/XI/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Drs. Gunawan Pranoto, Apt. sebagai Direktur Utama PT Kimia Farma Persero/mantan Komisariss PT Kimia Farma Trading & Distribution dalam perkara pengadaan alat kesehatan medik untuk Daerah Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat tahun 2003 yang menggunakan Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Proyek (ABT DIP) tahun 2003 pada bagian proyek peningkatan pelayanan medik spesialistik Departemen Kesehatan RI.

30 Desember 2008 - 3 November 2009

kopi

1 jilid

530. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/30/23/XI/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Rinaldi Yusuf sebagai Direktur Utama PT Rifa Jaya Mulia dalam perkara proyek pengadaan alat kesehatan medik untuk Daerah Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat tahun 2003 yang menggunakan Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Proyek (ABT DIP) tahun 2003 pada bagian proyek peningkatan pelayanan medik spesialistik Departemen Kesehatan RI.

30 Desember 2008 - 3 November 2009

asli

1 jilid

531. Berkas penuntutan atas nama Drs. Gunawan Pranoto, Apt. sebagai Direktur Utama PT Kimia Farma Persero/mantan Komisaris PT Kimia Farma Trading & Distribution dan Rinaldi Yusuf sebagai Direktur PT Rifa Jaya Mulia dalam perkara proyek pengadaan alat kesehatan medik untuk Daerah Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat tahun 2003 yang menggunakan Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Proyek (ABT DIP) tahun 2003 pada bagian proyek peningkatan pelayanan medik spesialistik Departemen Kesehatan RI.

3 Desember 2009 - 1 April 2010

asli, kopi

1 sampul

532. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Drs. Gunawan Pranoto, Apt. sebagai Direktur Utama PT Kimia Farma Persero/mantan Komisaris PT Kimia Farma Trading & Distribution dan Rinaldi Yusuf sebagai Direktur PT Rifa Jaya Mulia dalam perkara proyek pengadaan alat kesehatan medik untuk Daerah Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat tahun 2003 yang menggunakan Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Proyek (ABT DIP) tahun 2003 pada bagian proyek peningkatan pelayanan medik spesialistik Departemen Kesehatan RI.

13 April - 20 April 2010

asli, kopi

1 sampul

533. Berkas persidangan pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas nama Drs. Gunawan Pranoto, Apt. sebagai Direktur Utama PT Kimia Farma Persero/mantan Komisaris PT Kimia Farma Trading & Distribution dan Rinaldi Yusuf sebagai Direktur PT Rifa Jaya Mulia dalam perkara proyek pengadaan alat kesehatan medik untuk Daerah Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat tahun 2003 yang menggunakan Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Proyek (ABT DIP) tahun 2003 pada bagian proyek peningkatan pelayanan medik spesialisik Departemen Kesehatan RI.

31 Mei 2010 - 13 Januari 2011

asli,kopi

1 sampul

534. Berkas peninjauan kembali atas nama Drs. Gunawan Pranoto, Apt. sebagai Direktur Utama PT Kimia Farma Persero/mantan Komisaris PT Kimia Farma Trading & Distribution dan Rinaldi Yusuf sebagai Direktur PT Rifa Jaya Mulia dalam perkara proyek pengadaan alat kesehatan medik untuk Daerah Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat tahun 2003 yang menggunakan Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Proyek (ABT DIP) tahun 2003 pada Bagian proyek peningkatan pelayanan medik spesialisik Departemen Kesehatan RI.

16 Februari - 20 Juni 2012

asli, kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Pemberian Suap terkait Persetujuan Usulan Anggaran Program Stimulus Fiskal Departemen Perhubungan RI Tahun 2009

Hontjo Kurniawan

535. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/14/23/IV/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Hontjo Kurniawan sebagai Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bhakti dalam perkara pemberian suap kepada Abdul Hadi Djamal sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait persetujuan usulan anggaran Program Stimulus Fiskal Departemen Perhubungan RI tahun 2009.

2 Maret - 24 April 2009

kopi

1 jilid

536. Berkas penuntutan atas nama Hontjo Kurniawan sebagai Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bhakti dalam perkara pemberian suap kepada Abdul Hadi Djamal sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait persetujuan usulan anggaran Program Stimulus Fiskal Departemen Perhubungan RI tahun 2009.

8 Mei - 6 Juli 2009

asli

1 sampul

537. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung atas nama Hontjo Kurniawan sebagai Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bhakti dalam perkara pemberian suap kepada Abdul Hadi Djamal sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait persetujuan usulan anggaran Program Stimulus Fiskal Departemen Perhubungan RI tahun 2009.

16 Juli 2009 - 30 November 2010

asli, kopi

1 sampul

Darmawati Dareho, S.H., M.M.

- 538 Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/16/23/IV/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Darmawati Dareho, S.H., M.M. sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Distrik Navigasi Tanjung Priok Departemen Perhubungan RI dalam perkara pemberian suap berupa sejumlah uang kepada Abdul Hadi Djamal sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mendapatkan persetujuan usulan anggaran Program Stimulus Fiskal Departemen Perhubungan RI tahun 2009.

2 Maret - 8 April 2009

kopi

1 jilid

539. Berkas penuntutan atas nama Darmawati Dareho, S.H., M.M. sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Distrik Navigasi Tanjung Priok Kementerian Perhubungan dalam perkara pemberian suap berupa sejumlah uang kepada Abdul Hadi Djamal sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mendapatkan persetujuan usulan anggaran Program Stimulus Fiskal Departemen Perhubungan RI tahun 2009.

8 Mei - 6 Juli 2009

asli, konsep

1 sampul

540. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Darmawati Dareho, S.H., M.M. sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Distrik Navigasi Tanjung Priok Kementerian Perhubungan dalam perkara pemberian suap berupa sejumlah uang kepada Abdul Hadi Djamal sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mendapatkan persetujuan usulan anggaran Program Stimulus Fiskal Departemen Perhubungan RI tahun 2009.

14 - 27 Juli 2009

asli, kopi

1 sampul

Abdul Hadi Djamal

541. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/17/23/V/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Abdul Hadi Djamal sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam perkara penerimaan suap dari Hontjo Kurniawan dan Darmawati Dareho, S.H., M.M. terkait persetujuan usulan anggaran Program Stimulus Fiskal Departemen Perhubungan RI tahun 2009.

2 Maret - 12 Mei 2009

kopi

1 jilid

542. Berkas penuntutan atas nama Abdul Hadi Djamal sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam perkara penerimaan suap dari Hontjo Kurniawan dan Darmawati Dareho, S.H., M.M. terkait persetujuan usulan anggaran Program Stimulus Fiskal Departemen Perhubungan RI tahun 2009.

10 Juni - 7 Oktober 2009

asli

1 sampul

543. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Abdul Hadi Djamal sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam perkara penerimaan suap dari Hontjo Kurniawan dan Darmawati Dareho, S.H., M.M. terkait persetujuan usulan anggaran Program Stimulus Fiskal Departemen Perhubungan RI tahun 2009.

22 - 30 Oktober 2009

asli, kopi

1 sampul

544. Berkas peninjauan kembali atas nama Abdul Hadi Djamal sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam perkara penerimaan suap dari Hontjo Kurniawan dan Darmawati Dareho, S.H., M.M. terkait persetujuan usulan anggaran Program Stimulus Fiskal Departemen Perhubungan RI tahun 2009.

25 Januari - 10 Mei 2010

asli, kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Pasar Sentral, Terminal Induk, Rumah Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Mes Pegawai serta Kantor Cabang Bank Papua pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan Daerah dan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Supiori, Papua Tahun Anggaran 2006-2008

Jules Fitzgerald Warikar

545. Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi atas nama Jules Fitzgerald Warikar sebagai Bupati Supiori Papua dalam perkara penunjukan langsung PT Multi Makmur Jaya Abadi dalam pelaksanaan proyek pembangunan pasar sentral, terminal induk, rumah dinas pegawai negeri sipil, dan mes pegawai serta kantor cabang Bank Papua pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan Daerah dan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Supiori, Papua tahun anggaran 2006-2008.

Nb. Akses tertutup.

27 Maret 2009

konsep

1 sampul

546. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/23/23/IX/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Jules Fitzgerald Warikar sebagai Bupati Supiori Papua dalam perkara penunjukan langsung PT Multi Makmur Jaya Abadi dalam pelaksanaan proyek pembangunan pasar sentral, terminal induk, rumah dinas pegawai negeri sipil, dan mes pegawai serta kantor cabang Bank Papua pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan Daerah dan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Supiori, Papua tahun anggaran 2006-2008.

30 Maret - 17 September 2009

kopi

1 jilid

547. Berkas penyidikan atas nama Jules Fitzgerald Warikar sebagai Bupati Supiori Papua dalam perkara penunjukan langsung PT Multi Makmur Jaya Abadi dalam pelaksanaan proyek pembangunan pasar sentral, terminal induk, rumah dinas pegawai negeri sipil, dan mes pegawai serta kantor cabang Bank Papua pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan Daerah dan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Supiori, Papua tahun anggaran 2006-2008.

13 April - 7 Oktober 2009

asli, kopi

1 sampul

548. Berkas penuntutan atas nama Jules Fitzgerald Warikar sebagai Bupati Supiori Papua dalam perkara penunjukan langsung PT Multi Makmur Jaya Abadi dalam pelaksanaan proyek pembangunan pasar sentral, terminal induk, rumah dinas pegawai negeri sipil, dan mes pegawai serta kantor cabang Bank Papua pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan Daerah dan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Supiori, Papua tahun anggaran 2006-2008.

20 Oktober 2009 - 28 Februari 2010

asli, kopi

1 sampul

549. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Jules Fitzgerald Warikar sebagai Bupati Supiori Papua dalam perkara penunjukan langsung PT Multi Makmur Jaya Abadi dalam pelaksanaan proyek pembangunan pasar sentral, terminal induk, rumah dinas pegawai negeri sipil, dan mes pegawai serta kantor cabang Bank Papua pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan Daerah dan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Supiori, Papua tahun anggaran 2006-2008.

4 - 11 Maret 2010

asli, kopi

1 sampul

550. Berkas penyitaan aset dan eksekusi atas nama Jules Fitzgerald Warikar sebagai Bupati Supiori Papua dalam perkara penunjukan langsung PT Multi Makmur Jaya Abadi dalam pelaksanaan proyek pembangunan pasar sentral, terminal induk, rumah dinas pegawai negeri sipil, dan mes pegawai serta kantor cabang Bank Papua pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan Daerah dan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Supiori, Papua tahun anggaran 2006-2008.

19 Maret - 10 Mei 2010

asli, kopi

1 sampul

Suryadi Sentosa

551. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/26/23/IX/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Suryadi Sentosa sebagai Komisaris PT Multi Makmur Jaya Abadi dalam perkara pembangunan Pasar Sentral Supiori, terminal induk, rumah dinas, dan renovasi Pasar Sentral Bank Papua dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Supiori tahun anggaran 2006-2008.

31 Maret - 24 September 2009

kopi

1 jilid

552. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/26/23/IX/2009 berisi lampiran barang bukti (Jilid I) atas nama Suryadi Sentosa sebagai Komisaris PT Multi Makmur Jaya Abadi dalam perkara pembangunan Pasar Sentral Supiori, terminal induk, rumah dinas, dan renovasi Pasar Sentral Bank Papua dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Supiori tahun anggaran 2006-2008.

31 Maret - 24 September 2009

kopi

1 jilid

553. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/26/23/IX/2009 berisi lampiran barang bukti (Jilid III) atas nama Suryadi Sentosa sebagai Komisaris PT Multi Makmur Jaya Abadi dalam perkara pembangunan Pasar Sentral Supiori, terminal induk, rumah dinas, dan renovasi Pasar Sentral Bank Papua dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Supiori tahun anggaran 2006-2008.

31 Maret - 24 September 2009

kopi

1 jilid

554. Berkas penyidikan atas nama Suryadi Sentosa sebagai Komisaris Utama PT Multi Makmur Jaya Abadi dalam perkara pembangunan Pasar Sentral Supiori, terminal induk, rumah dinas, dan renovasi Pasar Sentral Bank Papua dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Supiori tahun anggaran 2006-2008.

13 April - 14 Oktober 2009

asli, kopi

1 sampul

555. Berkas penuntutan atas nama Suryadi Sentosa sebagai Komisaris Utama PT Multi Makmur Jaya Abadi dalam perkara pembangunan Pasar Sentral Supiori, terminal induk, rumah dinas, dan renovasi Pasar Sentral Bank Papua dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Supiori tahun anggaran 2006-2008.

23 Oktober 2009 - 25 Februari 2010

asli, konsep, kopi

1 sampul

556. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung atas nama Suryadi Sentosa sebagai Komisaris Utama PT Multi Makmur Jaya Abadi dalam perkara pembangunan Pasar Sentral Supiori, terminal induk, rumah dinas, dan renovasi Pasar Sentral Bank Papua dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Supiori tahun anggaran 2006-2008.

4 Maret - 9 November 2010

asli, kopi

1 sampul

557. Berkas eksekusi dan penyitaan aset atas nama Suryadi Sentosa sebagai Komisaris Utama PT Multi Makmur Jaya Abadi dalam perkara pembangunan Pasar Sentral Supiori, terminal induk, rumah dinas, dan renovasi Pasar Sentral Bank Papua dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Supiori tahun anggaran 2006-2008.

8 Desember 2010 - 25 Juli 2011

asli, kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Aset Eks Yayasan Dana Tabungan Pesangon Pekerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (YDTP-MIGAS) Tahun 2003 – 2008

Muzni Tambusai

558. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-20/23/VII/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll atas nama Muzni Tambusai sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI/mantan Tim Pelaksana Pengelolaan Aset Eks Yayasan Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (YDTP-Migas) dalam perkara penyalahgunaan kekayaan sisa hasil likuidasi dari YDTP-Migas. Disertai lampiran berkas perkara.

6 April - 29 Juli 2009

kopi

2 jilid

559. Berkas penuntutan atas nama Muzni Tambusai sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI/mantan Tim Pelaksana Pengelolaan Aset Eks Yayasan Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (YDTP-Migas) dalam perkara penyalahgunaan kekayaan sisa hasil likuidasi dari YDTP-Migas.

14 Agustus - 8 Desember 2009

asli, kopi

1 sampul

560. Berkas persidangan Pengadilan Negeri atas nama Muzni Tambusai sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI/mantan Tim Pelaksana Pengelolaan Aset Eks Yayasan Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (YDTP-Migas) dalam perkara penyalahgunaan kekayaan sisa hasil likuidasi dari YDTP-Migas.

15 Desember 2009 - 5 Januari 2010

asli, kopi

1 sampul

561. Kontra memori peninjauan kembali atas nama Muzni Tambusai sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI/mantan Tim Pelaksana Pengelolaan Aset Eks Yayasan Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (YDTP-Migas) dalam perkara penyalahgunaan kekayaan sisa hasil likuidasi dari YDTP-Migas.

9 Juni - 1 Juli 2010

asli

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2004

Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si. dan Drs. H. Daeng Rusnandi, M.B.A., M.Si.

562. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/28/23/X/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si. sebagai Bupati Kabupaten Natuna dan Drs. H. Daeng Rusnandi, M.B.A., M.Si. sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna dalam perkara penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna, Riau Tahun Anggaran 2004.

24 April - 30 Oktober 2009

kopi

1 jilid

563. Berkas penuntutan atas nama Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si. sebagai Bupati Kabupaten Natuna dan Drs. H. Daeng Rusnandi, M.B.A., M.Si. sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna dalam perkara penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna, Riau Tahun Anggaran 2004.

28 Oktober 2009 - 15 Februari 2010

asli

1 jilid

564. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si. sebagai Bupati Kabupaten Natuna dan Drs. H. Daeng Rusnandi, M.B.A., M.Si. sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna dalam perkara penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna, Riau Tahun Anggaran 2004.

22 Februari - 19 Maret 2010

asli, kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan *Outsourcing* Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (*Customer Management System*) di PT PLN Distribusi Jawa Timur Tahun 2004-2007

Ir. Hariadi Sadono, M.M.

565. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/27/23/10/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Ir. Hariadi Sadono, M.M. sebagai Direktur Perusahaan Listrik Negara (PLN) Luar Jawa Bali/General Manager PT PLN Distribusi Jawa Timur dalam perkara pengadaan *outsourcing* pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (*Customer Management System*) berbasis teknologi informasi pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Jawa Timur tahun anggaran 2004-2008.

27 April - 27 Oktober 2009

kopi

1 jilid

566. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/27/23/10/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Ir. Hariadi Sadono, M.M. sebagai Direktur Perusahaan Listrik Negara (PLN) Luar Jawa Bali/General Manager PT PLN Distribusi Jawa Timur dalam perkara pengadaan *outsourcing* pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (*Costumer Management System*) berbasis teknologi informasi pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Jawa Timur tahun anggaran 2004-2008.

27 April - 27 Oktober 2009

asli, kopi

1 jilid

567. Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Tersangka atas nama Ir. Hariadi Sadono, M.M. sebagai Direktur Perusahaan Listrik Negara (PLN) Luar Jawa Bali/General Manager PT PLN Distribusi Jawa Timur dalam perkara pengadaan *outsourcing* pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (*Costumer Management System*) berbasis teknologi informasi pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Jawa Timur tahun anggaran 2004-2008.

11 Mei - 12 Agustus 2009

asli

1 sampul

568. Berkas penuntutan atas nama Ir. Hariadi Sadono, M.M. sebagai Direktur Perusahaan Listrik Negara (PLN) Luar Jawa Bali/General Manager PT PLN Distribusi Jawa Timur dalam perkara pengadaan *outsourcing* pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (*Costumer Management System*) berbasis teknologi informasi pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Jawa Timur tahun anggaran 2004-2008.

10 November-14 Desember 2009

asli, kopi

1 sampul

569. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Ir. Hariadi Sadono, M.M. sebagai Direktur Perusahaan Listrik Negara (PLN) Luar Jawa Bali/General Manager PT PLN Distribusi Jawa Timur dalam perkara pengadaan *outsourcing* pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (*Costumer Management System*) berbasis teknologi informasi pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Jawa Timur tahun anggaran 2004-2008.

19 Maret - 29 Maret 2010

asli, kopi

1 sampul

570. Berkas persidangan pada Pengadilan Tinggi atas nama Ir. Hariadi Sadono, M.M. sebagai Direktur Perusahaan Listrik Negara (PLN) Luar Jawa Bali/General Manager PT PLN Distribusi Jawa Timur dalam perkara pengadaan *outsourcing* pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (*Costumer Management System*) berbasis teknologi informasi pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Jawa Timur tahun anggaran 2004-2008.

30 April - 6 Oktober 2010

asli, kopi

1 sampul

R. Saleh Abdul Malik, Achmad Fathony Zakaria, dan Arthur Pelupessy

571. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/23/23/12/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama R. Saleh Abdul Malik sebagai Komisaris Utama PT Altelindo Karyamandiri, Achmad Fathony Zakaria sebagai Direktur Operasional PT Altelindo Karya Mandiri, dan Arthur Pelupessy sebagai Direktur Utama PT Arti Duta Aneka Usaha dalam perkara pengadaan *outsourcing* pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (*Customer Management System*) pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Jawa Timur tahun anggaran 2004-2005.

27 April - 31 Desember 2009

kopi

1 jilid

572. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/23/23/12/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll atas nama R. Saleh Abdul Malik sebagai Komisaris Utama PT Altelindo Karya Mandiri, Achmad Fathony Zakaria sebagai Direktur Operasional PT Altelindo Karya Mandiri, dan Arthur Pelupessy sebagai Direktur Utama PT Arti Duta Aneka Usaha dalam perkara pengadaan *outsourcing* Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (*Customer Management System*) pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Jawa Timur tahun anggaran 2004-2005.

27 April - 31 Desember 2009

kopi

1 jilid

573. Berkas penuntutan atas nama R. Saleh Abdul Malik sebagai Komisaris Utama PT Altelindo Karyamandiri, Achmad Fathony Zakaria sebagai Mantan Direktur Operasional PT Altelindo Karya Mandiri, dan Arthur Pelupessy sebagai Direktur Utama PT Arti Duta Aneka Usaha dalam perkara pengadaan *outsourcing* pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (*Costumer Management System*) berbasis teknologi informasi pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Jawa Timur tahun anggaran 2004-2008.

12 Januari - 15 Februari 2010

asli, kopi

1 sampul

574. Nota pembelaan pribadi dan penasehat hukum atas nama R. Saleh Abdul Malik sebagai Komisaris Utama PT Altelindo Karyamandiri, Achmad Fathony Zakaria sebagai mantan Direktur Operasional PT Altelindo Karya Mandiri dan Arthur Pelupessy sebagai Direktur Utama PT Arti Duta Aneka Usaha dalam perkara pengadaan *outsourcing* Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (*Costumer Management System*) berbasis teknologi informasi pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Jawa Timur Tahun Anggaran 2004-2008.

24 Mei 2010

asli, kopi

1 sampul

575. Berkas peninjauan kembali atas nama R. Saleh Abdul Malik sebagai Komisaris Utama PT Altelindo Karyamandiri, Achmad Fathony Zakaria sebagai Mantan Direktur Operasional PT Altelindo Karya Mandiri, Arthur Pelupessy sebagai Direktur Utama PT Arti Duta Aneka Usaha dalam perkara pengadaan *outsourcing* pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (*Costumer Management System*) berbasis teknologi informasi pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Jawa Timur tahun anggaran 2004-2008.

28 Juli 2010 - 30 Maret 2011

asli, kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dan Dana Kantor Bank Jawa Barat untuk Kepentingan Pribadi atau Pihak Lain Tahun 2002-2005

Umar Sjarifuddin

576. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP/26/23/X/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Umar Sjarifuddin sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dalam perkara penyalahgunaan wewenang dan dana kantor Pembangunan Daerah Jawa Barat untuk kepentingan pribadi atau pihak lain tahun 2002-2005.

29 April - 30 November 2009

asli

1 jilid

577. Berkas penuntutan atas nama Umar Sjarifuddin sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dalam perkara penyalahgunaan wewenang dan dana kantor Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat untuk kepentingan pribadi atau pihak lain tahun 2002-2005.

17 November - 31 Desember 2009

asli, kopi

1 sampul

578. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung atas nama Umar Sjarifuddin sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dalam perkara penyalahgunaan wewenang dan dana kantor Pembangunan Daerah Jawa Barat untuk kepentingan pribadi atau pihak lain tahun 2002-2005.

1 April - 24 Agustus 2010

asli, kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi proyek Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Gas (Pemjadig) tahun 2003 dan Penyuapan Terkait Permohonan Persetujuan terhadap Rencana *Initial Public Offering* yang Akan Dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara

Drs. Washington Mampe Parulian Simanjuntak

579. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-32/23/11/2009 berisi Laporan Kejadian Korupsi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, dll. atas nama Drs. Washington Mampe Parulian Simanjuntak sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara dalam perkara penyalahgunaan wewenang pada proyek Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Gas (Pemjadig) tahun 2003 dan penyuapan terkait permohonan persetujuan terhadap rencana *initial public offering* yang akan dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara.

6 Agustus - 16 November 2009

kopi

1 jilid

580. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor: BP-32/23/11/2009 berisi lampiran barang bukti (Jilid III) atas nama Drs. Washington Mampe Parulian Simanjuntak sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara dalam perkara penyalahgunaan wewenang pada proyek Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Gas (Pemjadig) tahun 2003 dan penyuapan terkait permohonan persetujuan terhadap rencana *initial public offering* yang akan dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara.

6 Agustus - 16 November 2009

kopi

1 jilid

581. Berkas penuntutan atas nama Drs. Washington Mampe Parulian Simanjuntak sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara dalam perkara penyalahgunaan wewenang pada proyek Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Gas (Pemjadig) tahun 2003 dan penyuaapan terkait permohonan persetujuan terhadap rencana *initial public offering* yang akan dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara.

6 Januari - 26 April 2010

asli

1 sampul

582. Berkas persidangan pada Pengadilan Negeri atas nama Drs. Washington Mampe Parulian Simanjuntak sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara dalam perkara penyalahgunaan wewenang pada Proyek Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Gas (Pemjadig) tahun 2003 dan penyuaapan terkait permohonan persetujuan terhadap rencana *initial public offering* yang akan dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara.

3 - 10 Mei 2010

asli, kopi

1 sampul

583. Berkas eksekusi dan penyitaan aset atas nama Drs. Washington Mampe Parulian Simanjuntak sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara dalam perkara penyalahgunaan wewenang pada proyek Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Gas (Pemjadig) tahun 2003 dan penyuaapan terkait permohonan persetujuan terhadap rencana *initial public offering* yang akan dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara.

26 Mei 2010 - 1 Agustus 2012

asli, kopi

1 sampul

Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Sejumlah Uang terkait Pemenangan Miranda Swaray Goeltom pada Pelaksanaan Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Tahun 2004

Hamka Yamdhu Y. R.

584. Surat tuntutan atas nama Hamka Yamdhu Y. R. selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam perkara penerimaan sejumlah uang terkait pemenangan Miranda Swaray Goeltom pada pelaksanaan pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) tahun 2004.

4 Mei 2010

asli

1 jilid

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Iklan Layanan Masyarakat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006-2007

Jornal Effendi Siahaan

585. Berkas penyidikan atas nama Jurnal Effendi Siahaan sebagai Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam perkara pengadaan iklan layanan masyarakat termasuk iklan tentang penegakan hukum di Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2006-2007.

12 -19 Oktober 2010

asli, kopi

2 lembar

INDEKS

A

Abdillah (Drs. Ak. M.B.A.)	: 245, 246, 247, 248, 249, 371
Abdullah, Burhanuddin (Ir. M.A.)	: 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389
Abidin, Antony Zeidra	: 403, 404, 405, 406, 407, 408
Aceh Tenggara	: 503, 504, 505, 506
Achmad, Sudi (S.H.)	: 102, 103, 104, 105
Ahmad, Abubakar (S.H.)	: 171, 172, 173, 174, 175
Al Hadar, Hadi A. Wayarabi (Drs.)	: 229, 230, 231
Algamar, Djoni Anwir	: 485, 486, 487, 488, 489
Aliyudin, Uuh (Ir. M.M.)	: 145, 146, 147, 148, 149
Amiarsa, Suparba W. (Drs.)	: 229, 230, 231
Amin, Hamdani	: 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54
Ananda, Sylvira (Ir. M.Sc.)	: 126, 127, 128, 129
Apendi	: 223, 224, 225
Aspar, Samsuri (Drs. M.M.)	: 443, 444, 445
Azirwan (Drs.)	: 455, 456, 457

B

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	: 109, 110, 111, 112, 113, 114
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI	: 359, 360, 361, 362
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat	: 325, 326, 327, 328, 329
Badan Pengatur Hilir Migas	: 507, 508, 509, 510, 511
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)	: 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244
Badan Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-Api (BPPTAA)	: 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431
Badan Penyehatan Perbankan Nasional	: 378
Badan Planologi Kehutanan (Baplan)	: 458, 459, 460, 461, 462
Badan Riset Kelautan dan Perikanan	: 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
Bali	: 283, 565, 566, 567, 568, 10, 569, 570
Banda Aceh	: 347, 348, 349
Bandar Udara Samarinda-Kutai Kartanegara	: 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219
Bank Indonesia (BI)	: 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 584

Bank Papua	: 545, 546, 547, 548, 549, 550
Bank Penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia	: 378
Banyuasin	: 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 458, 459, 460, 461, 462
Batam	: 285
Batang Hari	: 285
Bengkulu	: 285
Betawi, Daud Solleman (Ir.)	: 373, 374, 375, 376, 377
Bintan	: 455, 456, 457
Boedoro, Hendy (S.H. M.Si)	: 201, 202, 203, 204, 205, 206
Bolmong	: 282
Budhyana, Ijuddin (Drs. M.Si.)	: 295, 298, 299, 300, 301
Budi, Setia	: 441, 442
Budiarto, R. Bambang (Drs. M.Si)	: 55, 56, 57, 58, 59
C	
Chesputra, Azwar	: 432, 433, 434
CV Budi Jaya	: 79, 80, 81, 82, 83
CV Dareta	: 356, 357, 358
D	
Dahuri, Rokhmin (Prof. Dr. Ir. M.S.)	: 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193
Dangin, Ranendra	: 499, 500, 501, 502
Dareho, Darmawati (S.H. M.M.)	: 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544
Darham, M. Sjachriel (Drs.)	: 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
Darmono, Raden Soedji (S.H.)	: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Dasirwan (Drs.)	: 160, 161, 162, 163, 165
Daud, Hengky Samuel (M.B.A.)	: 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289
Dentjik, Mochamad	: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Departemen Dalam Negeri	: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278
Departemen Hukum dan HAM RI	: 220, 221, 222, 223, 224, 225
Departemen Kehutanan dan Perkebunan RI	: 141, 142, 143, 144
Departemen Kelautan dan Perikanan RI	: 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193
Departemen Kesehatan RI	: 517, 518, 519, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534
Departemen Keuangan RI	: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Departemen Luar Negeri RI	: 452, 453, 454
Departemen Perhubungan RI	: 20, 21, 22, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 538
Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI	: 499, 500, 501, 502
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI	: 312, 313, 314, 315, 336, 339, 339, 341, 337, 338, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 558, 559, 560, 561
Dermaga Tanjung Api-Api	: 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434
Desky, Armen (Drs. M.M.)	: 503, 504, 505, 506
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI	: 239, 240, 241, 242, 243, 244, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 490, 491, 492, 493, 494, 496, 497, 498, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 584
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna	: 441, 442, 562, 563, 564
Dharmawan, Vaylana	: 339, 340, 341, 342
Dimara, Daan (Drs. M.A.)	: 69, 70, 71
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	: 150, 151, 152, 153, 154
Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Supiori	: 545, 546, 547, 548, 549, 550
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori;	: 545, 546, 547, 548, 549, 550
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah	: 330, 331, 332, 333, 334, 335
Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat	: 325, 326, 327, 328, 329
Djamal, Abdul Hadi	: 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544
Djasit, Saleh (S.H.)	: 255, 256, 257, 258, 259, 260
DKI Jakarta	: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
Dompu	: 171, 172, 173, 174, 175

E

Eda Makmur (Drs.)	: 180, 181, 182
Edyatmo, Radite	: 446, 447, 448
Effendi, Bachrun (Drs.)	: 336, 337, 338, 350, 351, 352
Erizal	: 463, 464, 465

F

Faishal, M. Yusuf Erwin	: 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434
Fatah, Suwarna Abdul	: 135, 136, 137, 138, 139, 140
Fuad, Erry	: 356, 357, 358

G

Garut	: 316, 317, 318, 319
Goeltom, Miranda Swaray	: 584
Gunawan, Urip Tri (S.H.)	: 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420

H

Hamzah, Arifin	: 446, 447, 448
Harahap, Ishak	: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Harefa, F.T.K.	: 60, 61, 62
Harefa, Faebudodo Tjahja Kelana	: 60, 61, 62
Harefa, Tjetjep	: 60, 61, 62
Hartiyoman, Asep (S.Pi)	: 325, 326, 327, 328, 329
Hendrarsono, Kuntjoro (Drs. M.B.A.)	: 84, 85, 86, 87
Hidayat, Mochamad Slamet	: 463, 464, 465
Husein, Izzat (Drs. M.M.)	: 437, 438, 439, 440
Hutapea, Bun Bun E.J.	: 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396

I

Indra, Hilman	: 432, 433, 434
Iqbal, Mohammad (Ir.)	: 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484
Iskandar (Drs.)	: 435, 436
Iskandarsyah, Reno (S.H.)	: 420
Ismunarso	: 520, 521

J

Jaafar, Tengku Azmun (S.H.)	: 308, 309, 310, 311
Jakarta	: 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 379, 380, 381, 382
Jakarta Pusat	: 368, 369, 370

Jambi	: 379, 380, 381, 382
Jambi	: 285
Jawa Barat	: 283, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 576, 577, 578
Jawa Tengah	: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 283, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335
Jawa Timur	: 521, 522, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575
Joenoës, M. Irawady (S.H.)	: 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370
Johor Bahru	: 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182
K	
Kalimantan Selatan	: 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
Kalimantan Timur	: 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 217, 218, 219, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 283, 441, 442, 443, 444, 445
Kantaprawira, Rusadi (Prof. Dr. S.H.)	: 63, 64, 65
Kantor Pertanahan Kota Surabaya	: 510
Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	: 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154
Karnawi	: 347, 348, 349
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura	: 463, 464, 465
Kedutaan Besar RI untuk Malaysia	: 226, 227, 228, 229, 230, 231
Kejaksaan Agung RI	: 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420
Kementerian Keuangan RI	: 466, 467, 468, 469, 470, 471
Kementerian Perhubungan RI	: 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI	: 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362
Kendal	: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
Kendari	: 281
Kepolisian RI	: 92, 93, 94, 95, 286
Kepulauan Riau	: 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462
Kinabalu	: 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454

Komisi Pemilihan Umum (KPU)	: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	: 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484
Komisi Yudisial RI	: 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370
Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru	: 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182
Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang	: 115, 116, 117, 118, 119, 120
Konsulat Jenderal RI (KJRI) Kota Kinabalu	: 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454
Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	: 102, 103, 104, 105
Kuala Lumpur	: 226, 227, 228, 229, 230, 231
Kuching	: 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454
Kurnia, Wahyu (Drs. M.B.A.)	: 292, 293, 294, 295, 297, 301
Kurniawan, Hontjo	: 535, 536, 537, 541, 542, 543, 544
Kusmana, Ade (Ir. M.M.)	: 325, 326, 327, 328, 329
Kusumah, Mulyana Wira (Drs.)	: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Kutai Kartanegara	: 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 441, 442, 443, 444, 445

L

Lampung Tengah	: 285
Leluasa, M. Fachri Andi	: 432, 433, 434
Lembang	: 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346
Let Let, Moch. Harun (Drs.)	: 20, 21, 22
Lim Kian Yin	: 88, 89, 90, 91
Lippo Group	: 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478
Lombok Barat	: 435, 436, 437, 438, 439, 440

M

Machron, Mas Tata	: 449, 450, 451
Madiono (dr. M.P.H.)	: 517, 518, 519
Mahkamah Agung RI	: 7, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 315, 342
Mahkamah Konstitusi	: 10
Makassar	: 261, 262, 263, 264, 282, 350, 351, 352
Malau, Tansean Parlindungan	: 485, 486, 487, 488, 489

Malaysia	: 115, 116, 117, 118, 119, 120, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454
Malik, R. Saleh Abdul	: 571, 572, 573, 574, 575
Maluku Tenggara	: 20, 21, 22
Maluku Utara	: 281
Manado	: 512, 513, 514, 515, 516
Manan, Bagir	: 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
Manopo, Bram H.D. (M.B.A.)	: 9, 10, 11, 12, 13
Mantoro, Suseno Tjipto (S.E.)	: 312, 313, 314, 315
Manullang, Sihol P. (Ir.)	: 37, 38, 39
Margareta, Lidia	: 307
Martias	: 155, 156, 157, 158, 159
Marulitua, Marudin Saur (S.H. M.M.)	: 312, 313, 314, 315
Maula, Baso Amiruddin (Drs. S.H. M.H. M.Si.)	: 261, 262, 263, 264
Mawardi, Oentarto Sindung	: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278
Medan	: 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 284, 347, 348, 349, 371, 372
Minahasa	: 282
N	
Nanggroe Aceh Darusalam	: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Nasution, M. Al Amien Nur (S.E.)	: 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462
Natuna	: 562, 563, 564
Nego, Abed	: 307
Nugraha (Drs.)	: 446, 447, 448
Nugraha, Ayi	: 446, 447, 448
Nur L., Harun M. (Drs.)	: 20, 21, 22
Nursalim, Sjamsul	: 378
Nusa Tenggara Barat	: 171, 172, 173, 174, 175
O	
Oesman, Syahrial	: 421, 422, 423
Oey Hoey Tiong	: 397, 398, 399, 400, 401, 402
P	
Palang Merah Indonesia (PMI)	: 529

Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat	: 523, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 531, 532, 533, 534
Palembang	: 353, 354, 355
Panambunan, Vonnie Anneke	: 217, 218, 219
Pane, Agus Sjafiin	: 466, 467, 468, 469, 470, 471
Pantai Air Telang	: 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434
Papua	: 545, 546, 547, 548, 549, 550
Pasar Sentral Bank Papua	: 551, 553, 552, 554, 555, 556, 557
Pasar Sentral Supiori	: 551, 553, 552, 554, 555, 556, 557
Patiasiana, Jules F. (Drs.)	: 160, 161, 162
Payapo, Muhammad Khusnul Yakin (Drs.)	: 115, 116, 117
Pekanbaru	: 353, 354, 355
Pelalawan	: 308, 309, 310, 311
Pelupessy, Arthur	: 571, 572, 573, 574, 575
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	: 217, 218, 219
Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat	: 435, 436, 437, 438, 439, 440
Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo	: 520, 521, 522
Pemerintah Kabupaten Batang Hari	: 285
Pemerintah Kabupaten Bolmong	: 282
Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	: 285
Pemerintah Kabupaten Minahasa	: 282
Pemerintah Kabupaten Talaud	: 282
Pemerintah Kabupaten Tanggamu	: 285
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	: 285
Pemerintah Kabupaten Tebo	: 285
Pemerintah Kota Jambi	: 285
Pemerintah Kota Kendari	: 281
Pemerintah Kota Makassar	: 262, 263, 264, 282
Pemerintah Kota Manado	: 512, 513, 514, 515, 516
Pemerintah Kota Medan	: 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 284
Pemerintah Provinsi Bali	: 283
Pemerintah Provinsi Bengkulu	: 285
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	: 585
Pemerintah Provinsi Jambi	: 379, 380, 381, 382

Pemerintah Provinsi Jawa Barat	: 283, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 307
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	: 283
Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam	: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Pemerintah Provinsi Riau	: 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	: 282
Pemerintah Provinsi Sumatra Utara	: 284
Penang	: 115, 116, 117, 118, 119, 120
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	: 14, 15, 16, 17, 18, 19
Pengadilan Tinggi Yogyakarta	: 96, 97, 98
Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia (RRI)	: 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
Perusahaan Listrik Negara (PLN) Luar Jawa Bali	: 565, 566, 567, 568, 569, 570
Pohan, Aulia Thantawi	: 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396
Pranoto, Gunawan (Drs. Apt.)	: 529, 531, 532, 533, 534
Prasojo, Sugiyo	: 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238
Probosutedjo	: 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
PT Altelindo Karyamandiri	: 571, 572, 573, 574, 575
PT Armada Usaha Bersama	: 130, 131, 132, 133, 134
PT Arti Duta Aneka Usaha	: 571, 572, 573, 574, 575
PT Bank Danamon	: 385
PT Bank Lippo, Tbk.	: 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478
PT Bank Negara Indonesia 46	: 520, 521, 522
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat	: 576, 577, 578
PT Binamina Karya Perkasa	: 495, 496, 497, 498
PT Bio Farma	: 523, 524, 525, 526, 527, 528
PT Buntala Bersaudara Daramaja;	: 320, 321, 322, 323, 324
PT Chandratex Indo Artha	: 432, 433, 434
PT Gita Vidya Utama	: 350, 351, 352
PT Industri Sandang Nusantara	: 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 91
PT Istana Sarana Raya	: 279, 280, 284, 287, 288, 289, 285, 283, 282, 281
PT Kimia Farma	: 529, 531, 532, 533, 534
PT Kimia Farma Trading & Distribution	: 531, 532, 533, 534
PT Kurnia Jaya Wira Bhakti;	: 535, 536, 537
PT Mahakam Diastar Internasional (PT MDI)	: 217, 218, 219
PT Mulia Agung Utama	: 60, 61, 62

PT Mulindo Agung Trikarsa	: 353, 354, 355
PT Multi Makmur Jaya Abadi	: 551, 553, 552, 554, 555, 556, 557, 545, 546, 547, 548, 549, 550
PT Panton Pauh Putra	: 347, 348, 349
PT Perusahaan Gas Negara	: 579, 580, 581, 582, 583
PT Perusahaan Gas Negara (Persero)	: 507, 508, 509, 510, 511
Wilayah II Jawa Bagian Timur	
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)	: 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575
Distribusi Jawa Timur	
PT Putra Pobiagan Mandiri	: 9, 11, 12, 13
PT Rajawali Nusantara Indonesia	: 499, 500, 501, 502
PT Rifa Jaya Mulia;	: 530, 531, 532, 533, 534
PT Royal Standard	: 74, 72, 73
PT Satal Nusantara	: 279, 280, 284, 285, 283, 282, 281
PT Sentra Artha Futures;	: 520, 521, 522
PT Sentra Artha Utama	: 520, 521, 522
PT Sentral Filindo	: 223, 224, 225
PT Setiajaya Mobilindo	: 303, 304, 305, 306, 307
PT Survindo Indah Prestasi	: 37, 38, 39
PT Surya Dumai Industri	: 155, 156, 157, 158, 159
PT Suryantara Purna Wibawa	: 339, 340, 341, 342
PT Tirta Kencana Wahana	: 166, 167, 170
PT Varindo Lombok Inti	: 437, 438, 439, 440
PT Yans Manunggal Jaya	: 88, 89, 90, 91
Pulau Bintan	: 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462
Pung Kian Hwa	: 155, 156, 157, 158, 159
Purba, Richard Manusun (Drs. M.M.)	: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Purnomo, Hari	: 330, 331, 332, 333, 334, 335
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bapeten	: 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238
Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (PRPPSE-KP)	: 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
Puteh, Abdullah (Ir. M.Si)	: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 18, 19

Q

Quirinno, Bagindo (M.Acc. CMA. CFM. CIA.)	: 359, 360, 361, 362
--	----------------------

R

Rachman, Eman	: 223, 224, 225
Rais, Syaukani Hassan (Prof. Dr. S.E. M.M.)	: 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
Ramli (Dr. Drs. M.M.)	: 250, 251, 252, 253, 254, 372
Rasoel, Irsyaffli	: 449, 450, 451
Razak, Noor Adenan (S.E.)	: 239, 240, 241, 242, 243, 244
Rebuin, Sofyan	: 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431
Riau	: 255, 256, 257, 258, 259, 260, 562, 563, 564
Rizal, Abdul Hamid (Drs. M.Si)	: 562, 563, 564
Rizal, Ramadhan (S.H.)	: 14, 15, 16, 17, 18, 19
Robian (Dr. Ir. M.si)	: 150, 151, 152, 153, 154
Roebadi, Kurniawan	: 452, 453, 454
Rogi, Jimmy Rimba (S.Sos.)	: 512, 513, 514, 515, 516
Rojadi, Achmad (S.Sos)	: 66, 67, 68
Royan, Bulyan	: 490, 491, 492, 493, 494, 496, 497, 498
Rusdany, Ismed (S.E., M.A.P.)	: 265, 266, 267, 268, 269, 270
Rusdiharjo (Drs. S.H.)	: 226, 227, 228
Rusnandi, Daeng (Drs. M.B.A. M.Si.)	: 562, 563, 564

S

Sabah	: 446, 447, 448
Sadono, Hariadi (Ir. M.M.)	: 565, 566, 567, 568, 569, 570
Salam, Hieronimus Abdul (Ir. M.Sc.)	: 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238
Saleh, A. Chalik (Drs. M.M.)	: 379, 380, 381, 382
Samarinda	: 350, 351, 352
Santoso, Freddy	: 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370
Sastrawijaya, Untung	: 72, 73, 74
Satuan Kerja Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah Semarang	: 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346
Sentosa, Suryadi	: 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557
Serang	: 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346
Setiawan, Danny (Drs. M.Si.)	: 290, 291, 295, 296, 301, 302
Setiawan, Erick Hikmat	: 118, 119, 120
Setiawan, Prihatna	: 176, 177, 178, 179
Setiawan, Yacob	: 307
Setiawan, Yusuf	: 303, 304, 305, 306, 307
Setyawati, Ines Wulanari	: 350, 351, 352
Siahaan, Jurnal Effendi	: 585

Sidabutar, Rustam Effendy (S.H. M.Si.)	: 121, 122, 123, 124, 125
Simanjuntak, Rusli	: 397, 398, 399, 400, 401, 402
Simanjuntak, Washington Mampe	: 579, 580, 581, 582, 583
Parulian (Drs.)	
Simatupang, Kamso	: 446, 447, 448
Sindoro, Billy	: 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484
Singapura	: 463, 464, 465
Sinuhaji, Malem Pagi	: 106, 107
Situbondo	: 520, 521, 522
Sjamsuddin, Nazaruddin (Prof. Dr.)	: 47, 48, 49, 50
Sjarifuddin, Umar	: 576, 577, 578
Soleh, Mochamad (S.H. M.H.)	: 14, 15, 16, 17, 18, 19
Somantri, Maman Husen	: 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396
Sriyadi (S.H.)	: 106, 107, 108
Subroto, Mulyono	: 353, 354, 355
Suhaimi, Fahrani	: 79, 80, 81, 82, 83
Suhardjo, Susongko (Dr. Ir. Msc.)	: 23, 24, 25
Suhartoyo (S.H.)	: 102, 103, 104, 105
Sujudi, Achmad (dr. M.H.A.)	: 523, 524, 525, 526, 527, 528
Sukarna, Muchamad	: 449, 450, 451
Sulawesi Utara	: 282, 514
Sumatra Selatan	: 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 458, 459, 460, 461, 462
Sumatra Utara	: 284
Suparman (S.H.)	: 92, 93, 94, 95
Suparman, Andjar (Ir. M.M.)	: 163, 164, 165
Supiori	: 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 553, 552, 554, 555, 556, 557
Supriadi, Agus	: 316, 317, 318, 319
Surabaya	: 510, 511
Suratno (Drs. M.M.)	: 75, 76, 77, 78
Surtini, Tintin	: 92, 93, 94, 95
Suryani, Artalyta	: 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419
Suryodibroto, Waskito (Ir. M.M.)	: 141, 142, 143, 144
Susanto, Budhi	: 130, 131, 132, 133, 134
Susilo, Warsa (Drs. M.Pd.)	: 207, 208, 209
Suwarsono, Dedy	: 495, 496, 497, 498
Syaifuddin, Teuku (S.H.)	: 14, 15, 16, 18, 19

T

Tadjuddin, Aslim	: 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396
Tahir, Makdum	: 449, 450, 451
Tahir, Sarjan (S.E. M.M.)	: 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 432, 433, 434
Talaud	: 282
Tambusai, Muzni	: 558, 559, 560, 561
Tan, Chandra Antonio	: 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434
Tanggamu	: 285
Tanjung Jabung Timur	: 285
Tanjung Pantai Air Telang	: 458, 459, 460, 461, 462
Tanjung Priok	: 466, 467, 468, 469, 470, 471, 538, 539, 540
Tarigan, Arihken (Drs.)	: 226, 227, 228
Taryoto, Andin H. (Dr.)	: 183, 184, 185, 186
Tawau	: 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454
Tebo	: 285
Ternate	: 350, 351, 352
Toemion, Theo F.	: 109, 110, 111, 112, 113, 114
Toemion, Theodorus Fransisco	: 109, 110, 111, 112, 113, 114
Trijono (Ir. M.M.)	: 507, 508, 509, 510, 511
Tukiman, Juli	: 307
Tutuarima, Margareth Elisabeth	: 330, 331, 332, 333, 334, 335

W

Walla, T. (Capt.)	: 20, 21, 22
Walla, Tarcisius (Capt.)	: 20, 21, 22
Waluyo, Pono	: 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
Warikar, Jules Fitzgerald	: 545, 546, 547, 548, 549, 550
Wijoso, R. A. Harini	: 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
Winata, Tirta	: 166, 167, 170
Wiranata, David Kurniawan	: 320, 321, 322, 323, 324

Y

Yamdhu Y. R., Hamka (S.E.)	: 403, 404, 405, 406, 407, 408, 584
Yapen Waropen	: 373, 374, 375, 376, 377
Yayasan Dana Tabungan Pesangon	: 558, 559, 560, 561
Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (YDTP-Migas)	

Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI)	: 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396
Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI)	: 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402
Yin Yin	: 88, 89, 90, 91
Yunus, Zulkarnain	: 220, 221, 222, 223, 224, 225
Yussac, Safder (S.Sos. M.Si)	: 55, 56, 57, 58, 59
Yusuf, Glenn Muhammad Surya	: 420
Yusuf, Rinaldi	: 531, 532, 533, 534, 530
Z	
Zakaria, Achmad Fathony	: 571, 572, 573, 574, 575
Zein, KGS. Taswin (S.E. M.M.)	: 343, 344, 345, 346, 350, 351, 352

DAFTAR SINGKATAN

ABT	:	Anggaran Belanja Tambahan Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian
ABT DIK-S	:	Kegiatan-Suplemen
AFIS	:	Automatic Fingerprint Identification System
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bapeten	:	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Baplan	:	Badan Planologi Kehutanan
BI	:	Bank Indonesia Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam
Binapendagri/PPTKDN	:	Negeri
BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BLBI	:	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLK	:	Balai Latihan Kerja
BLK/UPT	:	Balai Latihan Kerja/Unit Pelaksana Teknis
BPD	:	Bank Pembangunan Daerah
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
Capt.	:	<i>Captain</i> (Kapten)
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DBH-SDA	:	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
DCM	:	<i>Deputy Chief of Mission</i>
Depnakertrans	:	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DIK	:	Daftar Isian Kegiatan
DIP	:	Daftar Isian Proyek
Ditjen	:	Direktorat Jenderal
Ditjen	:	Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan
PPTKDN/Binapendagri	:	Tenaga Kerja Dalam Negeri
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DKI	:	Daerah Khusus Ibukota
dll	:	dan lain-lain
DPKD	:	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
DPKK	:	Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan
DPKKTKI	:	Tenaga Kerja Indonesia
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

EPP	: Evaluasi Pelaporan Pemeriksaan
GPS	: <i>Geographical Position System</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
IPK	: Ijin Pemanfaatan Kayu
IPO	: <i>Initial Public Offering</i>
	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
IUPHHK-HT	: Tanaman
Jampidsus	: Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
KJRI	: Konsulat Jenderal Republik Indonesia
KORPRI	: Korps Pegawai Republik Indonesia
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
KPLP	: Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPU	: Kantor Pelayanan Utama
KTI	: Kawasan Timur Indonesia
Kukar	: Kutai Kartanegara
LPK	: Lembaga Pelatihan Kerja
Migas	: Minyak dan Gas
NJOP	: Nilai Jual Objek Pajak
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pemjadig	: Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Gas
PFPD	: Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PMI	: Palang Merah Indonesia
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPFPH	: Proyek Pembinaan Fasilitas Pelayanan Hukum
PPK	: Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi
PRPPSE-KP	: Kelautan dan Perikanan
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
RRI	: Radio Republik Indonesia
SBU	: <i>Strategic Business Unit</i>
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas
UPTP	: Unit Pelaksana Teknis Pusat
	Yayasan Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja
YDTP-Migas	: Pemborong Minyak dan Gas Bumi

YLPPI : Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan
YMPI : Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia

DAFTAR ISTILAH

Amendemen	:	Usul perubahan undang-undang yang dibicarakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan sebagainya
Audit	:	Pemeriksaan terhadap peralatan, program, aktivitas, dan prosedur untuk menentukan efisiensi dari kinerja keseluruhan sistem terutama untuk menjamin integritas dan keamanan data
<i>Backhoe Loader</i>	:	Alat berat yang memiliki dwifungsi di bagian depan berfungsi untuk pengangkutan dan bagian belakang berfungsi untuk penggalian dan pemuatan.
Bunga Khusus (<i>Special Rate</i>)	:	Tingkat bunga atau suku bunga yang diberlakukan pada pinjaman atau investasi dengan ketentuan atau kondisi tertentu yang berbeda dari tingkat bunga standar atau umum.
Deposito	:	Uang yang disimpan dalam rekening
<i>Deputy Chief of Mission</i> (DCM)	:	Seorang pejabat senior dalam misi diplomatik yang biasanya bertanggung jawab atas berbagai aspek manajemen dan administrasi misi diplomatik tersebut.
<i>Dump Truck</i>	:	Dalam bahasa Indonesia truk jungkit adalah alat pengangkut yang digunakan untuk memindahkan material dari satu lokasi ke lokasi lainnya.
<i>Fee</i>	:	Dalam bahasa Indonesia biaya merupakan uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau mendirikan, melakukan sesuatu
Geodetik	:	Bidang ilmu dan praktik yang berkaitan dengan pengukuran dan pemetaan permukaan Bumi dan objek-objek di atasnya.
GPS (<i>Geographical Position System</i>)	:	Sistem yang digunakan untuk menentukan posisi, keberadaan, dan navigasi di berbagai lokasi di seluruh dunia dengan menggunakan jaringan satelit dan perangkat elektronik
Grasi	:	Ampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman
<i>Hydraulic</i>	:	Cabang ilmu dan teknologi yang berhubungan dengan mekanika zat alir terutama zat cair
Impor	:	Pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri
<i>Initial Public Offering</i> (IPO)	:	Proses di mana sebuah perusahaan pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik untuk dibeli.
Instalatur	:	Orang yang bekerja atau ahli memasang instalasi

Inventasi	:	Penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan
Investigasi	:	Penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta melakukan peninjauan, percobaan, dan sebagainya, dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan (tentang peristiwa, sifat atau khasiat suatu zat, dan sebagainya)
Konsulat	:	Jabatan (kedudukan) konsul
<i>Ladder Truck</i>	:	Jenis kendaraan pemadam kebakaran yang dilengkapi dengan tangga yang panjang dan fleksibel,
Liga Utama Inggris (<i>Barclays Premier League</i>)	:	Liga tertinggi dalam sistem liga sepak bola di Inggris
Likuidasi	:	Pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero)
Mobil Tangga	:	Jenis kendaraan yang memiliki tangga yang fungsinya seperti pemadam kebakaran
<i>Outsourcing</i>	:	Cara untuk memindahkan pekerjaan atau kegiatan dari dalam perusahaan ke pihak ketiga atau perusahaan lain
Panitera	:	Pejabat kantor sekretariat pengadilan yang bertugas pada bagian administrasi pengadilan, membuat berita acara persidangan, dan tindakan administrasi yang lain; penulis; sekretaris (dalam perkumpulan, organisasi)
Perahu <i>Fiberglass</i>	:	Perahu serat glass yang memiliki keunggulan lebih banyak dibandingkan dengan perahu kayu
Pleidoi	:	Pidato pembelaan terhadap terdakwa yang dibacakan oleh advokat (pembela) atau terdakwa sendiri
Program Stimulus Fiskal	:	Tindakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan memperkuat aktivitas ekonomi melalui peningkatan belanja pemerintah, pengurangan pajak, atau kombinasi keduanya.
Rehabilitasi	:	Pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula)
Rekonstruksi	:	Pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali
Renovasi	:	Pembaharuan; peremajaan; penyempurnaan (tentang gedung bangunan dan sebagainya)

<i>Rontgen Portable</i>	:	Perangkat pemindai sinar-X portabel atau alat rontgen portabel yang dapat digunakan untuk menghasilkan gambar sinar-X
Rumpon	:	Tempat tinggal atau tempat berkumpul (berbiak)nya ikan yang sengaja dibuat orang untuk memudahkan penangkapan ikan, terbuat dari tumpukan batu (di sungai), benda-benda bekas, seperti beca dan ban (di laut)
Server	:	Dalam bahasa Indonesia biasa disebut peladen merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data
Sistem Manajemen Pelanggan (<i>Costumer Management System</i>)	:	Strategi bisnis yang memadukan proses, manusia dan teknologi.
Spesialistik	:	Merujuk pada kondisi atau karakteristik seseorang yang memiliki keahlian, pengetahuan, atau kecakapan yang sangat mendalam dalam bidang tertentu.
<i>Stoom Walls</i>	:	Alat berat yang digunakan untuk pemadatan jalan atau untuk pengaspalan jalan
Suplemen	:	Lampiran pelengkap; sesuatu yang ditambahkan untuk melengkapi; tambahan
Tsunami	:	Gelombang laut dahsyat (gelombang pasang) yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung api di dasar laut
Tukar Guling (<i>ruilslag</i>)	:	Sarana hukum baru dalam hukum positif Indonesia dan pada dasarnya lembaga ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan bagi kantor instansi/Departemen karena keterbatasan anggaran, dengan cara mengalihkan atas kekayaan negara kepada pihak swasta.

